TAHUN
2024

LAPORAN KAJIAN

PEMETAAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI KOTA TASIKMALAYA

KOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2024

mswordcoverpages.com


KOTA TASIKMALAYA
KOTA RESIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan kajian pemetaan dan evaluasi implementasi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya tahun 2024. Laporan ini disusun oleh tim penyusun yang beranggotakan para ahli dan praktisi pendidikan di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pendidikan inklusif di wilayah ini.

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang sangat penting dalam menjamin hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara di lingkungan sekolah reguler. Dalam laporan ini, kami telah melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap berbagai aspek implementasi pendidikan inklusif, termasuk distribusi siswa berkebutuhan khusus, ketersediaan Guru Pendidik Khusus (GPK), serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

Melalui kajian ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan, pendidik, dan masyarakat umum dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Kami juga berharap bahwa hasil kajian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan strategis dalam mendukung pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini, termasuk Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, para guru, serta masyarakat yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan dalam pengembangan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
A.Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....4
C.Tujuan Kajian.....7
D.Manfaat yang Diharapkan dari Kajian.....9
E. Ruang Lingkup Kajian.....11
BAB II.....13
KAJIAN TEORETIS.....13
A.Kebijakan Pendidikan Inklusif.....13
B. Pengertian, Tujuan dan Prnsip.....14
C.Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).....16
BAB III.....25
A.Aspek Geografi dan Demografi Kota Tasikmalaya.....25
B. Aspek Sosial-Ekonomi.....32
C.Pembangunan Manusia.....36
BAB IV.....48
A.Pemetaan Persebaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berkesulitan Belajar (ABB) berdasarkan kecamatan.....48
1. Kecamatan Kawalu.....48
2. Kecamatan Tamansari.....51
3. Kecamatan Cibeureum.....55
4. Kecamatan Purbaratu.....59
5. Kecamatan Tawang.....63
6. Kecamatan Cihideung.....67
7. Kecamatan Mangkubumi.....70
8. Kecamatan Indihiang.....73
9. Kecamatan Bungursari.....76
10. Kecamatan Cipedes.....80
B. Rekapitulasi Temuan Persebaran ABK & ABB se-kota Tasikmalaya tingkat SD.....84
1. Temuan Berdasarkan Jenis Hambatan Belajar.....85

2. Analisis Perbandingan Jenis Hambatan di Setiap Kecamatan.....86
3. Analisis SWOT Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Hambatan Belajar.....88
4. Strategi Penanganan dan Layanan Anak Berkebutuhan Khusus.....91
5. Alur Penangan Dalam Penerapan Pendidikan Inklusif.....93
d. Perencanaan Pembelajaran.....96
6. Penyediaan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan.....97
C. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif.....98
BAB V.....104
A. Kesimpulan.....104
B. Rekomendasi.....105
DAFTAR PUSTAKA.....viii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Tasikmalaya.....	27
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023	29
Tabel 3.3.	Indikator Makro Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2023	33
Tabel 3.4.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya	38
Tabel 3.5.	Perbandingan Komponen IPM Kota Tasikmalaya dengan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	40
Tabel 3.6.	Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2023	42
Tabel 3.7.	Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2023	43
Tabel 3.8.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	45
Tabel 3.9.	Proyeksi Kebutuhan TK Berdasarkan Penduduk Usia TK	46
Tabel 3.10.	Proyeksi Kebutuhan SD Berdasarkan Penduduk Usia SD	46
Tabel 3.11.	Proyeksi Kebutuhan SMP Berdasarkan Penduduk Usia SMP	46
Tabel 3.12.	Proyeksi Kebutuhan SMA Berdasarkan Penduduk Usia SMA.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Peta Wilayah Kota Tasikmalaya	25
Gambar 3.2.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2001-2023	26
Gambar 3.3.	Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023	27
Gambar 3.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023	28
Gambar 3.5.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023	30
Gambar 3.6.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2023	30
Gambar 3.7.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Tasikmalaya, 2023	31
Gambar 3.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2023	32
Gambar 3.9	Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2023	33
Gambar 3.10.	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem	35
Gambar 3.11.	Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem	35
Gambar 3.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2023	36
Gambar 3.13.	Perbandingan IPM Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat	39
Gambar 3.14.	Angka Partisipasi Kasar Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023	40
Gambar 3.15.	Angka Partisipasi Murni Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2023	41
Gambar 3.16.	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah	43
Gambar 3.17.	Capaian Harapan Lama Sekolah	44
Gambar 3.18.	Persentase Siswa yang Bisa Membaca Al-Qur'an Tahun 2023	45
Gambar 4.2.	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kawalu, Tahun Ajaran 2023/2024	49

Gambar 4.3. Banyaknya Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah di Kecamatan Kawalu, 2023 49
Gambar 4.4. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Kawalu 50
Gambar 4.3. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tamansari, 2023/2024..... 51
Gambar 4.4. Jumlah dan Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tamansari, 2023/2024..... 51
Gambar 4.5. Jumlah Penduduk Kecamatan Tamansari dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Perempuan 52
Gambar 4.6. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tamansari, 2023/2024..... 53
Gambar 4.7. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Tamansari 53
Gambar 4.8. Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Perempuan 56
Gambar 4.9. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kecamatan Cibeureum 57
Gambar 4.10. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Cibeureum..... 57
Gambar 4.11. Jumlah Penduduk Kecamatan Purbaratu dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Perempuan 60
Gambar 4.12. Jumlah Sekolah dan Madrasah di Kecamatan Purbaratu..... 61
Gambar 4.13. Sebaran Hambatan Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Purbaratu..... 61
Gambar 4.14. Jumlah Penduduk Kecamatan Tawang dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Perempuan 64
Gambar 4.15. Jumlah Sekolah dan Madrasah di Kecamatan Tawang 65
Gambar 4.16. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Tawang..... 65
Gambar 4.17. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Cihideung..... 68

Gambar 4.18. Jumlah Sekolah dan Madrasah di Kecamatan Mangkubumi 71
Gambar 4.19. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Mangkubumi 72
Gambar 4.20. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Indihiang..... 75
Gambar 4.21. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Bungursari 78
Gambar 4.22. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Cipedes 82
Gambar 4.23. Sebaran Peserta Didik Berkesulitan Belajar Berdasarkan Kecamatan se-Kota Tasikmalaya..... 84
Gambar 4.24. Sebaran Peserta Didik Berkesulitan Belajar Berdasarkan Jenis Hambatan Belajar se-Kota Tasikmalaya 85
Gambar 5.1. Alur Penanganan dalam Penerapan Pendidikan Inklusif..... 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menerima, menghargai, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusif, setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mengakses pendidikan di lingkungan sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut UNESCO, pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang "mencakup proses membangun lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman dan mengakomodasi semua siswa tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, atau emosional mereka."

Filosofi pendidikan inklusif menekankan pentingnya keberagaman dalam proses belajar. Melalui pendidikan inklusif, sekolah diharapkan mampu menyediakan sistem pembelajaran yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Ini berarti bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga mengembangkan lingkungan belajar yang mendorong penerimaan sosial, mengurangi diskriminasi, dan mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang beragam. Dalam pendidikan inklusif, keberagaman dilihat sebagai aset yang memperkaya pengalaman belajar dan bukan sebagai hambatan.

Pendidikan inklusif tidak hanya memiliki tujuan akademis tetapi juga sosial. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang menerima semua anak, pendidikan inklusif diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap anak berkebutuhan khusus, meningkatkan keterampilan sosial mereka, dan memperkuat rasa percaya diri mereka. Filosofi ini mengusung prinsip bahwa semua anak dapat belajar bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain, yang pada akhirnya dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan empati di antara siswa.

Pendidikan inklusif telah menjadi bagian dari komitmen global untuk memberikan pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Salah satu komitmen internasional utama dalam hal ini adalah Sustainable Development Goals (SDG) 4, yang menyerukan agar semua negara "menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua." SDG 4 merupakan tujuan yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan bahwa setiap anak,

termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan akses ke pendidikan yang layak dan setara. Selain itu, Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi oleh PBB juga menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk diskriminasi berdasarkan kebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam berbagai kebijakan nasional yang mendukung akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki kondisi fisik, intelektual, sosial, atau emosional yang berbeda, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Permendiknas ini menetapkan bahwa sekolah-sekolah umum harus siap menerima siswa berkebutuhan khusus dengan menyediakan fasilitas, dukungan, dan adaptasi yang diperlukan.

Meskipun berbagai kebijakan nasional telah mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekolah di Indonesia yang belum sepenuhnya siap menjalankan pendidikan inklusif karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Tantangan ini termasuk kurangnya Guru Pendidik Khusus (GPK), sarana pembelajaran yang terbatas, serta kurangnya pemahaman dan kesiapan guru dalam menghadapi kebutuhan khusus siswa. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di berbagai wilayah, sehingga akses pendidikan inklusif masih belum merata. Pemerintah pusat dan daerah masih perlu bekerja sama untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif agar semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat menerima pendidikan yang layak.

Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, memiliki populasi siswa berkebutuhan khusus yang cukup signifikan di tingkat sekolah dasar. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa jenis hambatan belajar yang dialami oleh siswa di kota ini, antara lain hambatan fisik/motorik, hambatan intelektual, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, serta hambatan emosional dan perilaku. Data awal menunjukkan bahwa hambatan yang paling banyak dialami siswa di Kota Tasikmalaya adalah kesulitan belajar yang termasuk dalam kategori "Lamban Belajar" (*Slow Learner*) dan "Kesulitan Belajar Spesifik" (*Specific Learning Difficulties*).

Tabel berikut ini menyajikan gambaran umum jumlah siswa dengan berbagai jenis hambatan di sekolah dasar Kota Tasikmalaya:

Jenis Hambatan	Jumlah Siswa
Penglihatan	5
Pendengaran	5
Intelektual	6
Fisik/Motorik	15
Emosional & Perilaku	47
Lamban Belajar (Slow Learner)	210
Kesulitan Belajar Spesifik (SLD)	78
Cerdas Istimewa & Bakat Istimewa	2
Autistic Spectrum Disorder (ASD)	5
ADHD	10
Hambatan Majemuk	2
Total	385

(Sumber: Data Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024)

Meskipun ada kebijakan nasional yang mendorong pendidikan inklusif, Kota Tasikmalaya menghadapi sejumlah kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan jumlah dan distribusi Guru Pendidik Khusus (GPK) yang memiliki kompetensi untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Sebagian besar sekolah dasar di Kota Tasikmalaya masih kekurangan GPK, sehingga beban pengajaran siswa berkebutuhan khusus sering kali jatuh pada guru reguler yang belum memiliki pelatihan khusus dalam pendidikan inklusif. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pelayanan dan dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus, terutama dalam hal penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan penyediaan fasilitas khusus.

Selain itu, persebaran siswa berkebutuhan khusus yang tidak merata juga menjadi tantangan. Sekolah-sekolah di daerah pusat kota umumnya lebih mampu menyediakan layanan inklusif karena memiliki akses ke lebih banyak sumber daya. Namun, di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau terpencil, akses terhadap pendidikan inklusif masih terbatas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus di wilayah tersebut.

Pada Tahun 2014 pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inlusif di Kota Tasikmalaya. Dan telah membentuk Pokja Pendidikan Inklusif Kota Tasikmalaya. Adanya perwalkot itu menunjukan kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota yang berkomitmen terhadap pendidikan inklusi walaupun dalam perjalanananya seringkali menghadapi berbagai tantangan dari sisi implementasinya. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 12% dari

total siswa di sekolah dasar mengalami berbagai kesulitan belajar, mulai dari disleksia, disgrafia, diskalkulia, hingga gangguan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD). Kondisi ini memerlukan perhatian khusus karena literasi merupakan fondasi penting dalam pendidikan dasar yang mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar di tingkat pendidikan selanjutnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kajian untuk menjaring dan mendata persebaran ABK dan ABB serta mengelompokannya di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya menganalisis kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga dapat memberikan gambaran penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya.

Penjaringan dan pendataan yang akurat adalah langkah awal yang krusial untuk memahami skala dan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi oleh anak-anak di Kota Tasikmalaya. Dengan data yang tepat, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, analisis dan pengembangan strategi diharapkan dapat memberikan alternatif metode pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan ABK/ABB di sekolah, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan literasi mereka.

Selain hal tersebut, penting bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif, terutama dengan memastikan ketersediaan GPK yang memadai, menyediakan fasilitas pendukung, serta meningkatkan kapasitas guru reguler melalui pelatihan khusus. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, termasuk distribusi siswa berkebutuhan khusus, ketersediaan GPK, dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah Utama dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam menjamin hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara di lingkungan sekolah reguler. Meskipun kebijakan nasional dan internasional telah mendorong implementasi pendidikan inklusif, masih terdapat berbagai kendala di lapangan yang menghambat realisasi tujuan ini, terutama di Kota Tasikmalaya. Beberapa masalah utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya diidentifikasi sebagai berikut:

a. Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi Guru Pendidik Khusus (GPK)

Guru Pendidik Khusus (GPK) memainkan peran krusial dalam mendukung pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Namun, jumlah GPK di Kota Tasikmalaya masih sangat terbatas. Banyak sekolah dasar di kota ini yang belum memiliki GPK yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Hal ini mengakibatkan penanganan anak berkebutuhan khusus sering kali dilakukan oleh guru reguler yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam bidang pendidikan inklusif, sehingga kualitas layanan terhadap anak berkebutuhan khusus menjadi kurang optimal.

b. Distribusi Siswa Berkebutuhan Khusus yang Tidak Merata

Kota Tasikmalaya memiliki jumlah siswa berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar, dengan berbagai jenis hambatan belajar seperti hambatan intelektual, fisik/motorik, penglihatan, dan lainnya. Namun, persebaran siswa berkebutuhan khusus tidak merata, di mana sebagian besar sekolah yang berada di kota lebih siap dalam menyediakan layanan inklusif dibandingkan sekolah di wilayah pinggiran. Ketimpangan ini menyebabkan adanya perbedaan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, yang pada akhirnya dapat menciptakan kesenjangan pendidikan di antara mereka.

c. Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Penunjang di Sekolah

Fasilitas pendukung seperti ruang belajar yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus, alat bantu pembelajaran, serta sarana untuk mendukung adaptasi kurikulum masih terbatas di banyak sekolah dasar di Kota Tasikmalaya. Minimnya fasilitas ini menyebabkan kesulitan bagi guru dalam memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, anak dengan hambatan penglihatan memerlukan alat bantu visual atau modifikasi bahan ajar yang tidak selalu tersedia di setiap sekolah.

d. Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Guru Reguler

Banyak guru reguler di Kota Tasikmalaya yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai mengenai pendidikan inklusif. Sebagai akibatnya, terdapat kesulitan dalam menyusun strategi pembelajaran yang adaptif dan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Kurangnya pelatihan bagi guru reguler untuk menghadapi keberagaman kebutuhan siswa ini menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa.

e. Efektivitas Kebijakan Pendidikan Inklusif yang belum optimal

Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah ditetapkan baik di tingkat nasional maupun lokal, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kebijakan yang ada sering kali belum sepenuhnya efektif dalam memastikan semua sekolah memiliki akses ke sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan inklusif. Keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta minimnya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal di Kota Tasikmalaya.

Masalah-masalah di atas menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami kondisi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, sehingga dapat dirumuskan solusi yang lebih tepat dan efektif dalam mendukung pendidikan inklusif di wilayah ini.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas, kajian ini berfokus pada sejumlah pertanyaan penelitian berikut yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kondisi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya:

a. Bagaimana persebaran dan jumlah siswa berkesulitan belajar di sekolah dasar negeri di Kota Tasikmalaya?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total siswa berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar di Kota Tasikmalaya, termasuk distribusi mereka di berbagai jenis sekolah. Data ini penting untuk memahami persebaran siswa berkebutuhan khusus di berbagai lokasi dan merancang intervensi yang lebih efektif dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif.

b. Apa saja faktor-faktor penyebab utama yang memengaruhi kesulitan belajar pada siswa di Kota Tasikmalaya?

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa, pemerintah dan sekolah dapat merumuskan pendekatan yang lebih sesuai untuk menangani tantangan yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus. Faktor-faktor ini mungkin termasuk aspek-aspek biologis, lingkungan, sosial, atau kualitas layanan pendidikan yang tersedia.

c. Bagaimana ketersediaan dan distribusi Guru Pendidik Khusus (GPK) dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus?

Ketersediaan GPK yang kompeten sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang berkualitas. Pertanyaan ini berfokus pada seberapa banyak GPK yang tersedia di Kota Tasikmalaya dan bagaimana distribusinya di antara sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar negeri. Data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kebutuhan tambahan GPK untuk memenuhi standar layanan pendidikan inklusif.

d. Bagaimana efektivitas kebijakan pendidikan inklusif yang sudah diterapkan di Kota Tasikmalaya?

   Pertanyaan ini berfokus pada evaluasi kebijakan pendidikan inklusif yang telah diterapkan, terutama mengenai sejauh mana kebijakan ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Melalui pertanyaan ini, kajian ini diharapkan dapat menemukan aspek-aspek kebijakan yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya.

Pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kajian ini, serta menghasilkan rekomendasi yang praktis dan strategis untuk mendukung perbaikan implementasi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara, sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif yang telah menjadi komitmen global dan nasional.

C. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, khususnya dalam hal pemetaan siswa berkebutuhan khusus, distribusi dan kompetensi Guru Pendidik Khusus (GPK), serta evaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif dan menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum dari kajian ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada pemetaan siswa berkebutuhan khusus dan evaluasi kebijakan yang diterapkan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat

ditemukan solusi yang konkret dan aplikatif dalam mendukung pengembangan pendidikan inklusif yang lebih efektif dan merata.

2. Tujuan Spesifik

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, kajian ini menetapkan beberapa tujuan spesifik sebagai berikut:

1. Menjaring dan Mendata Anak Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya

   Mengumpulkan data mengenai jumlah, jenis hambatan, serta lokasi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri di Kota Tasikmalaya. Data ini sangat penting untuk mengetahui distribusi siswa dengan berbagai jenis hambatan belajar, seperti hambatan intelektual, fisik/motorik, penglihatan, pendengaran, dan emosional. Informasi ini akan membantu dalam menentukan kebutuhan layanan pendidikan inklusif di berbagai sekolah dasar negeri di Kota Tasikmalaya.

2. Menganalisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar pada Siswa di Kota Tasikmalaya

   Mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa berkebutuhan khusus. Faktor-faktor ini bisa bersifat internal, seperti kondisi fisik dan intelektual siswa, maupun eksternal, seperti lingkungan sosial, ekonomi keluarga, dan kualitas layanan pendidikan yang ada di sekolah. Dengan memahami penyebab kesulitan belajar, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus.

3. Menganalisis Persebaran dan Komposisi Guru Pendidik Khusus (GPK)

   Melakukan analisis mengenai ketersediaan dan distribusi Guru Pendidik Khusus (GPK) di sekolah dasar di Kota Tasikmalaya. GPK memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan inklusif dengan memberikan bantuan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah dan kompetensi GPK sudah mencukupi untuk menangani kebutuhan siswa dengan berbagai jenis hambatan belajar. Informasi ini juga akan membantu dalam merencanakan kebutuhan tambahan GPK di masa mendatang.

4. Melakukan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif yang Sudah Diterapkan di Kota Tasikmalaya

Menilai sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif yang telah diterapkan di Kota Tasikmalaya efektif dalam mendukung pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap implementasi kebijakan di tingkat sekolah, ketersediaan fasilitas pendukung, adaptasi kurikulum, dan dukungan bagi guru reguler dalam menghadapi keberagaman siswa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan dan program pendidikan inklusif yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa berkebutuhan khusus di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat yang Diharapkan dari Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, termasuk dalam hal penyediaan GPK, fasilitas pendukung, serta alokasi anggaran.
2. Bagi Sekolah dan Guru: Membantu sekolah dalam memahami kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, serta dalam merencanakan strategi dan pendekatan yang lebih adaptif untuk mendukung pendidikan inklusif.
3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif, serta mengurangi stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.
4. Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif yang mereka terima, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang sesuai potensi mereka dalam lingkungan yang mendukung.

a. Pentingnya Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya

Pendidikan inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Bagi Kota Tasikmalaya, pendidikan inklusif menjadi kebutuhan mendesak mengingat besarnya jumlah siswa berkebutuhan khusus di wilayah ini dan tantangan yang dihadapi dalam menyediakan akses pendidikan yang setara bagi mereka.

1) Peran Pendidikan Inklusif dalam Pembangunan Sosial

Pendidikan inklusif tidak hanya berperan dalam aspek akademis tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan menyediakan lingkungan belajar yang mencakup semua anak,

termasuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Ketika anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan teman-teman sebaya mereka di sekolah reguler, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang beragam.

2) Pendidikan inklusif juga berperan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, anak-anak diajarkan untuk saling menghargai perbedaan dan melihat keberagaman sebagai kekuatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan empati dan rasa tanggung jawab sosial di kalangan siswa, serta membantu membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif di masa depan.

b. Dampak Kurangnya Implementasi Pendidikan Inklusif yang Efektif

Kurangnya implementasi pendidikan inklusif yang efektif dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa akses ke pendidikan inklusif yang memadai, siswa berkebutuhan khusus dapat mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam pengembangan keterampilan akademis, dan penurunan rasa percaya diri. Mereka juga berisiko mengalami stigma yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka dalam jangka panjang.

Selain itu, kurangnya implementasi pendidikan inklusif yang efektif juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses pendidikan. Di Kota Tasikmalaya, perbedaan akses dan kualitas layanan pendidikan inklusif di berbagai wilayah menunjukkan adanya ketimpangan yang berdampak pada kesempatan belajar siswa berkebutuhan khusus. Kesenjangan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga.

c. Alasan Mendukung Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Tasikmalaya

Pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar sangat penting untuk memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan akademis dan sosial anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara sejak dini, pendidikan inklusif diharapkan dapat membantu anak-anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi mereka secara optimal. Pendidikan inklusif di sekolah dasar juga penting untuk membangun kesadaran di kalangan anak-anak dan

masyarakat tentang pentingnya menerima dan menghargai keberagaman.

Implementasi pendidikan inklusif yang efektif di Kota Tasikmalaya juga dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Sebagai bagian dari komitmen nasional dan internasional, pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

E. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada sekolah dasar negeri di Kota Tasikmalaya. Fokus kajian ini adalah pada pemetaan siswa berkebutuhan khusus, distribusi dan kompetensi GPK, serta evaluasi kebijakan pendidikan inklusif yang telah diterapkan. Adapun rincian ruang lingkup kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan Kajian

   Kajian ini berfokus pada sekolah dasar negeri di Kota Tasikmalaya dan tidak mencakup sekolah menengah atau sekolah khusus di luar sekolah dasar. Batasan ini dipilih karena sekolah dasar merupakan tingkat pendidikan awal yang penting dalam membangun fondasi akademis dan sosial anak. Pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar juga menjadi fokus utama dalam kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, sehingga data yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya.

2. Aspek Kajian yang Akan Dibahas

Kajian ini mencakup beberapa aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, yaitu:

a. Pemetaan Siswa Berkebutuhan Khusus

   Menganalisis data mengenai jenis dan jumlah siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar di Kota Tasikmalaya. Kajian ini akan mencakup berbagai jenis hambatan belajar, seperti hambatan intelektual, emosional, penglihatan, pendengaran, dan fisik/motorik, serta menganalisis persebaran siswa dengan hambatan belajar di berbagai sekolah dasar di kota ini.

b. Pemetaan Guru Pendidik Khusus (GPK)

   Melakukan analisis mengenai ketersediaan dan distribusi GPK di sekolah dasar di Kota Tasikmalaya. Kajian ini akan mengidentifikasi jumlah dan kompetensi GPK yang ada serta menganalisis kebutuhan tambahan GPK untuk memenuhi standar layanan pendidikan inklusif di kota ini.

c. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

   Mengevaluasi kebijakan pendidikan inklusif yang telah diterapkan di Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada efektivitas kebijakan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. Evaluasi ini mencakup implementasi kebijakan di tingkat sekolah, adaptasi kurikulum, serta dukungan bagi guru dan fasilitas pendukung yang tersedia.

Dengan ruang lingkup yang jelas dan terarah ini, kajian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di wilayah tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Inklusi adalah "filosofi" yang menyatakan bahwa ruang kelas dan ruang bermasyarakat tidak lengkap tanpa mengikutsertakan anak-anak dengan semua kebutuhan. Inklusi merupakan sebuah pola pikir bagaimana memberi kesempatan sama kepada semua anak, salah satunya untuk belajar di kelas yang sama.

Isu terkait dengan pendidikan yang inklusif menjadi diskusi politik dan selanjutnya tertuang dalam kebijakan di mana pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Praktik pendidikan inklusif di dunia telah menjadi agenda internasional di antaranya melalui SDGs yang mengamanatkan agar semua anak tanpa kecuali dipenuhi hak sosial dan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, serta telah menjadi agenda utama dalam pendidikan untuk semua di satuan pendidikan reguler. Di Indonesia, praktik pendidikan inklusif telah berkembang pesat sejak tahun 2003 dan sampai sekarang telah tercatat lebih dari 36.000 satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Keberhasilan pendidikan inklusif akan tercapai jika faktor-faktor lingkungan yang menjadi penghambat belajar anak dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk membantu satuan pendidikan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan inklusif diperlukan panduan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan reguler atau satuan pendidikan umum.

Oleh karena itu, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyusun Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif agar dapat membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan yang optimal bagi perkembangan peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi, dan karakteristiknya.

Kebijakan Pendidikan inklusif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

B. **Pengertian, Tujuan dan Prnsip**

Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi: karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya. Pola pikir ini selanjutnya berkembang dengan proses masuknya konsep tersebut dalam kurikulum di satuan pendidikan sehingga pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya.

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; Mewujudkan penyelenggaraan

pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Kunci utama yang menjadi prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif adalah bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas sehingga bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik.

Prinsip adaptasi berarti dalam melaksanakan pendidikan inklusif, satuan pendidikan harus memperhatikan tiga dimensi dalam melakukan proses penyesuaian, yaitu: kurikulum, instruksional, dan lingkungan belajar (ekologis).

Adaptasi kurikulum terkait dengan penyesuaian isi, materi atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Pada adaptasi kurikulum guru dapat melakukan penambahan keterampilan untuk mengganti agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan atau mengganti dengan kompetensi lain yang setara. Adaptasi lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan penyederhanaan kompetensi yang hendak dicapai. Proses penyederhanaan tergantung pada kemampuan awal, kondisi, dan modalitas belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen.

Dalam proses adaptasi kurikulum satuan pendidikan harus: fleksibel dan inovatif; memastikan perkembangan kebijakan sekolah inklusif; membuat penyesuaian kurikulum, membuat perencanaan untuk seluruh kelas, menetapkan tujuan pengajaran yang terbuka dan jelas, menggunakan alternatif metode pengajaran, menggunakan teknologi yang tepat, dan membuat persiapan terlebih dahulu; memastikan kemudahan lingkungan fisik dan mengembangkan lingkungan satuan pendidikan yang mendukung; dan mengembangkan kerja sama dengan bekerja bersama dalam tim.

- Adaptasi pembelajaran terkait cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan guru agar peserta didik menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan.
- Dalam hal ini guru diberikan keleluasaan dalam melakukan penyesuaian proses pembelajaran di kelas yang beragam dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.
- Adaptasi lingkungan belajar berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran
- (dimana, kapan, dan bersama siapa pembelajaran dilakukan) termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

  Penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional dapat dilakukan dengan model:

- **Eskalasi/akselerasi**: program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Model ini terutama diterapkan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, serta memiliki kecepatan belajar yang luar biasa.
- **Duplikasi**: Model duplikasi artinya kurikulum yang digunakan untuk PDBK sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDBK. Mungkin hambatan yang dialami tidak terlalu berat sehingga masih dapat mengikuti kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan tersebut.
- **Simplikasi atau modifikasi**: kurikulum umum dimodifikasi, disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK. Modifikasi dan penyederhanaan kurikulum dapat dilakukan dalam salah satu atau lebih dari hal-hal berikut, yaitu tujuan, isi, metode dan cara penilaian.
- ***Substitusi***: beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Contoh kegiatan menggambar tidak perlu diberikan bagi anak dengan hambatan penglihatan, diganti dengan kegiatan lain yang setara, misalnya menyanyi, atau membuat patung dari bahan yang lunak. Contoh lain anak dengan hambatan pendengaran, mungkin tidak perlu mengikuti pelajaran *'listening comprehension'* dan dapat digantikan dengan kegiatan lain yang setara, misalnya mengarang, atau menulis cerita.
- ***Omisi:*** beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagian besar ditiadakan menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka dapat dibuatkan kurikulum khusus yang bersifat individual berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen.

C. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai (1) anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; (2) anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan (3) anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Selain cakupan tersebut di atas, konsep PDBK dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu PDBK yang bersifat sementara (*temporer*) dan PDBK yang bersifat menetap (*permanent*). PDBK yang bersifat sementara (*temporer*) adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. PDBK yang bersifat menetap atau *permanent* adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, antara lain: anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan perkembangan intelektual.

1. **Peserta didik dengan hambatan intelektual/ Tunagrahita**

Peserta didik dengan hambatan intelektual *(intellectual disability)* adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan atau keterbelakangan intelektual sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun sosialnya. Seseorang dikatakan mengalami hambatan intelektual apabila memiliki tiga indikator, yaitu: a. keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau perkembangan kecerdasan mentalnya jauh di bawah usia kronologis; b. hambatan dalam perilaku sosial/adaptif; dan c. terjadi pada usia perkembangan maksimal sampai usia 18 tahun. Tingkat kecerdasan seseorang diukur melalui tes inteligensi yang hasilnya disebut dengan IQ (*intelligence quitient*). Peserta didik dengan hambatan intelektual dikelompokkan menjadi 4 (empat) tingkatan sebagai berikut:

a. Peserta didik dengan hambatan intelektual ringan (IQ 70-55).
b. Peserta didik dengan hambatan intelektual sedang (IQ 55-40).
c. Peserta didik dengan hambatan intelektual berat (IQ 40-25).
d. Peserta didik dengan hambatan intelektual sangat berat (IQ <25).

Dampak yang ditimbulkan dari peserta didik dengan hambatan intelektual adalah gangguan komunikasi, kemandirian, dan penyesuaian sosial. Sementara secara kognitif peserta didik dengan hambatan intelektual akan menimbulkan dampak sebagai berikut: a. sulit mempelajari tugas-tugas yang sederhana sekalipun; b. hambatan dalam ingatan jangka pendek dan jangka panjang akibatnya mereka kesulitan mengingat, menemukan, dan mengurutkan dengan benar; dan c. tidak dapat menggeneralisasi (Smith, 2004). Termasuk kategori peserta didik dengan hambatan intelektual adalah mereka yang mengalami *down syndrome*. Anak dengan hambatan intelektual termasuk *down syndrome* tidak memungkinkan dapat mengikuti tuntutan kurikulum standar sesuai kelompok usianya, dan karenanya dibutuhkan kurikulum khusus. Kurikulum pendidikan yang dibutuhkan bagi mereka lebih bersifat pendidikan kemandirian dan pengetahuan akademik yang bersifat dasar dan fungsional.

2. Peserta didik dengan hambatan Penglihatan

Seseorang disebut mengalami hambatan penglihatan apabila setelah diukur dengan menggunakan alat ukur ketajaman penglihatan menghasilkan skor 20/200 *feet* atau kurang dari itu, dan/atau memiliki lapang pandang kurang dari 20 derajat. Anak dengan hambatan penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Berdasarkan ketajaman penglihatannya tunanetra dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak yang buta total (*totally blind)* dan anak kurang lihat (*low vision)*. Keduanya memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dan membutuhkan layanan yang

berbeda pula. peserta didik dengan hambatan penglihatan biasanya memiliki tingkat perkembangan intelektual yang wajar sehingga dapat mengikuti pendidikan dengan kurikulum standar, tetapi harus dilakukan adaptasi atau penyesuaian.

Klasifikasi :

1) **Kurang penglihatan** Mereka yang memiliki pandangan yang kabur ketika melihat suatu objek.

2) Buta total Mereka yang sama sekali tidak mampu melihat rangsangan cahaya dari luar.

3. Peserta didik dengan hambatan pendengaran

Peserta didik dengan hambatan pendengaran adalah suatu kondisi kerusakan atau tidak berfungsinya pendengaran dalam berbagai tingkatan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan bahasa. Peserta didik dengan hambatan pendengaran apabila diukur dengan menggunakan audiometer menghasilkan skor 91 dB atau lebih besar, disebut tuli, dan apabila menghasilkan 27 - 90 db disebut kurang dengar (hard of hearing). Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Peserta didik dengan hambatan pendengaran secara umum tidak mengalami hambatan intelektual, tetapi mengalami keterlambatan bahasa dan hambatan komunikasi. Mereka dapat mengikuti kurikulum standar, tetapi harus dilakukan adaptasi, terutama untuk mengatasi kemiskinan bahasa melalui pemerolehan bahasa lebih dahulu.

4. Peserta didik dengan hambatan Fisik/Tuna Daksa

Peserta didik dengan hambatan fisik motorik adalah anak yang mengalami hambatan yang bersifat menetap pada anggota gerak (tulang, sendi, otot). Mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuhan otot, atau gangguan fungsi syaraf otak (*Cerebral Palsy*), dan/atau kelumpuhan pada anggota tubuh (Polio).

Seseorang disebut peserta didik dengan hambatan fisik motorik jika mengalami kondisi sebagai berikut.

a. Cerebral Palcy (CP): mengalami gangguan motorik karena ketidak-berfungsinya bagian pada otak (kelayuhan pada otak) tampak dalam kondisi spastic, athetoid, ataxia, rigit, dan tremor.

b. Polio: kelumpuhan pada anggota tubuh karena penyakit atau virus pada masa kandungan atau kanak-kanak sehingga menyebabkan gangguan perkembangan.

c. Amputasi: kehilangan salah satu atau lebih anggota tubuh karena diamputasi dan (biasanya) digantikan anggota tubuh tiruan.

d. Muscular Distrophy Progresive: kelainan gerak yang diakibatkan

karena kelainan otot yang bersifat progressif (semakin lama semakin berat).

5. Peserta didik dengan hambatan emosi atau perilaku

Peserta didik dengan hambatan emosi atau perilaku adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi atau perilaku mereka, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar secara efektif di lingkungan sekolah. Hambatan ini dapat berbentuk gangguan emosi, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan mood lainnya, serta gangguan perilaku, seperti perilaku agresif, hiperaktif, atau perilaku yang melanggar aturan. Beberapa karakteristik yang umumnya terlihat pada peserta didik ini meliputi:

a. Kesulitan Berinteraksi Sosial: Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan teman sekelas atau guru, yang bisa disebabkan oleh kecemasan sosial, isolasi diri, atau perilaku agresif.

b. Kecenderungan Merasa Cemas atau Stres Berlebihan: Anak-anak dengan hambatan emosi sering merasa cemas berlebihan dalam situasi tertentu di lingkungan sekolah, yang dapat mengganggu konsentrasi dan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar.

c. Impulsivitas atau Kesulitan Mengendalikan Emosi: Beberapa peserta didik mungkin menunjukkan perilaku impulsif, seperti berbicara tanpa izin, bergerak tanpa henti, atau reaksi emosional yang berlebihan saat menghadapi situasi sulit.

d. Kesulitan Mengikuti Aturan dan Instruksi: Hambatan perilaku dapat membuat mereka cenderung tidak patuh atau sulit mengikuti aturan yang ditetapkan di kelas, sehingga mengganggu proses pembelajaran, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

e. Penurunan Prestasi Akademik: Gangguan emosi atau perilaku seringkali berdampak langsung pada prestasi akademik, karena anak-anak ini mungkin merasa kesulitan dalam fokus dan mengembangkan minat terhadap pelajaran.

6. Peserta Didik *slow learner*

Lamban belajar *(slow learner)* adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata anak sebayanya, tetapi tidak termasuk kategori peserta didik dengan hambatan intelektual (biasanya memiliki IQ antara 70-90). Dalam beberapa hal anak ini mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibanding dengan peserta didik dengan hambatan intelektual. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibandingkan dengan sebayanya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Mereka dapat mengikuti kurikulum standar, tetapi membutuhkan waktu

yang lebih lama. Adaptasi kurikulum sangat diperlukan untuk mereka.

Peserta didik *slow learner* adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menyerap pelajaran dengan kecepatan yang sama seperti peserta didik lainnya. Mereka bukan anak-anak dengan hambatan intelektual atau disabilitas, melainkan anak-anak yang memerlukan waktu lebih lama untuk memproses informasi dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Beberapa karakteristik yang umumnya terlihat pada peserta didik *slow learner* meliputi:

a. Kesulitan Memahami Konsep Baru: Mereka mungkin membutuhkan pengulangan atau penjelasan tambahan untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan.
b. Lambat dalam Pemrosesan Informasi: Peserta didik ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyerap dan memproses informasi yang mereka terima, sehingga sering tertinggal dalam pelajaran atau tugas di kelas.
c. Kesulitan Mengikuti Ritme Kelas Reguler: Dalam lingkungan kelas yang bergerak cepat, mereka seringkali merasa terbebani dan kewalahan, terutama jika materi pelajaran terus meningkat dalam kompleksitas.
d. Mudah Lelah dalam Aktivitas Kognitif: Peserta didik *slow learner* biasanya merasa lelah lebih cepat dalam kegiatan pembelajaran yang membutuhkan pemikiran intensif, sehingga konsentrasi mereka lebih mudah terganggu.
e. Memiliki Rentang Perhatian yang Pendek: Mereka sering mengalami kesulitan untuk tetap fokus dalam jangka waktu yang panjang, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan perhatian terus-menerus.
f. Prestasi Akademik yang Berfluktuasi atau Di Bawah Rata-Rata: Dibandingkan dengan peserta didik lain, mereka mungkin menunjukkan nilai yang lebih rendah atau pencapaian yang tidak konsisten karena kebutuhan waktu yang lebih lama untuk memahami materi.

7. Peserta Didik berkesulitan belajar spesifik (*specific learning disability)*

Seseorang disebut mengalami kesulitan belajar apabila setelah diukur dengan menggunakan tes kecerdasan menghasilkan skor IQ rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi memperlihatkan hasil belajar (pada bidang tertentu) berada jauh di bawah perkembangan usia dan kemampuan mentalnya. Dalam pelayanan pendidikan di sekolah reguler, sering kali guru dihadapkan pada siswa yang mengalami problem belajar atau kesulitan belajar. Salah satu kelompok kecil siswa yang termasuk dalam klasifikasi

tersebut adalah kelompok anak yang berkesulitan belajar spesifik atau disebut *specific learning disability*.

Anak berkesulitan belajar spesifik adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologis dasar, disfungsi sistem syaraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan nyata dalam: pemahaman, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Kesulitan tersebut bukan bersumber pada sebab-sebab keterbelakangan mental, gangguan emosi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau karena kemiskinan, lingkungan, budaya, ekonomi, ataupun kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh guru.

Secara garis besar kelompok siswa berkesulitan belajar dapat dibagi dua. Pertama, yang berkaitan dengan perkembangan *(developmental learning disabilities)*, mencakup gangguan motorik dan persepsi, bahasa dan komunikasi, memori, dan perilaku sosial. Kedua, yang berkaitan dengan akademik (membaca, menulis, dan berhitung) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, tetapi kedua kelompok ini tidak dapat dipisahkan secara tegas karena ada keterkaitan di antara keduanya (Kirk dan Gallagher, 1986). Mereka dapat mengikuti kurikulum standar, tetapi harus dengan penyesuaian (kurikulum adaptasi).

8. Peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa

Seseorang disebut cerdas istimewa dan/ atau bakat istimewa apabila setelah diukur dengan menggunakan tes kecerdasan baku menghasilkan skor IQ di atas normal, mereka juga memiliki kreativitas dan task commitment di atas rata-rata. Seorang disebut memiliki bakat istimewa apabila bakat tersebut sangat menonjol dalam bidang akademik tertentu, olahraga, seni dan/atau kepemimpinan melebihi tingkat perkembangan usia teman sebaya. Menurut Renzulli (1978, 2005) *Gifted and talented children* adalah peserta didik yang mempunyai kelebihan dalam tiga komponen yakni mempunyai kapasitas intelektual di atas rata-rata yang ditandai dengan IQ (skala Weschler) di atas 130, memiliki motivasi dan komitmen terhadap tugas yang tinggi, serta memiliki kreativitas yang tinggi. Gagne menitikberatkan konsepsi keberbakatan istimewa sebagai hasil interaksi antara faktor keturunan *(genetic)* dan faktor tumbuh kembang *(developmental)* yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Dalam kegiatan belajar, peserta didik berbakat dapat dengan cepat menguasai materi pelajaran di sekolah. Namun, di sisi lain, mereka cenderung cepat bosan dan frustrasi karena kurangnya tantangan yang diterima di sekolah. Peserta didik berbakat juga mempunyai minat tertentu yang menjadi fokus perhatiannya, tapi fokus dan perhatiannya terhadap minat ini membuat peserta didik berbakat

penasaran dan terkadang menjadi tidak peduli dengan berbagai aktivitas lainnya dalam proses belajar- mengajar di kelas.

Cara peserta didik berbakat berinteraksi juga berbeda dengan peserta didik lainnya. Mereka cenderung lebih senang diskusi dengan orang dewasa, senang memberikan kritik terhadap pertanyaan daripada menjawab pertanyaan yang diajukan rekannya. Selain itu, peserta didik berbakat juga cenderung lebih rapuh emosionalnya, merasa teralienasi karena dirinya berbeda dengan peserta didik lain di lingkungan sosialnya. Peserta didik berbakat juga mempunyai selera humor yang tinggi, bahkan terkadang dengan mengolok- olok dirinya sendiri. Berbagai perbedaan yang dimiliki peserta didik berbakat ini membutuhkan perlakuan khusus dari guru di sekolah dan lingkungan kondusif yang memahami perbedaan yang dimilikinya.

Model layanan bagi peserta didik berbakat ini bisa menggunakan diferensiasi kurikulum, yaitu: a. Pengayaan *(enrichment),* berupa tawaran ekstra materi pelajaran yang dimaksudkan untuk pendalaman dan perluasan; b. Pemadatan atau *(compacting),* berupa pemadatan materi pelajaran reguler. Atau dengan kata lain bahwa pelajaran yang diberikan tidak perlu dilakukan pengulangan-pengulangan yang memang diperlukan sebagai latihan bagi peserta didik normal; dan c. Paruh waktu (part-time) dalam kelompok-plus atau kelas-plus (pull-out). Kelas itu diadakan ekstra aktivitas atau program yang menantang khusus untuk peserta didik gifted. Kegiatan dalam kelompok/kelas plus ini dilakukan beberapa jam dalam satu minggu. Bila peserta didik gifted tersebut membutuhkan kegiatan yang menantang guna memenuhi kebutuhan keberbakatannya, ia dapat sementara waktu keluar dari kelasnya (pull-out), masuk ke dalam kelompok-plus atau kelas-plus tersebut, bersama-sama dengan peserta didik gifted lainnya dalam berbagai usia mengerjakan berbagai proyek yang diminatinya. Kelas-kelas seperti ini sering juga disebut Kangaroo- class; dan d) Percepatan (acceleration), yaitu berupa lompat kelas (Class skipping). Namun percepatan ini membutuhkan beberapa pertimbangan berupa: kematangan sosial emosional, kapasitas intelektual, prestasi, adanya lompatan perkembangan didaktik, persetujuan orang tua, dan penerimaan guru.

9. Peserta Didik Autistic Spectrum Disorders (ASD)

Autistic Spectrum Disorders (ASD) dari kata auto, yang berarti sendiri. ASD sering diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya sendiri. Autisme merupakan sebuah hambatan

perkembangan yang dialami seseorang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan di mana penyandangnya memiliki kekhasan utama, yaitu hambatan interaksi, komunikasi, dan perilaku. Berbeda dari bentuk kebutuhan khusus lain yang sering diklasifikasikan berdasar berat dan ringan, autisme diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang dipayungi dengan istilah spectrum. Masing-masing spectrum memiliki karakter yang unik. Kata kunci pada bentuk-bentuk autis adalah spectrum (Friend, 2003; Yapko, 2004), di mana mengimplikasikan kesamaan karakter, tetapi berbeda variasi pada keterampilan yang ditunjukkan. Spectrum dari autism tersebut adalah autistic disorder atau autism, childhood disintegrative children, Asperger syndrome, Rett's syndrome, Pervasive developmental disorder-not otherwise specified (PDD-NOS).

Seseorang dikatakan autis jika memiliki serangkaian gejala perilaku yang berbeda pada hambatan dalam tiga ranah perkembangan berikut (Shulman, 2002).

a. Hambatan dalam interaksi sosial secara resiprokal/ berbalasan.
b. Hambatan dalam komunikasi baik verbal maupun nonverbal, termasuk di dalamnya permasalahan dalam aktivitas imajinasi.
c. Hambatan dalam perilaku, termasuk di dalamnya keterbatasan dalam serangkaian aktivitas dan minat.

Implikasi dari hambatan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku tersebut mengakibatkan berperilaku tidak sesuai dengan situasi sosial yang sedang berlangsung, tidak adanya kontak mata, permasalahan pada pemusatan perhatian, tidak hadirnya gesture untuk menjembatani komunikasi, dan kesulitan menginterpretasi-kan gesture orang lain. Sementara itu, dampak dari hambatan komunikasi adalah mereka gagal memahami makna dan tujuan komunikasi sehingga kesulitan mengembangkan makna bicara untuk menginisiasi dan mempertahankan topik percakapan dan bergabung dengan perasaan dan ide orang lain dalam sebuah percakapan. Hambatan perilaku sering ditunjukkan dengan gerakan stereotype dan berulang di mana aktivitas tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, sebab ekspresi yang mereka tunjukkan tidak lazim.

Keterbatasan yang dialami anak autis menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk mengikuti kurikulum standar. Mereka membutuhkan kurikulum khusus yang disusun berdasarkan hasil asesmen.

10. Peserta didik attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Istilah hiperaktif yang banyak dikenal masyarakat sering muncul dengan istilah ADHD (attention deficit hiperactivity disorder). Istilah tersebut menunjuk kepada anak yang mengalami

gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut: a. kesulitan melakukan konsentrasi atau mencurahkan perhatian dalam waktu yang relatif lama; b. adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam; dan c. perilaku impulsif, yaitu kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya. Gangguan perhatian, misalnya ditandai dengan perilaku melamun, mudah lupa, sembrono, tak acuh, gagal dalam penyelesaian tugas, menghindari tugas berat. Hiperaktivitas dapat ditandai dengan adanya perilaku gelisah, berdiri dari duduk, sulit diam, susah mengendalikan diri, bicara berlebihan, berlari, memanjat tidak pada tempat dan waktunya. Impulsivitas, di antaranya dapat dilihat dari perilaku sebagi berikut: menjawab sebelum pertanyaan selesai, kesulitan dalam hal menunggu giliran, atau suka mengganggu orang lain.

BAB III

PROFIL PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA

A. Aspek Geografi dan Demografi Kota Tasikmalaya

1. Lokasi dan Batas Administratif

Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, pada koordinat 108°08'38" – 108°24'02" BT dan 7°10'00" – 7°26'32" LS. Letak ini membuat Tasikmalaya memiliki akses strategis menuju kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta, yang berjarak masing-masing sekitar 105 km dan 255 km. Hal ini mendukung Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan wilayah dan area transit bagi perdagangan dan jasa.

Tasikmalaya memiliki batas wilayah administratif yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis

Sebelah Timur, Selatan, dan Barat: Kabupaten Tasikmalaya

Secara administratif, Kota Tasikmalaya terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan, yang tersebar dalam 864 Rukun Warga (RW) dan 3.643 Rukun Tetangga (RT). Pemekaran wilayah ini berperan penting dalam mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik, termasuk dalam bidang pendidikan.

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Tasikmalaya

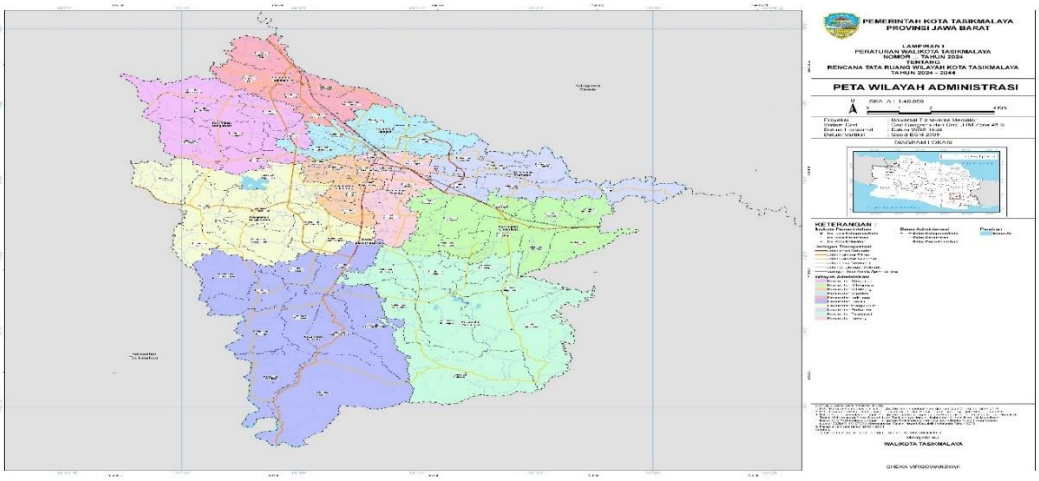

(Sumber: Rancangan Perda RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044)

2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Keberadaan penduduk sangat penting didalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Perubahan jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu, diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian dan imigrasi penduduk.

Gambar 3.2

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2001-2023

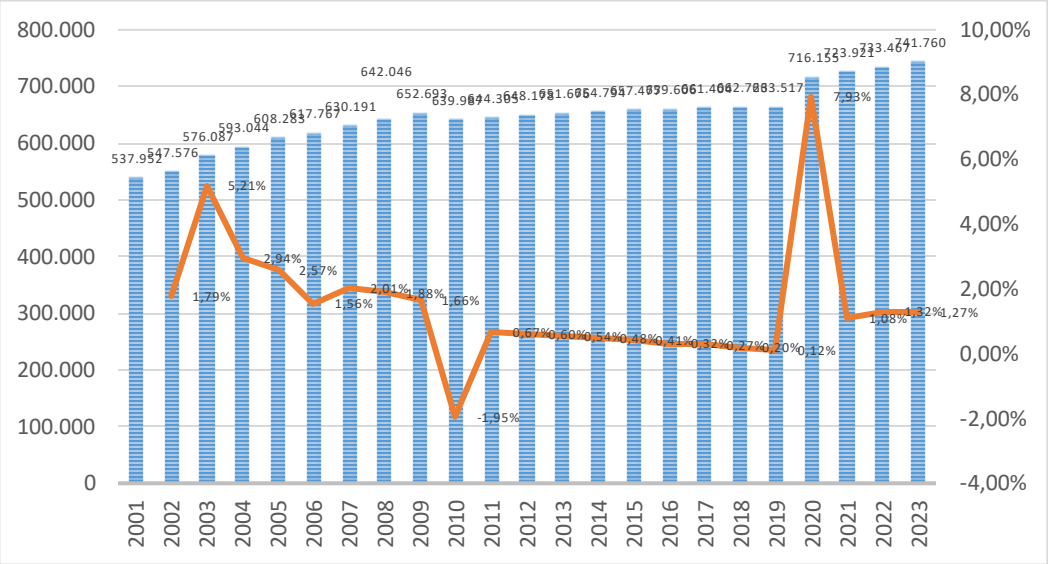

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2023

Kota Tasikmalaya sejak awal berdiri tahun 2001 hingga tahun 2023, Kota Tasikmalaya cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk, hanya terjadi penurunan di tahun 2009 ke 2010. Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan sebagai Kota Besar sejak awal berdiri, yaitu jumlah penduduk 537.952 jiwa di tahun 2001.

Berbeda dengan tahun 2023, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 memiliki perbandingan yang cukup besar yakni mencapai 1,15 persen. Dari total penduduk semula 663.517 jiwa pada 2019 meningkat menjadi 741.760 jiwa pada tahun 2023. Kenaikan tersebut didasarkan dengan adanya sensus penduduk pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan dari tahun 2001 sampai dengan 2022, terutama pada tahun 2020 yang sangat tinggi diangka 7,93 persen, kenaikan ini dilakukan sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS dan adanya cara perhitungan yang dilakukan oleh BPS.

Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Tasikmalaya

Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)					Persentase Penduduk (%)					Kepadatan Penduduk (per km^2)				
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2021	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kawalu	96.942	96.78	97.59	98.64	99.51	13,47	13,51	13,48	13,45	13,42	2.267	2.286	2.305	2.372	2.393
Tamansari	75.970	77.07	78.25	79.62	80.87	10,55	10,76	10,81	10,86	10,90	2.111	2.083	2.115	2.166	2.200
Cibeureum	68.604	68.6	69.06	69.69	70.19	9,53	9,58	9,54	9,50	9,46	3.603	3.730	3.755	3.745	3.771
Purbaratu	45.048	44.38	44.85	45.42	45.92	6,26	6,2	6,2	6,19	6,19	3.754	3.514	3.551	3.735	3.776
Tawang	64.114	60,16	60,81	61,61	62,31	8,91	8,4	8,4	8,40	8,40	9.068	8.706	8.801	8.929	9.030
Chideung	73.372	71.95	72.73	73.69	74.52	10,19	10,05	10,05	10,05	10,05	13.565	13.202	13.345	13.521	13.672
Mangkubumi	96.834	97.91	98.81	99.96	100.92	13,45	13,67	13,65	13,63	13,61	3.948	4.079	4.119	4.135	4.176
Indihiang	57.826	57.57	58.39	59.36	60.24	8,03	8,04	8,07	8,09	8,12	5.238	5.301	5.377	5.451	5.532
Bungursari	59.064	60.19	61.55	63.09	64.54	8,20	8,41	8,5	8,60	8,70	3.495	3.416	3.493	3.591	3.673
Cipedes	82.108	81,56	81,88	82,39	82,75	11,41	11,39	11,31	11,23	11,16	9.164	9.022	9.057	9.114	9.154
Kota Tasikmalaya	719,88	716,16	723,92	733,47	741,76	100	100	100	100	100	3.917	3.887	3.930	4.006	4.060

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2020-2024.

Apabila dilihat dari jumlahnya, penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2023 sekitar 741,76 ribu orang atau ekuivalen dengan 1,48 persen dari jumlah total penduduk Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3. 3
Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023

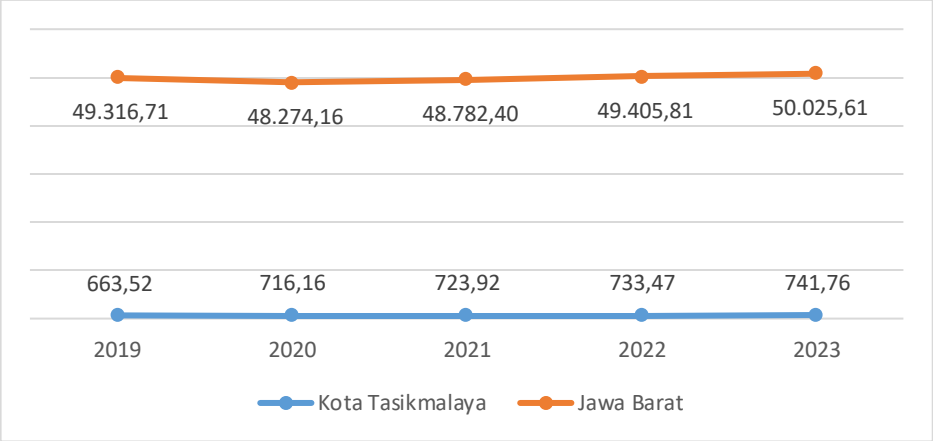

Sumber: Data BPS Kota Tasikmalaya, data diolah (2024).

Perubahan jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu, diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian dan imigrasi penduduk.

Berbeda dengan tahun 2023, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 memiliki perbandingan yang cukup besar yakni mencapai 1,15 persen. Dari total penduduk semula 663.517 jiwa pada 2019 meningkat menjadi 741.760 jiwa pada tahun 2023. Kenaikan tersebut didasarkan dengan adanya sensus penduduk pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan dari tahun 2001 sampai dengan 2022, terutama pada tahun 2020 yang sangat tinggi diangka 7,93 persen, kenaikan ini dilakukan sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS dan adanya cara perhitungan yang dilakukan oleh BPS.

Gambar 3. 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

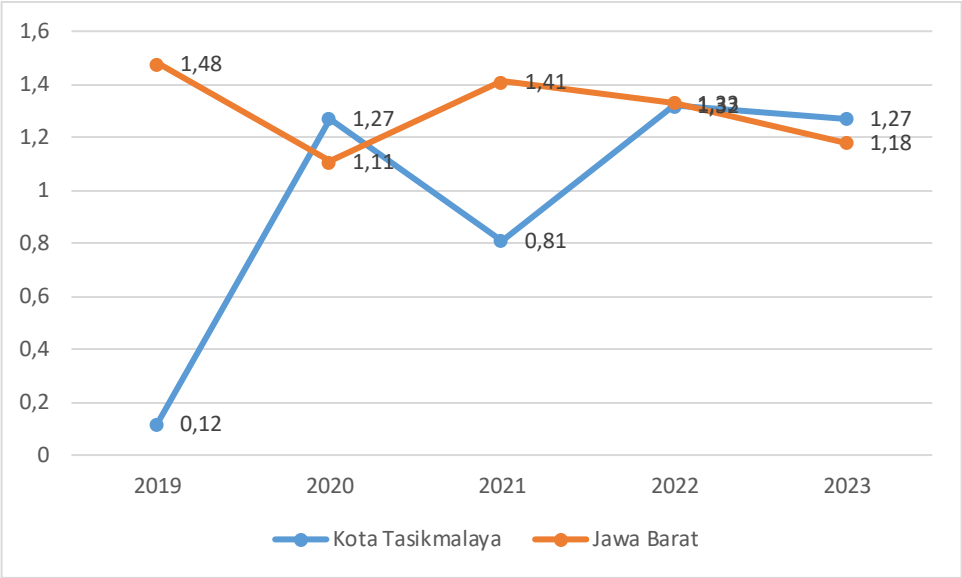

Sumber: Data BPS Kota Tasikmalaya, data diolah (2024).

Mencermati dinamika penduduk Kota Tasikmalaya yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi, yaitu:

a. Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan rasio gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal.

b. Keberlanjutan sosial budaya, melaluk peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan.

c. Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang efektivitas pembangunan.

d. Investasi SDM untuk menjawab daya saing Kota Tasikmalaya agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif di berbagai aspek di level internasional, memaksimalkan era industry 4.0 menuju *society* 5.0 yang

ditandai dengan masyarakat telah mencapai *comfort, vitality and high-quality life.*

a. Komposisi Penduduk

Berdasarkan komposisi penduduk Kota Tasikmalaya berada pada periode jendela kesempatan atau *window opportunity* untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan Diana jumlah usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

Tabel 3. 2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023

Kelompok Umur	Jumlah			
	2020	2021	2022	2023
0–4	60.765	60.999	61.360	63.195
5–9	56.084	55.781	55.862	56.700
10–14	61.465	60.807	60.171	58.056
15–19	61.616	61.394	61.372	62.085
20–24	60.110	60.010	59.953	60.939
25–29	58.544	58.741	59.090	59.650
30–34	56.926	57.163	57.470	58.299
35–39	54.014	54.392	54.959	55.826
40–44	50.901	51.369	51.840	52.582
45–49	46.258	47.206	48.247	48.811
50–54	40.663	41.710	42.839	43.320
55–59	35.569	36.802	38.084	37.879
60–64	27.384	28.624	29.988	31.204
65–69	21.110	22.270	23.430	23.263
70–74	12.906	13.992	15.183	16.195
75+	11.840	12.661	13.619	13.756
Kota Tasikmalaya	716.155	723.921	733.467	741.760

Sumber: BPS, Kota Tasikmalaya Dalam Angka tahun 2020-2023.

Gambar 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023

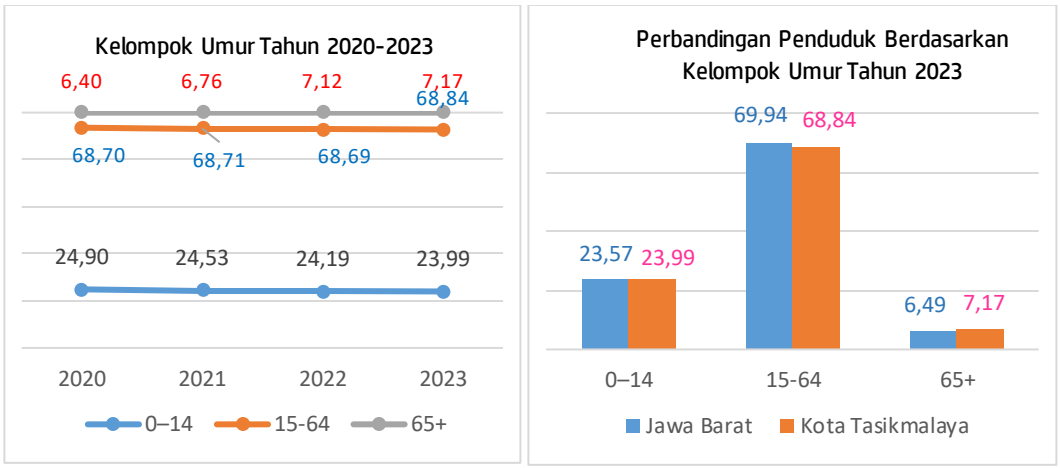

Sumber: Data BPS Kota Tasikmalaya, data diolah (2024).

Tren penduduk usia produktif Kota Tasikmalaya cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai 68,84 persen di tahun 2023 lebih sedikit dibawah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 69,94 persen. Penduduk usia produktif yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian yang sama-sama rendah.

Gambar 3. 6
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2023

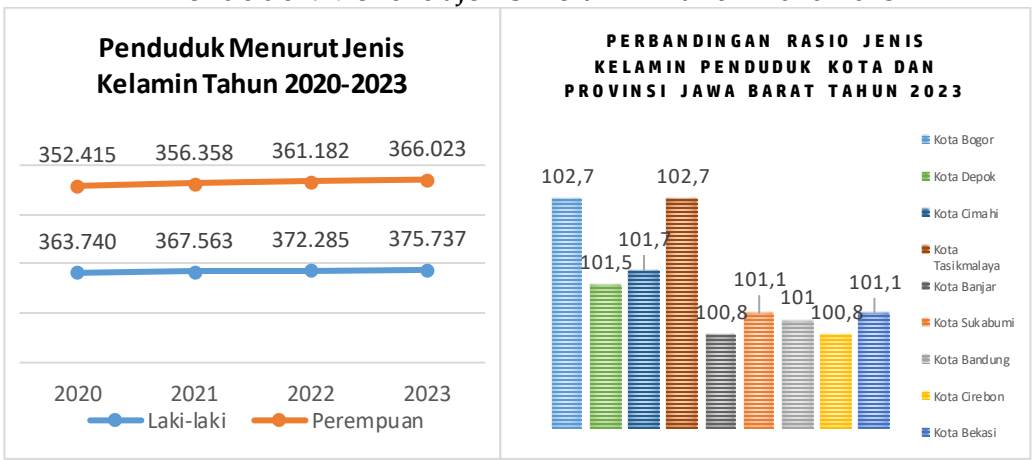

Sumber: Data BPS Kota Tasikmalaya, data diolah (2024).

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kota Tasikmalaya cenderung lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, rasio penduduk Kota Tasikmalaya sebesar 102,65 persen yang artinya terdapat 102 laki-laki per 100 perempuan.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin mempengaruhi tingkat kesetaraan gender (*gender equality*), yaitu kesamaan hak dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menangani jumlah penduduk yang besar dengan rasio penduduk yang relatif setara adalah bagaimana memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Sehingga tidak ada diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

Kecamatan Cihideung merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 13.672 jiwa/km^2 dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 2.200 jiwa/km^2 Sedangkan kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya adalah 4.050 jiwa/km^2.

Gambar 3. 7
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Tasikmalaya, 2023

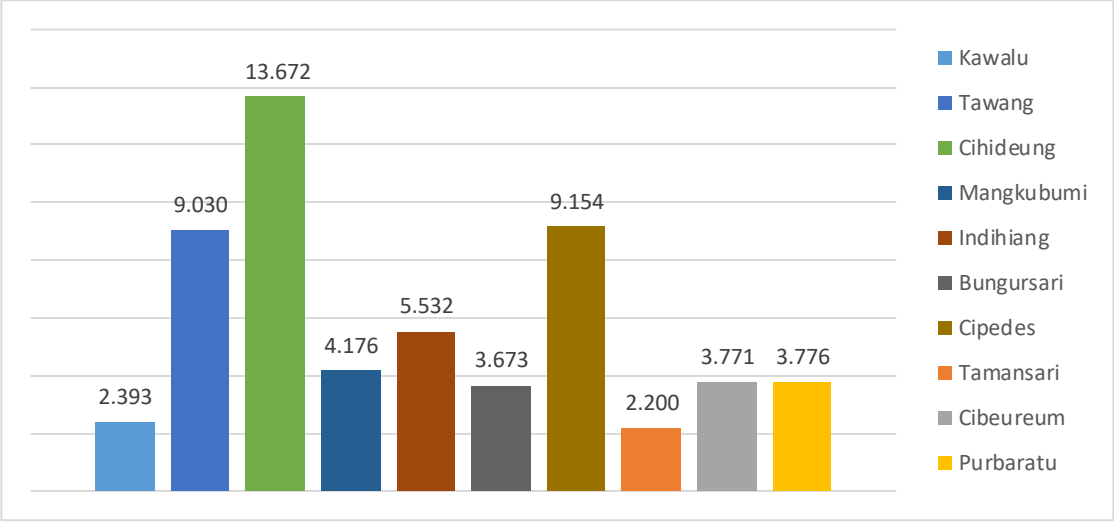

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

B. Aspek Sosial-Ekonomi

1. Kesejahteraan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya menunjukkan tren yang stabil, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 5,96% pada tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri kerajinan yang berkembang pesat. Namun, tingkat ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian dengan koefisien Gini sebesar 0,393. Ketimpangan ini berdampak pada perbedaan akses terhadap fasilitas publik, termasuk pendidikan inklusif yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Gambar 3.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2023

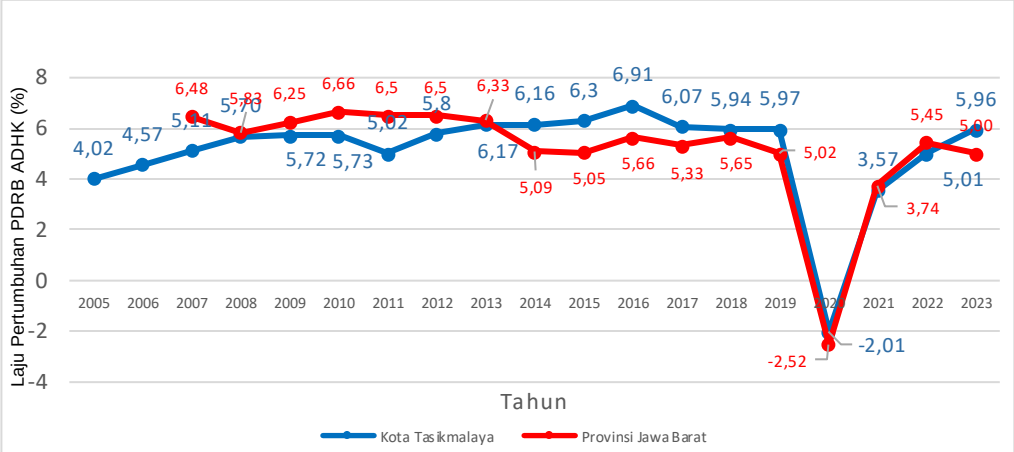

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2023

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 26,08% pada tahun 2008 menjadi 11,53% pada tahun 2023. Meskipun demikian, kelompok miskin ekstrem masih membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan inklusif. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan memperkuat program bantuan pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas fasilitas inklusif agar seluruh anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Gambar 3.9
Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2023

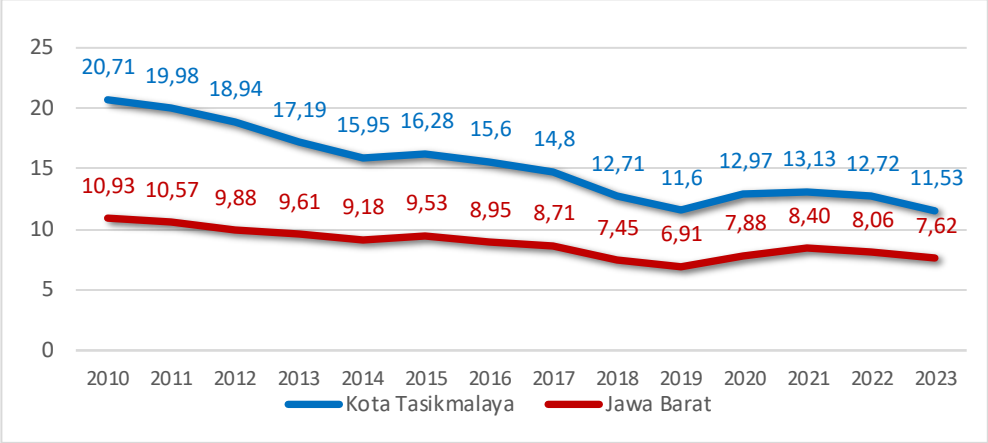

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2010-2023

Indikator makro kemiskian Kota Tasikmlaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3
Indikator Makro Kemiskinan Kota Tasikmalaya
Tahun 2012-2023

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	263.177	293.985	328.399	337.841	351.718	367.673	397.215	397.215	447.008	457.899	470.150	480.341	498.711	537.497
Penduduk Miskin (orang)	131.538	129.759	123.400	112.163	105.440	106.780	102.790	97.850	84.220	76.900	86.130	89.460	87.130	79.370
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	20,71	19,98	18,92	17,19	15,95	16,28	15,60	14,80	12,71	11,60	12,97	13,13	12,72	11,53
Kedalaman Kemiskinan (%) (P1)	4,11	3,21	3,97	2,57	3,12	2,85	2,37	2,01	1,52	1,98	1,75	2,42	2,34	1,62
Keparahan Kemiskinan (%) (P2)	1,17	0,94	1,25	0,63	0,86	0,69	0,57	0,42	0,31	0,53	0,39	0,69	0,65	0,32

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2005-2023.

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan, ini dapat diartikan bahwa program-program yang telah dilaksanakan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah memiliki dampak terhadap hal tersebut. Namun pada tahun 2020 dan 2021 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan karena adanya pandemi covid 19. Akibat dari pandemi ini jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan bertambah cukup signifikan. Tingkat kemiskinan kembali turun pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,72 persen serta tahun 2023 tercatat sebesar 11,53 persen, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi masyarakat Kota Tasikmalaya kembali pulih setelah pandemi Covid 19.

Garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun artinya pengeluaran masyarakat Kota Tasikmalaya untuk memenuhi

kebutuhan makanan dan non makanan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menujukkan bahwa garis kemiskinan tidak terlepas dari inflasi yang terjadi di Kota Tasikmalaya, dan pemenuhan barang-barang makanan dan non makanan pun mengalami kenaikan.

Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari yang tercatat pada tahun 2018 sebesar 1,52 persen menjadi 1,98 persen artinya pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan. Pada tahun 2020 P1 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 2,42 persen. Hal ini menunjukkan semakin besar potensi ekonomi atau dana yang dibutuhkan untuk menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2022 P1 kembali turun menjadi 2,34 persen. Hal ini menggambarkan pengeluaran penduduk miskin semakim mendekati Garis Kemiskinan, dan pada tahun 2023 kedalaman kemiskinan berada pada angka 1,62 persen, hal ini menunjukkan bahawa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan.

Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tasikmalaya pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun seperti kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan pun mengalami penurunan pada tahun 2020, dari yang tercatat sebesar 0,53 persen pada tahun 2019 menjadi 0,39 persen pada tahun 2020. Namun demikian terjadi kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,69. Hal ini mengindikasikan semakin besaranya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Pada tahun 2022 terjadi penurunan P2 sebesar 0,04 persen menjadi 0,65 persen, hal ini menggambarkan keparahan kondisi diantara penduduk miskin kembali merapat atau tidak terlalu senggang, dan pada tahun 2023 P2 berada pada angka 0,32 persen, hal ini menunjukkan bahwa keparahan kondisi diantara penduduk miskin semakin merapat atau gap diantara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada tahun 2022 Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres ini pemerintah menginstruksikan keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar kementerin/ lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah Garis Kemiskinan. Berikut perkembangan kemiskinan ekstrem di Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2021-2023.

Gambar 3. 10
Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem

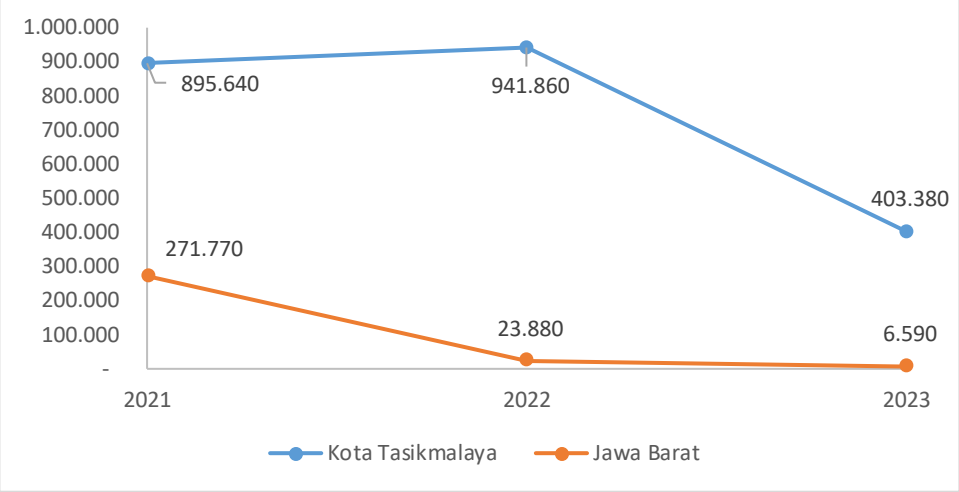

Ket:
Tahun 2021 dan 2022: Estimasi dihitung oleh BPS.
Tahun 2023: Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE.

Gambar 3. 11
Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem

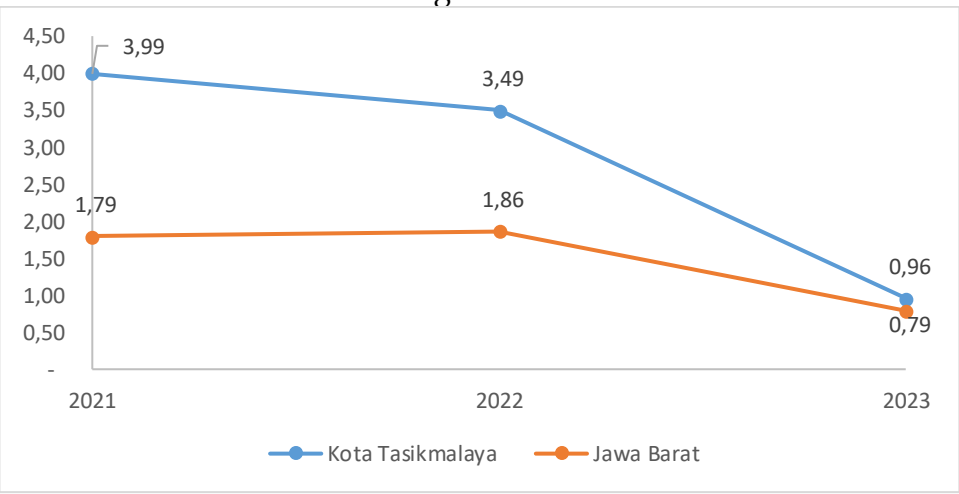

Ket: Tahun 2021 dan 2022: Estimasi dihitung oleh BPS.
Tahun 2023: Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE.

3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang berstatus sebagai penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka mencakup penduduk yang tidak memiliki dan tidak mencari pekerjaan, penduduk yang tidak memiliki tetapi sedang mencari pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki tetapi belum memulai pekerjaan. TPT Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2007-2022 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 3. 12
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2023

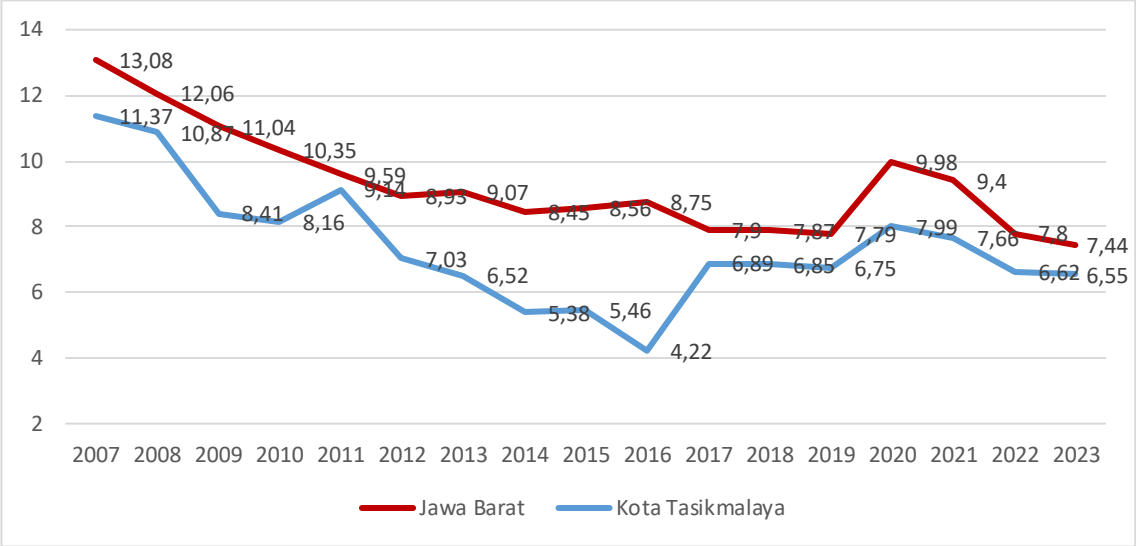

Sumber: BPS, 2008-2024.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dan cenderung mengalami penurunan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa jarak antara besaran TPT di tingkat kota dengan tingkat provinsi mengalami penurunan, khususnya sejak tahun 2017 dan setelahnya. Selain itu, TPT juga menunjukkan tren penurunan baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi dalam kurun waktu tersebut.

C. Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia (*human development*) telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam *Global Human Development Report*. Konsep ini disebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people's choices*) dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang

memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada empat hal pokok, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Digambarkan kondisi IPM di Kota Tasikmalaya beserta komponennya, yaitu Umur Harapan Hidup (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun), Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), serta Pengeluaran per Kapita. Jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, angka IPM Kota Tasikmalaya cenderung lebih tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, IPM Tasikmalaya meningkat sejak tahun 2005-2009, kemudian terjadi penurunan angka pada tahun 2009-2010. Namun, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 angka IPM Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan.

Sejak tahun 2005, IPM Kota Tasikmalaya berada dalam rentang kategori sedang dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2006-2009, angka IPM Kota Tasikmalaya meningkat dan masuk pada kateori tinggi. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2009-2010, namun pada tahun 2010-2015, IPM Kota Tasikmalaya kembali meningkat dan berada dalam kategori sedang. Kemudian, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, IPM Kota Tasikmalaya masuk ke dalam kategori tinggi, dan jika dibandingkan dengan konteks regional, IPM Kota Tasikmalaya secara konsisten berada pada posisi lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya cenderung lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat. IPM Kota Tasikmalaya dapat dilihat selengkapnya pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. 4

Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya

Tahun 2005-2023

Tahun	IPM Kota	Umur Harapan Hidup/UHH (tahun)	Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp)
2005	72,08	-*	-*	-*	-*
2006	72,26	-*	-*	-*	-*
2007	72,74	-*	-*	-*	-*
2008	73,35	-*	-*	-*	-*
2009	73,96	-*	-*	-*	-*
2010	66,58	70,73	11,85	8,23	7828,00
2011	67,18	70,81	12,24	8,28	7910,00
2012	67,84	70,87	12,66	8,34	8013,00
2013	68,63	70,93	13,11	8,44	8158,00
2014	69,04	70,96	13,36	8,51	8210,00
2015	69,99	71,26	13,37	8,56	8785,00
2016	70,58	71,37	13,40	8,63	9145,00
2017	71,51	71,48	13,41	9,03	9497,00
2018	72,03	71,70	13,42	9,04	9855,00
2019	72,84	71,93	13,44	9,13	10414,00
2020	74,04	74,34	13,45	9,33	10263,00
2021	74,31	74,52	13,46	9,52	10213,00
2022	74,84	74,80	13,47	9,53	10578,00
2023	75,47	75,08	13,49	9,54	11063,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023 (diolah).

Gambar 3. 13
Perbandingan IPM Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat

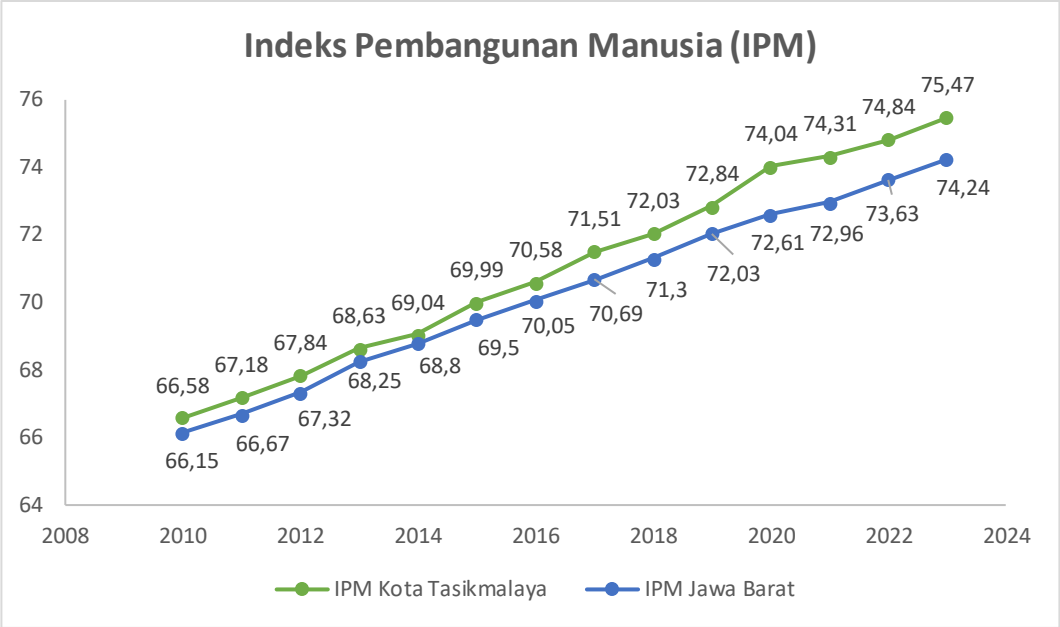

Sumber: SP Long Form BPS Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya tahun 2023 mencapai 75,47, meningkat 0,63 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (74,84). Selama 2020–2023, IPM Kota Tasikmalaya rata-rata meningkat sebesar 0,64 persen per tahun. Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Kota Tasikmalaya tahun 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami percepatan pertumbuhan, terutama dimensi standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,15 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,07 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,58 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,57 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 0,38 persen menjadi 0,37 persen. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat dari 0,11 persen menjadi 0,10 persen.

Apabila ditinjau dari capaian komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota-kota di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya berada pada urutan terendah. Untuk Pengeluaran Ril Per Kapita Kota Tasikmalaya berada di angka 11.063 ribu rupiah/orang/tahun. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah berada di 9,54 tahun dan Usia Harapan Hidup mencapai 75,08 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5
Perbandingan Komponen IPM Kota Tasikmalaya dengan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Kota	Pengeluaran Ril Per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	Rata Lama Sekolah (Tahun)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
1	Bogor	12.656	10,64	75,52
2	Sukabumi	11.799	10,37	74,89
3	Bandung	18.230	11,06	75,53
4	Cirebon	12.506	10,37	75,17
5	Bekasi	16.479	11,66	75,86
6	Depok	16.729	11,58	75,53
7	Cimahi	12.883	11,39	75,27
8	Tasikmalaya	11.063	9,54	75,08
9	Banjar	11.356	8,79	74,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024 (diolah).

1. Kualitas Pendidikan

a. Angka partisipasi kasar (APK)

Indikator yang menggambarkan kualitas pendidikan adalah angka partispasi kasar (APK) yang menggambarkan partisipasi peserta didik untuk masing-masing tingkatan pendidikan sesuai dengan usianya. Capaian APK Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3. 14
Angka Partisipasi Kasar Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023

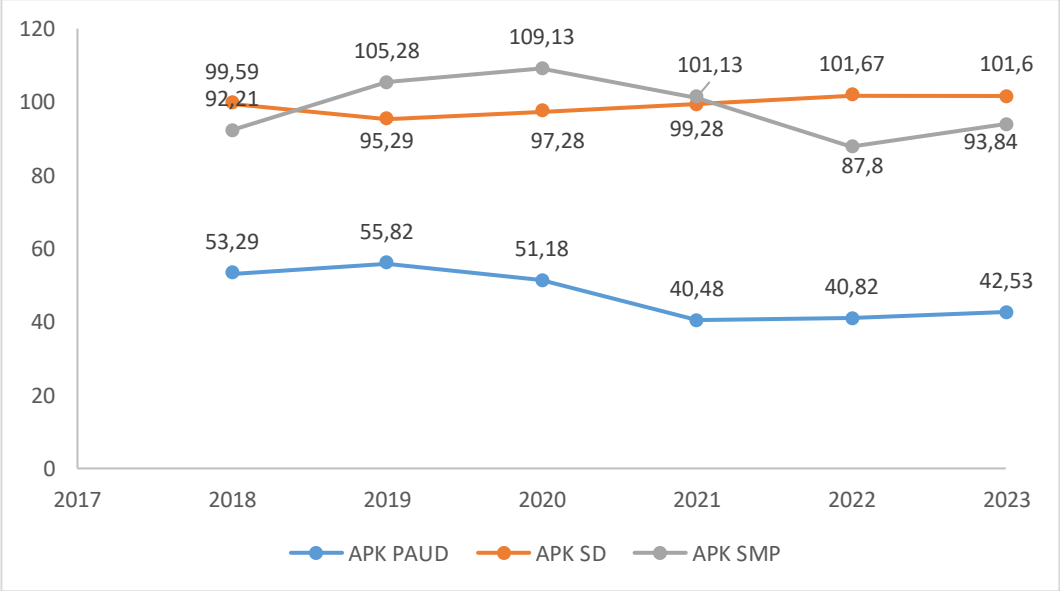

Sumber: Dinas Pendidkan Kota Tasikmalaya, 2024.

APK pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada APK PAUD menjadi sebesar 51,18 persen dari tahun 2019 sebesar 55,82 persen, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,46 persen. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19, sehingga terdapat anak usia PAUD yang tidak bersekolah. Namun demikian, sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya keadaan sosial ekonomi.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Gambar 3. 15
Angka Partisipasi Murni Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2023

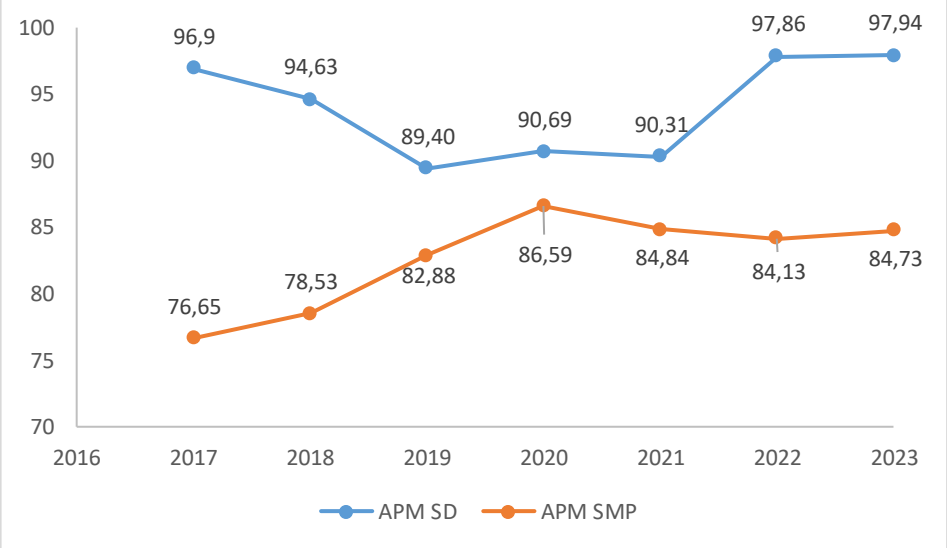

Sumber: Dinas Pendidkan Kota Tasikmalaya, 2024.

APM SD/MI Sederajat pada tahun 2023 menunjukkan angka 97,94 persen sedangkant tahun sebelumnya 97,86 persen atau naik sebesar 0,08 persen, yang berarti bahwa terdapat 97,94 persen penduduk usia SD/MI sederajat yang mengenyam pendidikan SD/MI Sederajat, sendangkan APM SMP sebesar 84,73 persen pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 84,73 persen penduduk usia SMP Sederajat yang mengenyam pendidikan SMP Sederajat.

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Tabel 3. 6
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD
di Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2023

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	2.975	64.278	2.299	1 : 21,60	1 : 28,00
2018	2.991	64.276	2.367	1 : 21,50	1 : 27,10
2019	2.982	63.827	2.390	1 : 21,36	1 : 26,60
2020	3.234	63.475	2.398	1 : 19,60	1 : 26,50
2021	3.188	62.421	2.025	1 : 19,58	1 : 30,82
2022	3.330	62.469	2.443	1 : 18,76	1 : 25,57
2023	3.454	75.360	2.422	1 : 21,82	1 : 31,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

Pada tabel diatas menunjukan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2020 di Kota Tasikmalaya mengalami perbaikan yang signifikan yang ditunjukan dengan jumlah guru yang bertambah sehingga rasio murid dengan guru selama periode tersebut mengalami penurunan sampai pada posisi mendekati standar 1 : 28 ditunjukkan dengan rasio 1 : 21,82. Dengan demikian rasio guru dan murid Sekolah Dasar di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2023 sebesar 1 : 31,11 sudah di atas standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel. Rasio guru dengan murid berada pada posisi 1: 23,80. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 15 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2023 sebesar 1: 37,22 hal ini masih di atas standar yaitu 1: 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 3. 7
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP
di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2017	1.628	28.755	964	1 : 17,7	1 : 29,8
2018	1.685	28.116	974	1 : 16,7	1 : 28,9
2019	1.665	28.155	976	1 : 16,8	1 : 28,7
2020	1.764	28.571	1.970	1 : 17,2	1 : 23,8
2021	1.777	28.739	1.057	1 : 16,17	1: 27,19
2022	1.843	28.357	980	1 : 15,39	1 : 28,94
2023	1.890	44.994	1.209	1 : 23,80	1 : 37,22

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024.

c. Rata- rata Lama Sekolah

Capaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2010 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 8,23 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,54 tahun pada tahun 2023 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 15 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,53 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 16
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah

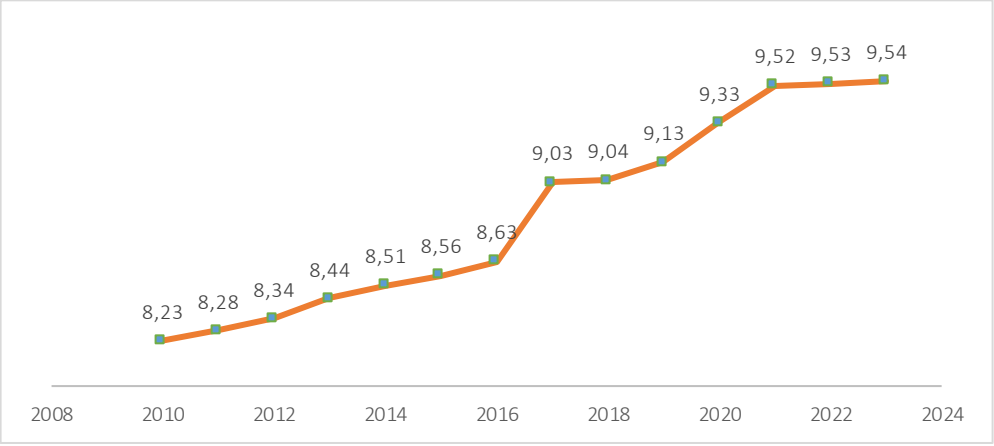

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

d. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2010-2023 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2010 adalah 11,85 dan meningkat hingga pada tahun 2023 angka HLS ada pada angka 13,49 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma 1 atau Diploma 2. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 17
Capaian Harapan Lama Sekolah

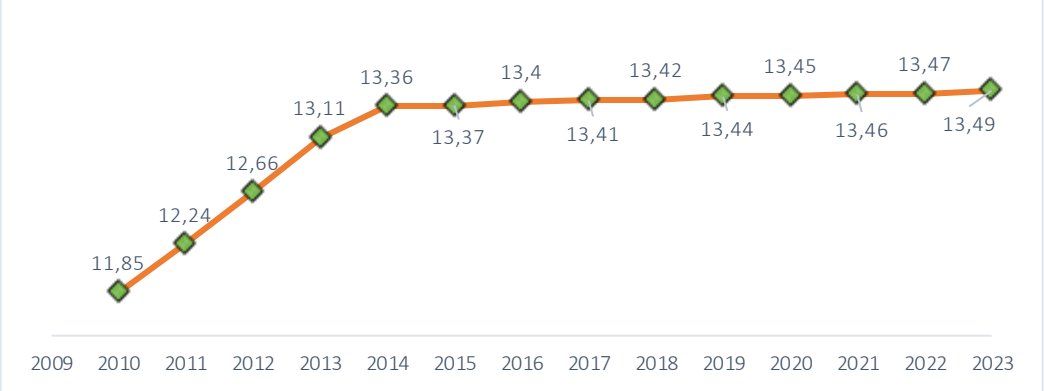

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

e. Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu bentuk kepercayaan kodrati di mana terdapat penghayatan dalam kehidupan sehari-hari dengan menginternalisasikan ke dalamnya. Religiusitas dibagi menjadi lima dimensi, yakni dimensi keyakinan, peribadatan dan praktek, penghayatan, pengetahuan agama, serta dimensi efek atau pengalaman. Salah satu pengamalan peribadatan dan praktek pada bidang pendidikan adalah persentase siswa yang dapat membaca Al Qur'an pada jenjang pendidikan dasar yang disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.18
Persentase Siswa yang Bisa Membaca Al Qur'an Tahun 2023

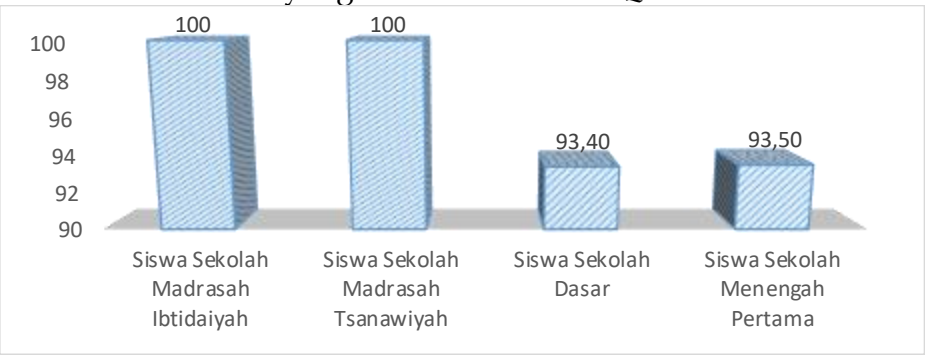

Sumber: Kementerian Agama Kota Tasikmalaya & Dinas Pendidikan (Data Diolah), 2024.

Berdasarkan data di atas literasi Al-Qur'an pada jenjang pendidikan dasar untuk MI dan MTs mencapai 100 persen, sedangkan untuk siswa SD dan SMP sebesar 93,40 persen dan 93,50 persen. Hal ini menunjukan bahwa di Kota Tasikmalaya khususnya untuk tingkat SD dan SMP masih perlu peningkatan dalam literasi Al-Qur'an.

f. Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Tabel 3.8 ini merangkum proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2025 sampai 2045, dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 733.467. Data menunjukkan kebutuhan unit untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK), dengan proyeksi meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 891.049 pada tahun 2045.

Tabel 3. 8
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	733.467	759.370	800.172	836.533	866.628	891.049
Proyeksi Kebutuhan TK	236	607	640	669	693	713
Proyeksi Kebutuhan SD/MI	284	475	500	523	542	557
Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs	141	158	167	174	181	186
Proyeksi Kebutuhan SMA/MA/SMK	115	158	167	174	181	186

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Di bawah ini merupakan metode lain yang digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan sarana pendidikan dengan melihat jumlah penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah dipecah dari proyeksi penduduk BPS dengan menggunakan pengali Sprague.

Tabel 3. 9
Proyeksi Kebutuhan TK Berdasarkan Penduduk Usia TK

TK		
Tahun	**Jumlah Penduduk Usia TK (jiwa)**	**Kebutuhan Jumlah TK (unit)**
2025	12.431	104
2030	12.334	103
2035	11.992	100
2040	11.696	97
2045	11.342	95

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 3.10
Proyeksi Kebutuhan SD Berdasarkan Penduduk Usia SD

SD/MI/Sederajat				
Tahun	Jumlah Penduduk Usia SD	Kebutuhan Jumlah Tipe A	Kebutuhan Jumlah Tipe B	Kebutuhan Jumlah Tipe C
2025	69.607	145	193	290
2030	74.604	155	207	311
2035	73.831	154	205	308
2040	71.897	150	200	300
2045	69.844	146	194	291

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Tabel 3. 11
Proyeksi Kebutuhan SMP Berdasarkan Penduduk Usia SMP

SMP/MTs/Sederajat				
Tahun	Jumlah Penduduk Usia SMP	Kebutuhan Jumlah SMP	Kebutuhan Jumlah Tipe B	Kebutuhan Jumlah Tipe C
2025	34.549	32	48	96
2030	35.541	33	49	99
2035	37.542	35	52	104
2040	37.034	34	51	103
2045	36.072	33	50	100

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Tabel 3. 12

Proyeksi Kebutuhan SMA Berdasarkan Penduduk Usia SMA

SMA/MA/SMK/Sederajat				
Tahun	**Jumlah Penduduk Usia SMA/MA/SMK**	**Kebutuhan Jumlah SMA/MA/SMK**	**Kebutuhan Jumlah Tipe B**	**Kebutuhan Jumlah Tipe C**
2025	35.399	33	49	98
2030	31.616	29	44	88
2035	35.586	33	49	99
2040	35.790	33	50	99
2045	34.851	32	48	97

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Persebaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berkesulitan Belajar (ABB) berdasarkan kecamatan

1. Kecamatan Kawalu

a. Deskripsi Umum

Jumlah penduduk di Kecamatan Kawalu pada tahun 2023 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya mencapai 103.185 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,88 persen. Rasio jenis kelamin pada tahun 2023 sebesar 106 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Artinya, dari 100 penduduk perempuan di Kecamatan Kawalu terdapat 106 penduduk laki-laki.

Uraian	2023
(1)	(2)
Luas Wilayah (Km^2)	41,59
Jumlah Penduduk (Jiwa)	103 185
- Laki-laki	53 045
- Perempuan	50 140
Sex Ratio (%)	106
Kepadatan Penduduk per Km^2 (Jiwa)	2 481
Laju Pertumbuhan (%)	1,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

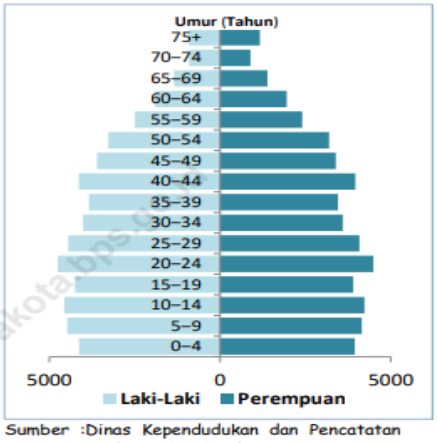

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kawalu dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Perempuan

Bentuk piramida penduduk Kecamatan Kawalu Tahun 2023 termasuk piramida ekspansif, yaitu komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia muda. Tingginya jumlah penduduk usia muda menunjukkan potensi sumber daya manusia (SDM) Kota Tasikmalaya sangat besar. Telah terjadi pergeseran dimana komposisi penduduk usia muda (produktif) semakin meningkat. Komposisi penduduk usia 15–64 tahun mencapai 68,90 persen. Penduduk usia 0-14 tahun sebesar 24,69 persen, dan penduduk usia 65 tahun keatas sebesar 6,41 persen.

b. Fasilitas Penddikan

Jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Kawalu pada Tahun Ajaran 2023/2024 terdiri dari 11 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 13 Sekolah Raudatul Anfal (RA), 33 Sekolah Dasar (SD), 9 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 8 Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS), 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 7 Sekolah Aliyah (MA).

Sebanyak 10 kelurahan di Kecamatan Kawalu memiliki fasilitas sekolah SD, 6 kelurahan memiliki fasilitas sekolah MI, 8 kelurahan memiliki fasilitas sekolah SMP dan MTs, 3 kelurahan memiliki fasilitas sekolah SMA, 4 kelurahan memiliki fasilitas sekolah SMK dan 5 kelurahan memiliki fasilitas sekolah MA. Jumlah perguruan tinggi terdapat di 2 kelurahan.

Gambar 4.2. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kawalu, Tahun Ajaran 2023/2024

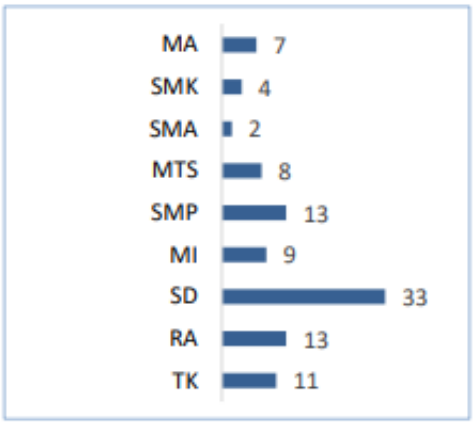

Sumber: - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Agama

Gambar 4.3. Banyaknya Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah di Kecamatan Kawalu, 2023

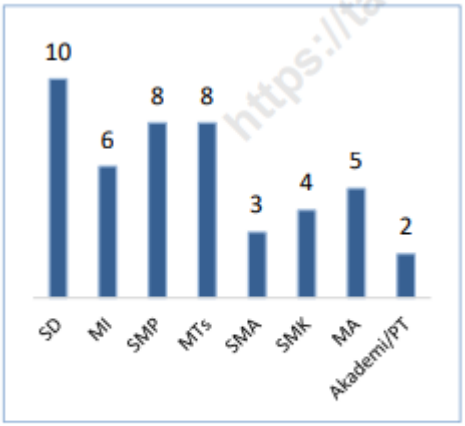

Sumber: - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Agama

c. Data Persebaran Jenis Hambatan Belajar

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Kawalu, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.4. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Kawalu

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 23 SD dari 33 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan ke sekolah dasar di Kecamatan Kawalu, diketahui terdapat 124 peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus. Dari jumlah tersebut, 89 siswa merupakan kategori slow learner, 13 siswa memiliki hambatan emosi dan perilaku, 8 siswa mengalami hambatan fisik motorik atau tunadaksa, 5 siswa memiliki kesulitan belajar spesifik, 3 siswa dengan hambatan intelektual atau tuna grahita, 2 siswa tuna ganda, 2 siswa dengan ADHD, 1 siswa tuna netra, dan 1 siswa dengan kecerdasan istimewa. Data ini menggambarkan kebutuhan mendesak untuk penanganan pendidikan inklusif yang lebih terstruktur di Kecamatan Kawalu sekaligus menjadi dasar untuk perumusan kebijakan pendidikan tingkat Kota Tasikmalaya.

Di tingkat kota, pendidikan inklusif harus menjadi prioritas strategis. Pemerintah Kota Tasikmalaya disarankan untuk menetapkan kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan inklusif dalam rencana pembangunan pendidikan. Peraturan wali kota dapat menjadi landasan hukum untuk memastikan implementasi pendidikan inklusif berjalan efektif, didukung dengan alokasi dana khusus. Selain itu, pembentukan pusat layanan pendidikan inklusif di tingkat kota dapat membantu menyediakan tenaga ahli, fasilitas pelatihan, dan asesmen yang diperlukan oleh sekolah dan siswa. Pusat ini juga berperan sebagai

tempat pelatihan guru serta pendampingan bagi orang tua dalam mendukung kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.

Di Kecamatan Kawalu, pendekatan yang lebih spesifik diperlukan untuk menangani keberagaman kebutuhan siswa. Intervensi individual akan menjadi fokus utama, seperti program remedial bagi siswa slow learner, konseling untuk siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, serta penyediaan alat bantu belajar bagi siswa dengan hambatan fisik atau tuna netra. Sementara itu, siswa dengan kecerdasan istimewa dapat didukung melalui program pengayaan yang dirancang untuk mengembangkan potensi akademik dan kreativitas mereka.

Untuk mendukung hal ini, kapasitas guru di Kawalu perlu ditingkatkan melalui pelatihan intensif tentang strategi pembelajaran inklusif, pengelolaan kelas heterogen, dan penggunaan teknologi pendidikan. Guru pendamping khusus (GPK) juga perlu dihadirkan di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tinggi. Selain itu, fasilitas pendidikan di kecamatan ini harus diperbaiki, termasuk membangun infrastruktur yang ramah difabel seperti ramp, toilet khusus, dan perangkat pembelajaran adaptif.

Komunitas juga memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif di Kawalu. Edukasi kepada masyarakat dan orang tua siswa mengenai pentingnya penerimaan dan dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus dapat meningkatkan kesadaran kolektif. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pelaksanaan program inklusi.

Monitoring dan evaluasi akan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Evaluasi berkala terhadap perkembangan siswa, efektivitas program, dan kepuasan orang tua dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kecamatan Kawalu dapat menjadi model pelaksanaan pendidikan inklusif yang berhasil, sekaligus memberikan inspirasi bagi kecamatan lain di Kota Tasikmalaya.

2. Kecamatan Tamansari

a. Deskripsi Umum

Jumlah penduduk Kecamatan Tamansari pada tahun 2023 sebanyak 83.061 jiwa yang terdiri dari 51,07 persen atau 42.416 jiwa penduduk laki-laki dan 48,93 persen atau 40.645 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2023 sebesar 104,36 menunjukkan bahwa

pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Artinya, dari 100 penduduk perempuan di Kecamatan Tamansari terdapat 104 penduduk laki-laki.

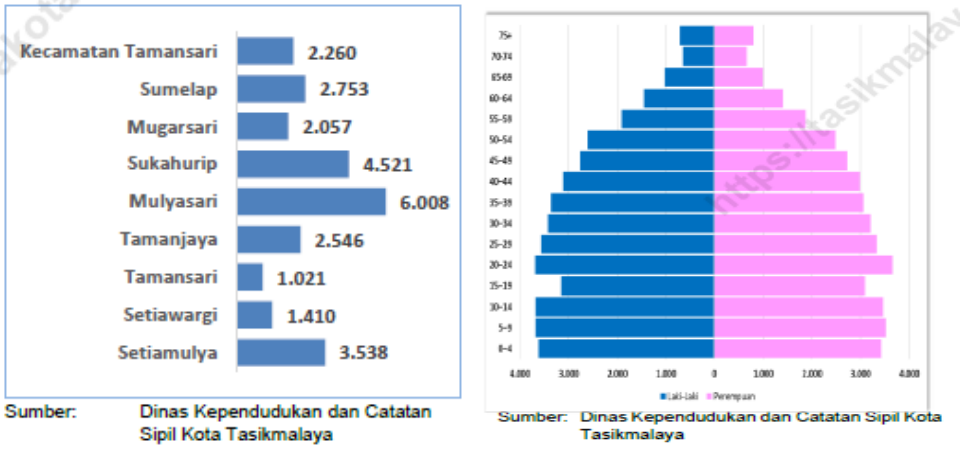

Gambar 4.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Tamansari dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Permpuan

Bentuk piramida penduduk Kecamatan Tamansari tahun 2023 termasuk piramida ekspansif, yaitu komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda. Tingginya jumlah penduduk usia muda menunjukkan di Kecamatan Tamansari telah terjadi pergeseran di mana komposisi penduduk usia muda (produktif) semakin meningkat dibandingkan dengan penduduk usia tua kelompok umur 20-24 tahun mendominasi struktur penduduk Kecamatan Tamansari dengan jumlah 4.036 jiwa. Kelompok umur 70-74 tahun paling kecil jumlahnya yaitu sebanyak 1.080 jiwa.

b. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan tonggak dari pembangunan manusia dan juga menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan perlu adanya dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan suatu wilayah, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi sangat penting. Menurut data sekolah yang tercatat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, pada tahun ajaran 2023/2024 Kecamatan Tamansari memiliki fasilitas sekolah sejumlah 3 TK, 12 RA, 22 SD, 8 MI, 10 SMP, 15 MTs, 1 SMA, 7 SMK, dan 7 MA.

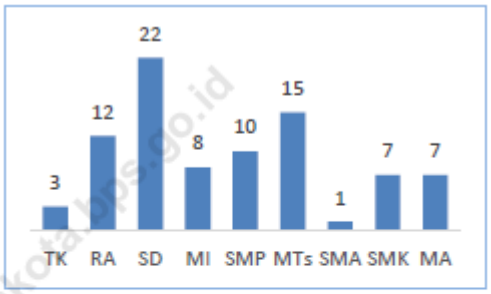

Sumber: -Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
-Kementerian Agama

Gambar 4.6. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tamansari, 2023/2024

Tabel 4.1 Jumlah Dan Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tamansari, 2023/2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
Taman Kanak-Kanak (TK)[1]	18	115	6,39
Raudatul Athfal (RA)[2]	66	610	9,24
Sekolah Dasar (SD)[1]	299	6330	21,17
Madrasah Ibtidaiyah (MI)[2]	107	1718	16,06
Sekolah Menengah Pertama (SMP)[1]	137	1467	10,71
Madrasah Tsanawiyah (MTs)[2]	186	1646	8,85
Sekolah Menengah Atas (SMA)[1]	67	1216	18,15
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)[1]	153	2596	16,97
Madrasah Aliyah (MA)[2]	91	514	5,65

Sumber: [1] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
[2] Kementerian Agama

Ketersediaan fasilitas pendidikan perlu diiringi dengan ketersediaan SDM pengajar yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain infrastruktur fisik perlu juga ditingkatkan kualitas SDM tenaga pendidik yaitu guru. Rasio murid terhadap guru adalah jumlah murid yang ditangani oleh satu orang guru. Rasio tertinggi pada tahun ajaran 2023/2024 yaitu jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 21,17 yang artinya satu orang guru menangani murid sebanyak 21 orang.

c. Data Persebaran Jenis Hambatan Belajar

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Tamansari, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:

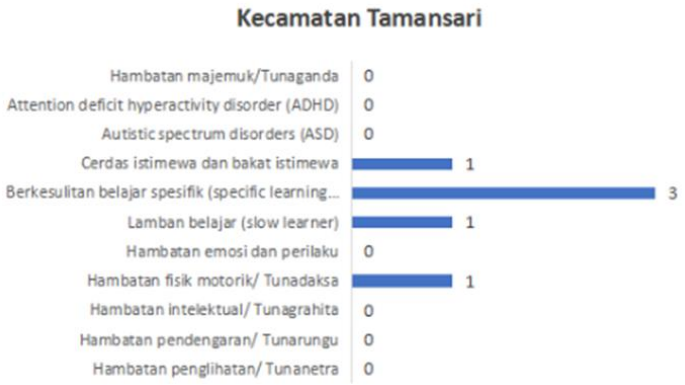

Gambar 4.7. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Tamansari

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 1 SD dari 22 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan ke sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Tamansari, hanya sedikit sekolah yang berpartisipasi sehingga data yang terkumpul belum mencerminkan keseluruhan kondisi pendidikan inklusif di wilayah tersebut. Dari data yang tersedia, teridentifikasi tiga siswa dengan hambatan belajar spesifik, satu siswa cerdas istimewa, satu siswa slow learner, dan satu siswa tunadaksa. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem pendidikan inklusif di Kecamatan Tamansari, termasuk pengembangan strategi pendataan, pelatihan guru, serta fasilitas yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus.

Pada tingkat Kota Tasikmalaya, kebijakan pendidikan inklusif perlu dikuatkan untuk memastikan semua sekolah memiliki kapasitas dalam mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus. Langkah pertama adalah menetapkan regulasi melalui peraturan wali kota yang mewajibkan sekolah dasar untuk melaksanakan pendidikan inklusif dengan standar layanan minimal, termasuk asesmen awal kebutuhan siswa, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendukung. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya juga perlu mengembangkan sistem pendataan berbasis digital untuk memastikan semua sekolah melaporkan data siswa berkebutuhan khusus secara akurat dan tepat waktu.

Di sisi lain, penting untuk membangun pusat layanan pendidikan inklusif di tingkat kota yang berfungsi sebagai tempat pelatihan guru, konsultasi bagi orang tua, serta penyediaan tenaga ahli seperti psikolog, terapis, dan guru pendamping khusus (GPK). Pusat ini juga dapat menjadi tempat koordinasi program-program pendidikan inklusif lintas kecamatan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Untuk Kecamatan Tamansari, intervensi harus dimulai dengan meningkatkan partisipasi sekolah dalam proses pendataan. Edukasi kepada kepala sekolah dan guru tentang pentingnya pendidikan inklusif serta pelatihan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa perlu dilaksanakan secara intensif. Pendataan ulang dapat dilakukan dengan bimbingan langsung dari tim khusus yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.

Selain itu, intervensi bagi siswa yang teridentifikasi harus berbasis pada kebutuhan mereka. Bagi siswa dengan hambatan belajar spesifik, diperlukan metode pengajaran individual yang memanfaatkan alat bantu belajar seperti materi visual atau teknologi pendidikan. Siswa cerdas istimewa perlu didukung melalui program pengayaan yang dirancang untuk mengoptimalkan potensinya. Sementara itu, siswa slow learner dapat dilibatkan dalam program remedial dengan pendekatan personal, dan siswa tunadaksa memerlukan dukungan berupa alat bantu mobilitas serta aksesibilitas fisik di sekolah.

Peningkatan kapasitas guru di Tamansari menjadi prioritas lain. Guru-guru perlu dibekali dengan pelatihan tentang strategi pengajaran inklusif, pengelolaan kelas heterogen, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Pengadaan guru pendamping khusus di sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program.

Langkah lain yang krusial adalah peningkatan fasilitas fisik dan pembelajaran di sekolah. Setiap sekolah harus dilengkapi dengan infrastruktur ramah difabel seperti ramp, toilet khusus, dan ruang belajar inklusif. Selain itu, penyediaan alat bantu belajar untuk siswa dengan kebutuhan spesifik, seperti buku braille atau perangkat pembelajaran interaktif, perlu diutamakan.

3. Kecamatan Cibeureum

a. Deskripsi Umum

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II tahun 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk Kecamatan Cibeureum pada tahun 2023 sebanyak 73.021 jiwa yang terdiri dari 50,63 persen atau 36.973 jiwa penduduk laki-laki dan 49,37 persen atau 36.048 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2023 sebesar 103, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Artinya, dari 100 penduduk perempuan di Kecamatan Cibeureum terdapat 103 penduduk laki-laki.

Uraian	2023
(1)	(2)
Jumlah Penduduk (jiwa)	73.021
Laki-Laki	36.973
Perempuan	36.048
Sex Ratio	103

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, DKB Semester II Tahun 2023

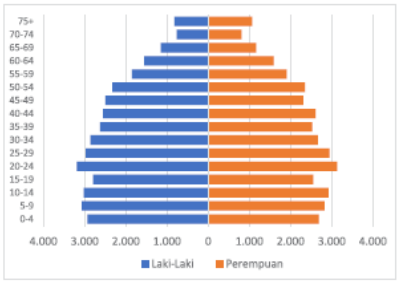

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, DKB Semester II Tahun 2023

Gambar 4.8 Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Permpuan

Bentuk piramida penduduk Kecamatan Cibeureum tahun 2023 termasuk piramida ekspansif, yaitu komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda. Tingginya jumlah penduduk usia muda menunjukkan di Kecamatan Cibeureum telah terjadi pergeseran dimana komposisi penduduk usia muda (produktif) semakin meningkat dibandingkan dengan penduduk usia tua. Kelompok umur 20-24 tahun mendominasi struktur penduduk Kecamatan Cibeureum dengan jumlah 6.315 jiwa. Kelompok umur 70-74 tahun paling kecil jumlahnya yaitu sebanyak 1.577 jiwa.

b. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan tonggak dari pembangunan manusia dan juga menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan perlu adanya dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan suatu wilayah, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi sangat penting. Menurut data sekolah yang tercatat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, pada tahun ajaran 2023/2024 Kecamatan Cibeureum memiliki fasilitas sekolah sejumlah 9 TK, 19 RA, 18 SD, 9 MI, 12 SMP, 5 MTs, 2 SMA, 4 SMK, dan 5 MA.

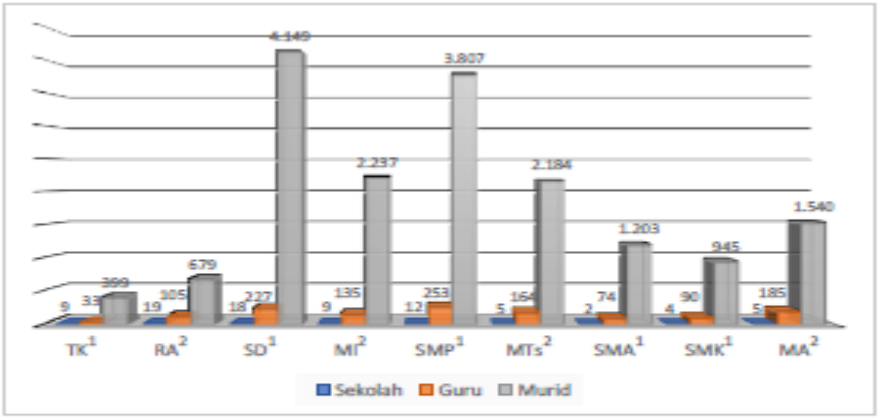

Sumber: 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Kementerian Agama

Gambar 4.9. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kecamatan Cibeureum

c. Data Persebaran Jenis Hambatan Belajar

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Cibeureum, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:

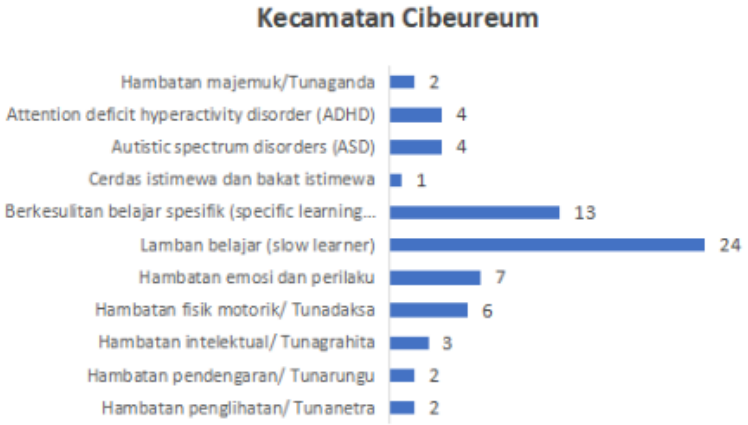

Gambar 4.10. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Cibeureum

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 10 SD dari 18 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Hasil kuisioner yang dilakukan di Kecamatan Cibeureum mengungkapkan adanya 68 peserta didik yang teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus dan kesulitan belajar. Dari data tersebut, 24 siswa masuk dalam kategori lamban belajar (slow learner), 13 siswa berkesulitan belajar spesifik, 7 siswa memiliki hambatan emosi dan perilaku, 6 siswa tunadaksa, 4 siswa autisme (ASD), 4 siswa ADHD, 3 siswa tuna grahita, 2 siswa tuna ganda, 2 siswa tuna rungu, 2 siswa tuna netra, serta 1 siswa cerdas istimewa. Data ini memberikan gambaran nyata tentang keberagaman kebutuhan peserta didik di kecamatan ini dan urgensi untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif di wilayah tersebut.

Pada tingkat Kota Tasikmalaya, kebijakan pendidikan inklusif perlu diperkuat melalui peraturan wali kota yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif di semua sekolah dasar. Kebijakan ini harus mencakup standar layanan minimal seperti asesmen kebutuhan siswa secara rutin, pelatihan guru secara berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas pendukung di setiap sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan perlu membentuk pusat layanan pendidikan inklusif di tingkat kota. Pusat ini akan menyediakan layanan asesmen mendalam, pelatihan bagi guru dan orang tua, serta tenaga ahli seperti psikolog, terapis, dan guru pendamping khusus (GPK) untuk mendukung kebutuhan siswa secara profesional.

Untuk mendukung implementasi di Kecamatan Cibeureum, langkah awal adalah memberikan intervensi spesifik sesuai kebutuhan siswa yang telah teridentifikasi. Program remedial diperlukan untuk siswa slow learner, sementara siswa dengan kesulitan belajar spesifik membutuhkan alat bantu seperti materi visual dan teknologi pembelajaran. Siswa dengan hambatan emosi dan perilaku harus mendapatkan konseling reguler dan program pengelolaan emosi di kelas. Bagi siswa tunadaksa, diperlukan alat bantu mobilitas dan aksesibilitas di sekolah, sedangkan siswa autisme dan ADHD memerlukan pendekatan berbasis terapi perilaku dan pengelolaan kelas yang fleksibel.

Selain itu, siswa dengan kebutuhan lebih kompleks seperti tuna ganda, tuna netra, dan tuna rungu membutuhkan perangkat khusus seperti alat bantu dengar, braille, dan dukungan individual.

Sementara itu, siswa cerdas istimewa harus diberi akses ke program pengayaan akademik dan kreatif untuk mengoptimalkan potensinya. Semua ini membutuhkan dukungan guru yang kompeten, sehingga pelatihan intensif untuk guru di Kecamatan Cibeureum menjadi prioritas utama.

Fasilitas sekolah di Kecamatan Cibeureum juga harus ditingkatkan untuk memastikan semua siswa dapat belajar dalam lingkungan yang inklusif. Infrastruktur seperti ramp, toilet khusus, ruang belajar inklusif, serta alat bantu belajar modern harus tersedia di setiap sekolah. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan melibatkan orang tua, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif secara menyeluruh.

Monitoring dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Tim khusus di tingkat kecamatan dapat dibentuk untuk memantau implementasi kebijakan dan memberikan masukan berdasarkan kebutuhan lapangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kecamatan Cibeureum dapat menjadi model pendidikan inklusif yang efektif, responsif, dan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya, memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk meraih potensi terbaik mereka.

4. Kecamatan Purbaratu

a. Deskripsi Umum

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II tahun 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk Kecamatan Purbaratu pada tahun 2023 sebanyak 46.891 jiwa yang terdiri dari 51,04 persen atau 23.933 jiwa penduduk laki-laki dan 48,96 persen atau 22.958 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2023 sebesar 104,15 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Artinya, dari 100 penduduk perempuan di Purbaratu terdapat 104 penduduk laki-laki

Uraian	2023
(1)	(2)
Jumlah Penduduk (jiwa)	**46.891**
-Laki-laki	23.933
-Perempuan	22.958
Sex Ratio	**104,15**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya

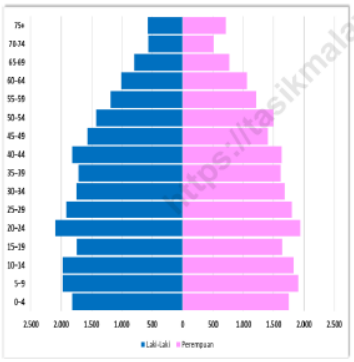

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya

Gambar 4.11 Jumlah Penduduk Kecamatan Purbaratu dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Perempuan

Bentuk piramida penduduk Kecamatan Purbaratu tahun 2023 termasuk piramida ekspansif, yaitu komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda. Tingginya jumlah penduduk usia muda menunjukkan di Kecamatan Purbaratu telah terjadi pergeseran di mana komposisi penduduk usia muda (produktif) semakin meningkat dibandingkan dengan penduduk usia tua. Kelompok umur 20-24 tahun mendominasi struktur penduduk Kecamatan Purbaratu dengan jumlah 4.036 jiwa. Kelompok umur 70-74 tahun paling kecil jumlahnya yaitu sebanyak 1.080 jiwa.

b. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan tonggak dari pembangunan manusia dan juga menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan perlu adanya dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan suatu wilayah, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi sangat penting. Menurut data sekolah yang tercatat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, pada tahun ajaran 2023/2024 Kecamatan Purbaratu memiliki fasilitas sekolah sejumlah 4 TK, 9 RA, 13 SD, 4 MI, 3 SMP, 4 MTs, 1 SMA, 1 SMK, dan 2 MA

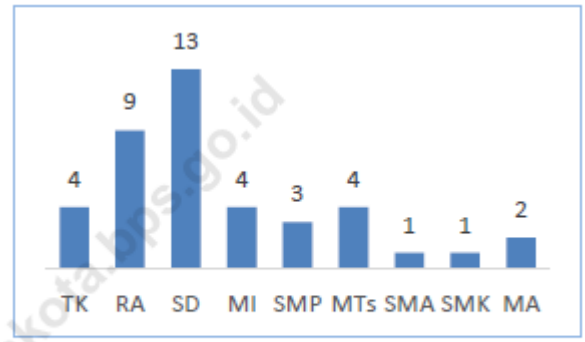

Sumber: -Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
-Kementerian Agama

Gambar 4.12. Jumlah Sekolah dan Madrasah di Kecamatan Purbaratu

c. Data Persebaran Jenis Hambatan Belajar

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di kecamatan Purbaratu, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:

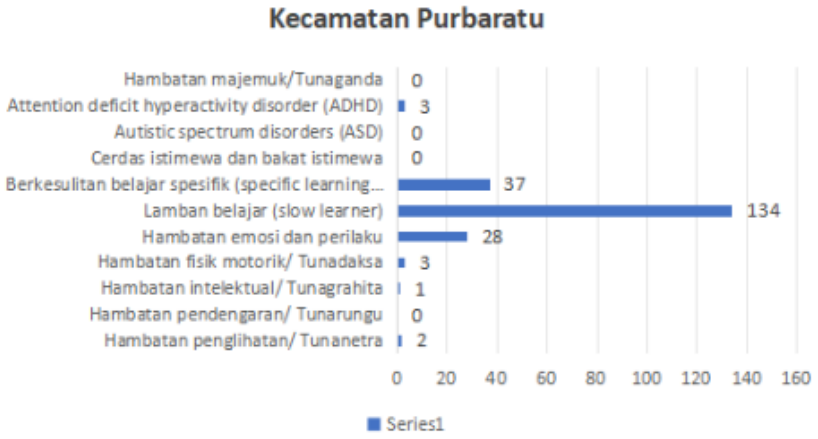

Gambar 4.13. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Purbaratu

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 14 SD dari 14.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun

akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Hasil kuisioner yang komprehensif dari seluruh sekolah dasar di Kecamatan Purbaratu memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan pendidikan inklusif di wilayah ini. Sebanyak 208 peserta didik teridentifikasi berkebutuhan khusus, dengan rincian 134 siswa lamban belajar (slow learner), 37 siswa berkesulitan belajar spesifik, 28 siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, 3 siswa tunadaksa, 3 siswa ADHD, 2 siswa tunanetra, dan 1 siswa tunagrahita. Data ini menegaskan perlunya upaya serius untuk menangani keberagaman kebutuhan siswa melalui pendidikan inklusif yang terencana dan berkelanjutan.

Pada tingkat Kota Tasikmalaya, kebijakan pendidikan inklusif perlu diperkuat dengan menetapkan peraturan wali kota yang mengatur implementasi inklusi di seluruh sekolah dasar. Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pendataan rutin, pelatihan guru secara berkala, dan penyediaan fasilitas ramah inklusi di setiap sekolah. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan, Dinas Pendidikan perlu membangun pusat layanan pendidikan inklusif di tingkat kota. Pusat ini berfungsi untuk mendukung asesmen siswa, pelatihan tenaga pendidik, dan penyediaan tenaga ahli seperti psikolog, terapis, dan guru pendamping khusus (GPK).

Di Kecamatan Purbaratu, intervensi berbasis data harus segera dilakukan. Siswa *slow learner* yang jumlahnya dominan membutuhkan program remedial berbasis metode belajar yang fleksibel, sedangkan siswa dengan kesulitan belajar spesifik memerlukan dukungan alat bantu seperti materi visual, teknologi pembelajaran, dan pendekatan individual. Untuk siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, konseling reguler oleh psikolog dan strategi pengelolaan emosi di kelas perlu diterapkan. Siswa tunadaksa, ADHD, tunanetra, dan tunagrahita membutuhkan pendekatan khusus, termasuk alat bantu mobilitas, perangkat pembelajaran adaptif, serta lingkungan belajar yang mendukung.

Peningkatan kapasitas guru di Kecamatan Purbaratu menjadi prioritas utama. Pelatihan intensif tentang strategi pengajaran inklusif, manajemen kelas heterogen, dan penanganan siswa berkebutuhan khusus harus diadakan secara berkala. Guru pendamping khusus juga perlu disediakan di sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tinggi.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Purbaratu perlu ditingkatkan secara signifikan. Setiap sekolah harus memiliki infrastruktur ramah difabel seperti ramp, toilet khusus, dan alat bantu pembelajaran seperti braille dan perangkat audio untuk siswa tunanetra. Selain itu, ruang konseling dan ruang belajar khusus perlu disediakan untuk siswa dengan hambatan emosi atau perilaku.

Kerja sama dengan komunitas juga sangat penting. Orang tua, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dapat dilibatkan dalam memberikan dukungan tambahan untuk siswa berkebutuhan khusus. Kampanye kesadaran di masyarakat dapat meningkatkan penerimaan terhadap keberagaman di sekolah.

Monitoring dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Tim monitoring tingkat kecamatan dapat mengevaluasi efektivitas program, memberikan masukan, dan menyusun strategi perbaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Dengan langkah-langkah ini, Kecamatan Purbaratu diharapkan menjadi model percontohan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk meraih potensi terbaik mereka.

5. Kecamatan Tawang

a. Deskripsi Umum

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II tahun 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk Kecamatan Tawang pada tahun 2023 sebanyak 64.517 jiwa yang terdiri dari 32.293 jiwa penduduk laki-laki dan 32.224 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,002. Angka rasio jenis kelamin ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki hanya sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, bahkan bisa dikatakan sama banyaknya.

Uraian	2023
(1)	(2)
Jumlah Penduduk (jiwa)	**64.517**
-Laki-laki	32.293
-Perempuan	32.224
Sex Ratio	**100**
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	**9.350**
Rasio Ketergantungan	**45,65**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

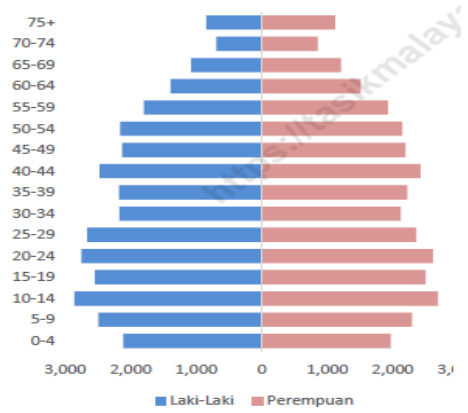

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Gambar 4.14 Jumlah Penduduk Kecamatan Tawang dan Rasio Perbandingan Laki-laki dan Perempuan

Bentuk piramida penduduk Kecamatan Tawang tahun 2023 mulai mengarah pada jenis piramida stasioner, dimana komposisi penduduk yang yang relatif seimbang pada penduduk usia muda dan usia tua. Hal ini terlihat dari bentuk piramida yang menyerupai granat. Pada piramida penduduk stasioner ini, jumlah penduduk umur produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk umur tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif di Kecamatan Tawang sebanyak 44.295 jiwa (68,66 persen), sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif hanya 20.222 jiwa (31,34 persen).

b. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan tonggak dari pembangunan manusia dan juga menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan perlu adanya dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan suatu wilayah, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi sangat penting. Menurut data sekolah yang tercatat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, pada tahun ajaran 2023/2024 Kecamatan Tawang memiliki fasilitas sekolah sejumlah 20 TK, 12 RA, 26 SD, 1 MI, 12 SMP, 1 MTs, 8 SMA, 7 SMK, dan 2 MA.

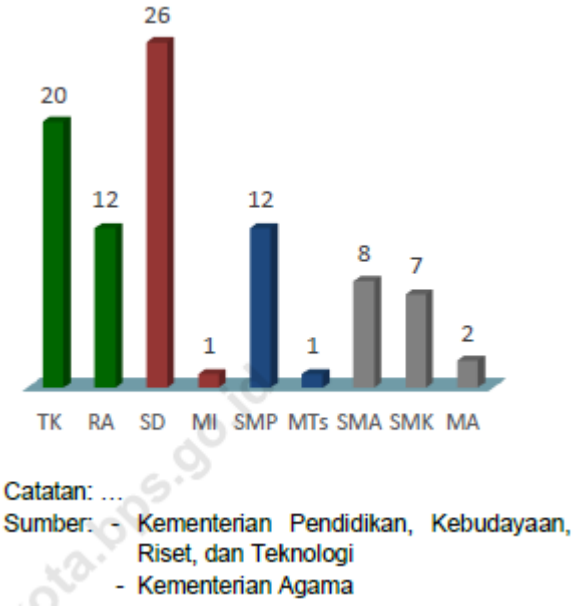

Catatan: ...
Sumber: - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Agama

Gambar 4.15 Jumlah Sekolah dan Madrasah di Kecamatan Tawang

c. Data Persebaran Jenis Hambatan Belajar

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Tawang, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:

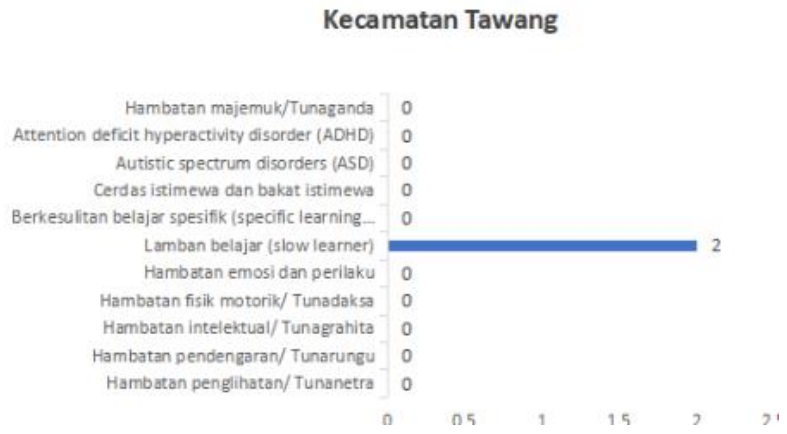

Gambar 4.16. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Tawang

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 1 SD dari 22 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Hasil kuisioner yang diterima dari Kecamatan Tawang menunjukkan bahwa dari 22 sekolah dasar, hanya satu sekolah yang mengisi kuisioner. Hal ini mengakibatkan data yang terkumpul tidak cukup untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar di wilayah ini. Situasi ini menyoroti perlunya penguatan sistem pendataan dan peningkatan kesadaran sekolah terhadap pentingnya pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya menyediakan pendidikan yang berkeadilan.

Untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap sekolah dasar secara rutin menyampaikan data terkait peserta didik berkebutuhan khusus. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan wali kota yang mengatur mekanisme pendataan, termasuk pelatihan kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya identifikasi siswa dengan kebutuhan khusus.

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya juga perlu mengembangkan sistem pendataan berbasis digital yang mudah diakses oleh sekolah. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan cepat, serta mempermudah analisis untuk menyusun kebijakan berbasis kebutuhan. Selain itu, penguatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah di seluruh kecamatan harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam program pendidikan inklusif.

Di Kecamatan Tawang, langkah pertama adalah memastikan seluruh sekolah berpartisipasi dalam proses pendataan. Dinas Pendidikan perlu melakukan pendekatan langsung dengan memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah mengenai pentingnya pendidikan inklusif dan manfaatnya bagi peserta didik. Kunjungan langsung dan pendampingan oleh tim khusus dapat membantu sekolah mengisi kuisioner dengan lebih baik dan memberikan data yang komprehensif.

Sambil menunggu hasil pendataan yang lebih lengkap, sekolah yang telah mengisi kuisioner dapat menjadi titik awal intervensi. Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memberikan pelatihan kepada guru-guru di

sekolah tersebut mengenai cara mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa, strategi pembelajaran inklusif, dan teknik pengelolaan kelas yang heterogen. Guru pendamping khusus (GPK) juga dapat ditempatkan di sekolah ini untuk membantu siswa yang terindikasi memiliki kesulitan belajar. Fasilitas dasar seperti ruang konseling, alat bantu pembelajaran, dan aksesibilitas fisik juga perlu disediakan secara bertahap di sekolah-sekolah di Kecamatan Tawang. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

6. Kecamatan Cihideung

a. Deskripsi Umum

Kecamatan Cihideung terletak di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan luas wilayah 5,45 km², terdiri dari enam kelurahan: Tugujaya, Tuguraja, Nagarawangi, Yudanagara, Cilembang, dan Argasari. Wilayah terluas adalah Kelurahan Tugujaya, mencakup 28,99% dari total luas kecamatan. Dengan populasi mencapai 74.610 jiwa pada tahun 2023, kepadatan penduduk rata-rata adalah 13.690 jiwa/km². Kelurahan dengan populasi terbanyak adalah Tuguraja (32,24%), sedangkan Yudanagara memiliki jumlah penduduk paling sedikit (6,17%).

Penduduk Kecamatan Cihideung didominasi oleh kelompok usia muda, dengan struktur piramida ekspansif yang menunjukkan tingginya proporsi usia produktif. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, dengan rasio jenis kelamin 102.

b. Fasilitas Pendidikan

Kecamatan Cihideung memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat:

1. 12 TK dan 12 RA untuk pendidikan usia dini.
2. 24 SD dan 6 MI untuk pendidikan dasar.
3. 10 SMP dan 6 MTs untuk pendidikan menengah pertama.
4. 4 SMA, 7 SMK, dan 3 MA untuk pendidikan menengah atas.

Rasio murid terhadap guru tertinggi berada pada jenjang SD dengan nilai 19,39, menandakan setiap guru menangani rata-rata 19 siswa. Rasio yang lebih rendah ditemukan pada RA (6,85) dan MTs (7,52), menunjukkan tingkat perhatian yang lebih baik pada tingkat tersebut.

c. Potret Pendidikan Inklusi

Dalam konteks pendidikan inklusi, Cihideung mencerminkan komitmen pada penyediaan pendidikan yang inklusif. Meskipun data spesifik tentang distribusi anak-anak berkebutuhan khusus tidak tercantum langsung dalam laporan statistik, kelengkapan fasilitas pendidikan dasar dan menengah mencerminkan peluang yang lebih baik untuk inklusi. Namun, tantangan tetap ada, seperti kesenjangan rasio guru terhadap murid di beberapa jenjang.

Anak-anak berkebutuhan khusus biasanya memerlukan layanan pendidikan dengan rasio guru-murid yang lebih rendah dan fasilitas penunjang khusus. Untuk itu, evaluasi terhadap rasio guru, ketersediaan tenaga pendidik khusus, serta sarana seperti ruang belajar inklusi menjadi penting. Kecamatan Cihideung juga dapat memanfaatkan jaringan pendidikan berbasis agama, seperti RA, MI, MTs, dan MA, untuk memperkuat program pendidikan inklusi berbasis nilai moral dan budaya.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Cihideung, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:

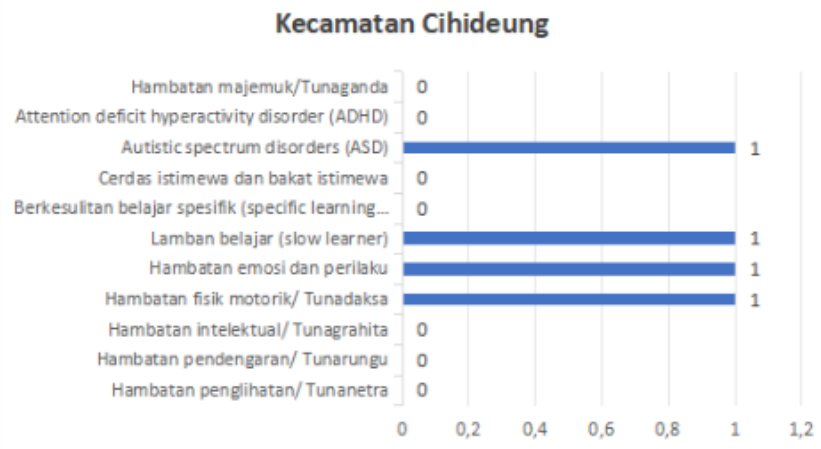

Gambar 4.17. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Cihideung

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 1 SD dari 24 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Hasil kuisioner yang dilakukan di Kecamatan Cihideung menunjukkan bahwa dari 24 sekolah dasar, hanya satu sekolah yang mengisi kuisioner. Hal ini serupa dengan kondisi di Kecamatan Tawang, sehingga analisis menyeluruh terhadap kondisi siswa berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar sulit untuk dilakukan. Dari data yang tersedia, teridentifikasi satu siswa lamban belajar (slow learner), satu siswa dengan autisme (ASD), satu siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, serta satu siswa tunadaksa. Situasi ini menyoroti perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi sekolah dalam pendataan serta penguatan kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif.

Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menetapkan kebijakan yang mewajibkan semua sekolah dasar menyampaikan data terkait peserta didik berkebutuhan khusus secara rutin. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam peraturan wali kota dengan panduan teknis yang mempermudah sekolah untuk melakukan identifikasi awal siswa berkebutuhan khusus. Untuk mendukung kebijakan ini, Dinas Pendidikan perlu membangun sistem pendataan berbasis digital yang memungkinkan sekolah memasukkan data dengan lebih cepat, mudah, dan akurat.

Selain itu, sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru di seluruh kecamatan harus ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif serta melatih mereka dalam mengenali kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Pemerintah juga perlu menyediakan tenaga pendamping atau tim khusus yang dapat membantu sekolah dalam proses pendataan dan asesmen awal.

Di Kecamatan Cihideung ini, langkah pertama adalah memastikan partisipasi lebih banyak sekolah dalam proses pendataan. Dinas Pendidikan perlu mengadakan pertemuan langsung dengan para kepala sekolah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya data yang komprehensif dalam menyusun kebijakan pendidikan inklusif. Pendampingan teknis kepada sekolah yang kesulitan mengisi kuisioner juga perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka.

Sementara menunggu hasil pendataan yang lebih luas, intervensi awal dapat dilakukan di sekolah yang telah mengisi kuisioner. Siswa slow learner membutuhkan program remedial dengan metode belajar yang fleksibel, sementara siswa dengan autisme (ASD) dapat dibantu melalui pendekatan berbasis terapi perilaku yang terstruktur. Siswa dengan hambatan emosi dan perilaku memerlukan konseling individual dan strategi pengelolaan emosi di kelas, sedangkan siswa tunadaksa memerlukan alat bantu mobilitas dan aksesibilitas fisik di lingkungan sekolah.

Peningkatan kapasitas guru di Kecamatan Cihideung menjadi prioritas berikutnya. Pelatihan intensif tentang pendidikan inklusif, strategi pembelajaran individual, dan penanganan siswa dengan kebutuhan khusus harus diadakan secara berkala. Guru pendamping khusus (GPK) juga dapat ditempatkan di sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus untuk memberikan dukungan tambahan. Fasilitas dasar seperti ruang konseling, alat bantu belajar, dan infrastruktur yang ramah difabel harus mulai disediakan di sekolah. Fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik atau kebutuhan khusus lainnya.

7. Kecamatan Mangkubumi

a. Deskripsi Umum

Kecamatan Mangkubumi terletak di Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 24,17 km², mencakup delapan kelurahan: Karikil, Cigantang, Sambongjaya, Sambongpari, Linggajaya, Mangkubumi, Cipari, dan Cipawitra. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Bungursari di utara, Kecamatan Kawalu di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat dan timur. Dengan populasi sebesar 102.237 jiwa pada tahun 2023, kepadatan penduduknya mencapai 4.230 jiwa/km², dengan dominasi kelompok usia muda.

b. Fasilitas Pendidikan

Kecamatan Mangkubumi memiliki infrastruktur pendidikan yang mencakup berbagai jenjang pendidikan:

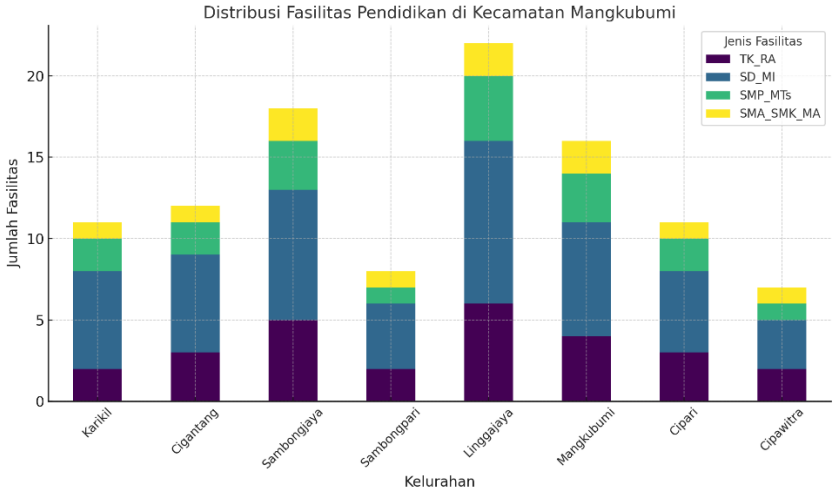

Gambar 4.18. Jumlah Sekolah dan Madrasah di Kecamatan Mangkubumi.

1. 14 Taman Kanak-kanak (TK), 16 Raudhatul Athfal (RA)
2. 33 Sekolah Dasar (SD), 6 Madrasah Ibtidaiyah (MI)
3. 10 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 5 Madrasah Tsanawiyah (MTs)
4. 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 4 Madrasah Aliyah (MA).

Rasio murid-guru cukup beragam, dengan rata-rata rasio tertinggi pada tingkat SMA (24,54 murid per guru) dan terendah di tingkat Madrasah Aliyah (8,28 murid per guru). Ketersediaan fasilitas pendidikan ini merupakan faktor penting dalam mendukung aksesibilitas pendidikan inklusi.

c. Data Persebaran Jenis Hambatan Belajar

Data persebaran anak-anak inklusi menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan khusus di Kecamatan Mangkubumi mulai diakomodasi oleh beberapa sekolah dasar dan menengah. Namun, tantangan masih ada terkait:

1. Ketersediaan guru pendidikan khusus (GPK): Berdasarkan dokumen, proporsi GPK masih terbatas di beberapa sekolah yang berpotensi menangani anak-anak berkebutuhan khusus.
2. Distribusi fasilitas pendidikan inklusi: Sekolah inklusi cenderung lebih banyak tersedia di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Kelurahan Linggajaya dan Mangkubumi.
3. Jumlah anak berkebutuhan khusus: Data yang akurat tentang jumlah anak inklusi per kelurahan masih diperlukan untuk perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Mangkubumi, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:

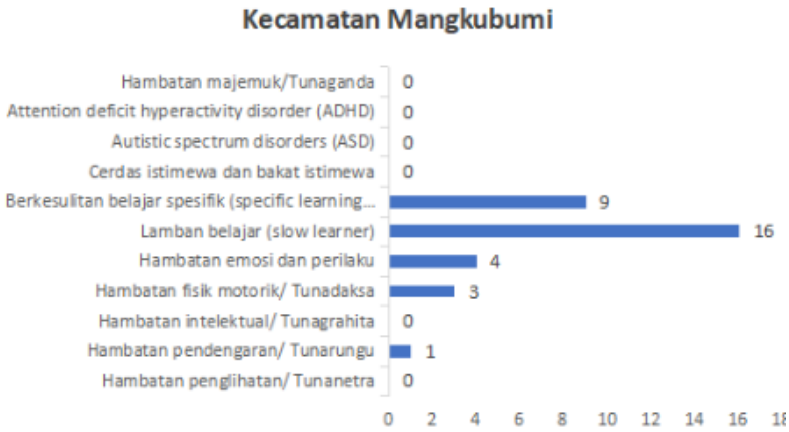

Gambar 4.19. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Mangkubumi.

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 5 SD dari 33 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, ditemukan adanya sejumlah peserta didik yang teridentifikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Meskipun hanya 5 (lima) sekolah dari 33 yang mengisi kuisioner, data yang terkumpul memberikan gambaran tentang kondisi yang perlu perhatian serius. Sebanyak 16 siswa teridentifikasi sebagai slow learner, 9 siswa dengan kesulitan belajar spesifik, 4 siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, serta 4 siswa dengan kebutuhan fisik, yaitu tunadaksa dan tunarungu.

Mengingat hasil yang tidak komprehensif ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas jangkauan kuisioner dan melibatkan

seluruh sekolah dasar di Kecamatan Mangkubumi. Hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan lebih representatif, sehingga kebijakan pendidikan inklusif dapat dirumuskan lebih akurat. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu diterapkan adalah pertama, peningkatan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam menangani kebutuhan siswa dengan berbagai kesulitan belajar. Ini mencakup pelatihan dalam pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan penggunaan metode pembelajaran yang lebih inklusif, serta pengenalan terhadap penggunaan teknologi pembelajaran untuk memfasilitasi siswa dengan kebutuhan tertentu.

Kedua, peningkatan fasilitas sekolah yang ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk penyediaan ruang belajar yang aman dan aksesibilitas yang memadai bagi siswa tunadaksa dan tunarungu. Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu memperhatikan pentingnya penyesuaian infrastruktur ini agar setiap siswa dapat belajar dengan nyaman dan optimal. Ketiga, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya pendidikan inklusif dan cara mendukung perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, untuk Kecamatan Mangkubumi bisa dilaksanakan program intervensi berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah kecamatan, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung siswa berkebutuhan khusus. Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memfasilitasi kolaborasi ini dengan memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dan kebijakan yang jelas mengenai pendidikan inklusif. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan bahwa inklusivitas pendidikan di Kecamatan Mangkubumi dapat terwujud dan memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa.

8. Kecamatan Indihiang

a. Deskripsi Umum

Kecamatan Indihiang merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan luas 10,89 km² dan terdiri dari enam kelurahan: Panyingkiran, Parakannyasag, Sirnagalih, Indihiang, Sukamajukidul, dan Sukamajukaler(statistik-daerah-kecama…). Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.440 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan penduduk 5.642 jiwa/km².

Komposisi usia penduduk menunjukkan potensi besar dalam pengembangan pendidikan, karena 68,39% penduduk berada dalam kategori usia produktif (15–64 tahun), sedangkan usia anak-anak (0–14 tahun) mencapai 24,88%.

b. Fasilitas Pendidikan

Pada tahun ajaran 2022/2023, Kecamatan Indihiang memiliki beragam fasilitas pendidikan, antara lain:

1. 10 Taman Kanak-kanak (TK)
2. 12 Raudatul Anfal (RA)
3. 17 Sekolah Dasar (SD)
4. 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI)
5. 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP)
6. 3 Madrasah Tsanawiyah (MTs)
7. 4 Sekolah Menengah Atas (SMA)
8. 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
9. 2 Sekolah Madrasah Aliyah (MA)
10. 2 Akademi/Perguruan Tinggi.

Sebaran fasilitas pendidikan ini merata di semua kelurahan, dengan tingkat pendidikan dasar paling dominan. Hal ini mengindikasikan upaya kecamatan untuk mendukung pendidikan inklusi, meskipun akses pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi masih terbatas di beberapa kelurahan.

c. Persebaran Anak-anak Inklusi

Informasi langsung tentang anak-anak inklusi di Kecamatan Indihiang tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen, namun pendidikan inklusi memerlukan evaluasi fasilitas yang tersedia untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Analisis terhadap sarana yang mendukung aksesibilitas dan kurikulum di fasilitas pendidikan yang ada akan menjadi penting. Adanya sekolah dasar (SD) dan RA di setiap kelurahan bisa menjadi dasar awal untuk integrasi program inklusi.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Indihiang, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:

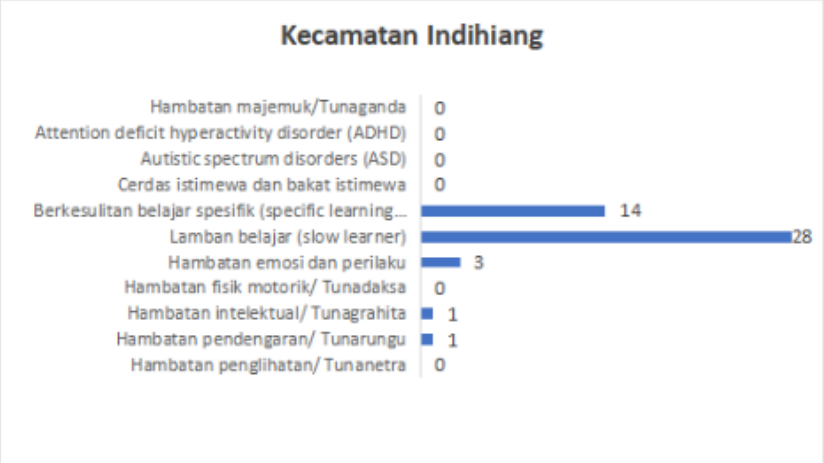

Gambar 4.20. Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Indihiang

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 2 SD dari 17 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, telah teridentifikasi sejumlah peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Walaupun hanya dua sekolah dari 17 yang mengisi kuisioner, data yang terkumpul menunjukkan adanya kebutuhan mendesak dalam menangani siswa dengan berbagai tantangan belajar. Dari hasil analisis, ditemukan 28 siswa yang teridentifikasi sebagai slow learner, 14 siswa dengan kesulitan belajar spesifik, 3 siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, serta 2 siswa dengan kebutuhan fisik, yaitu tunagrahita dan tunarungu.

Penting untuk segera memperluas jangkauan kuisioner di Kecamatan Indihiang agar memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai kondisi siswa berkesulitan belajar di wilayah ini. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu diterapkan di tingkat Kota Tasikmalaya antara lain adalah penguatan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam hal pendidikan inklusif. Pelatihan ini harus fokus pada teknik mengajar yang disesuaikan dengan berbagai kondisi siswa, termasuk penggunaan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan spesifik siswa dengan

berbagai kesulitan belajar, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar.

Kedua, pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mendorong penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Indihiang. Fasilitas ini harus mencakup ruang kelas yang lebih inklusif, alat bantu pendidikan untuk siswa tunarungu dan tunagrahita, serta fasilitas yang dapat mendukung kebutuhan siswa dengan hambatan emosional dan perilaku. Infrastruktur yang tepat akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi semua siswa, tanpa terkecuali.

Selanjutnya, untuk Kecamatan Indihiang ini, pemerintah setempat perlu menginisiasi program pemberdayaan komunitas yang melibatkan orang tua, guru, serta masyarakat setempat untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan sesi sosialisasi mengenai pendidikan inklusif, memberikan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus, dan cara terbaik untuk mendukung mereka di rumah dan di sekolah. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga diharapkan dapat memberikan alokasi dana khusus untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kecamatan Indihiang, serta memastikan adanya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pendidikan inklusif di Kecamatan Indihiang dapat berkembang dengan lebih baik, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing.

9. Kecamatan Bungursari

a. Deskripsi Umum

Kecamatan Bungursari adalah salah satu wilayah administratif di Kota Tasikmalaya dengan luas 17,57 km² yang terdiri dari 7 kelurahan: Sukamulya, Sukarindik, Bungursari, Sukajaya, Cibunigeulis, Bantarsari, dan Sukalaksana. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebesar 64.276 jiwa pada tahun 2023 dengan distribusi 32.650 laki-laki dan 31.626 perempuan, serta tingkat kepadatan penduduk 3.658 jiwa/km². Kelurahan Bantarsari mencatat kepadatan penduduk tertinggi dengan 6.017 jiwa/km², sedangkan Kelurahan Sukalaksana terendah dengan 2.603 jiwa/km².

Dalam konteks sosial, penduduk mayoritas beragama Islam dengan sarana ibadah berupa 93 masjid dan 169 musala. Pembangunan wilayah, termasuk akses jalan, tergolong baik dengan seluruh kelurahan memiliki jalan aspal atau beton yang bisa dilalui kendaraan sepanjang tahun.

b. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Bungursari cukup memadai untuk mendukung pendidikan formal, termasuk pendidikan inklusi. Pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat sejumlah institusi pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar: 16 SD dan 7 MI.
2. Pendidikan Menengah: 9 SMP, 4 MTs, 3 SMA, 4 SMK, dan 4 MA.
3. Pendidikan Anak Usia Dini: 3 TK dan 17 RA.

Tingkat rasio murid terhadap guru menjadi indikator ketersediaan tenaga pengajar. Rasio tertinggi berada di jenjang SD dengan 21,84 murid per guru, menunjukkan kebutuhan tambahan tenaga pendidik yang cukup signifikan, terutama untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas inklusi. Rasio yang lebih rendah ditemukan pada TK (9,93) dan RA (8,08), yang dapat memberikan ruang untuk perhatian lebih intensif pada anak usia dini, termasuk anak inklusi.

c. Data Persebaran Siswa Berkesulitan Belajar

Informasi spesifik tentang jumlah anak-anak inklusi dan fasilitas pendukung khusus untuk mereka tidak secara langsung disebutkan dalam data ini.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Bungursari, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.21 Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Bungursari

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 7 SD dari 16 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam. Beberapa poin yang dapat menjadi perhatian:

1. Keberadaan fasilitas pendidikan formal di tiap jenjang menunjukkan potensi penerimaan anak-anak inklusi dengan penyesuaian layanan.
2. Tingkat rasio murid-guru yang masih cukup tinggi di beberapa jenjang pendidikan, khususnya SD, menunjukkan bahwa sumber daya manusia pendidik perlu ditingkatkan baik dalam jumlah maupun kompetensinya, termasuk pelatihan terkait pendidikan inklusi.
3. Dukungan prasarana pendidikan inklusi di Kecamatan Bungursari dapat diarahkan melalui alokasi khusus pada sekolah yang telah memiliki kapasitas menerima anak berkebutuhan khusus.

d. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, terdapat sejumlah peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Meskipun hanya 7 sekolah dari 16 yang mengisi kuisioner, data yang terkumpul memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh siswa di wilayah ini. Teridentifikasi sebanyak 80 siswa sebagai slow learner, 11 siswa dengan kesulitan belajar spesifik, 4 siswa dengan

hambatan emosi dan perilaku, serta 2 siswa dengan kebutuhan fisik yaitu tunagrahita, 1 siswa tunarungu, 1 siswa tunadaksa, dan 2 siswa dengan spektrum autisme (ASD). Meskipun demikian, jumlah sekolah yang berpartisipasi masih terbatas, sehingga analisis yang lebih komprehensif terhadap kondisi siswa berkesulitan belajar di Kecamatan Bungursari belum dapat dilakukan secara maksimal.

Untuk itu, kebijakan yang perlu diterapkan di tingkat Kota Tasikmalaya adalah memperluas jangkauan kuisioner dengan melibatkan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Bungursari. Hal ini penting agar data yang dikumpulkan dapat lebih representatif, sehingga kebijakan pendidikan inklusif dapat dirumuskan dengan lebih tepat. Selain itu, pemerintah kota harus memastikan bahwa tenaga pendidik dilatih untuk menangani berbagai jenis kebutuhan siswa, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Pelatihan ini harus mencakup teknik mengajar yang adaptif, penggunaan teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus, serta cara-cara untuk menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung.

Kedua, pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mendorong sekolah-sekolah di Kecamatan Bungursari untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Hal ini meliputi penyediaan ruang kelas yang aman dan aksesibel, alat bantu belajar untuk siswa tunarungu, tunadaksa, serta perangkat untuk siswa dengan spektrum autisme (ASD), serta dukungan bagi siswa dengan hambatan emosi dan perilaku. Infrastruktur yang mendukung akan meningkatkan kenyamanan siswa dalam belajar dan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses pendidikan yang setara.

Untuk menangani siswa berkesulitan belajar di Kecamatan Mangkubumi, perlu diterapkan pendekatan diferensiasi pembelajaran bagi siswa slow learner, dengan menggunakan metode yang disesuaikan dan lebih konkret. Siswa dengan kesulitan belajar spesifik memerlukan intervensi yang terstruktur, seperti penggunaan perangkat edukatif dan sesi remedial. Bagi siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, layanan konseling serta program pengelolaan emosi dan perilaku harus diberikan. Siswa dengan kebutuhan fisik khusus, seperti tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan ASD, memerlukan penyesuaian fasilitas dan metode pembelajaran, serta pendampingan intensif. Selain itu, penting untuk memberdayakan guru dengan pelatihan dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, serta melibatkan orang tua dan masyarakat untuk mendukung perkembangan siswa di rumah dan sekolah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif di Kecamatan Bungursari, penting untuk melibatkan orang tua dan

masyarakat dalam mendukung perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Program sosialisasi dan pelatihan bagi orang tua serta masyarakat setempat tentang pentingnya pendidikan inklusif dan cara mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus di rumah dan sekolah perlu diperkuat. Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memfasilitasi kegiatan ini dengan memberikan pendampingan dan sumber daya yang diperlukan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pendidikan inklusif di Kecamatan Bungursari dapat berkembang lebih baik, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa berkebutuhan khusus, baik di sekolah maupun di masyarakat, untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan.

10. Kecamatan Cipedes

a. Deskripsi Umum

Kecamatan Cipedes memiliki luas wilayah 9,04 km² dan terdiri atas empat kelurahan: Sukamanah, Nagarasari, Cipedes, dan Panglayungan. Wilayah ini merupakan bagian dari Kota Tasikmalaya dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 84.577 jiwa. Mayoritas penduduk tinggal di Kelurahan Sukamanah, yang juga merupakan wilayah terluas (3,42 km²). Sementara itu, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Cipedes dengan 12.798 jiwa/km².

Kecamatan Cipedes memiliki bentuk piramida penduduk ekspansif, yang menunjukkan dominasi kelompok usia muda, terutama usia produktif 20–24 tahun. Kelompok usia ini memberikan potensi besar bagi pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam sektor pendidikan.

b. Fasilitas Pendidikan

Kecamatan Cipedes memiliki berbagai fasilitas pendidikan, mencakup sekolah formal dari tingkat dasar hingga menengah kejuruan. Berikut adalah jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia:

1. Tingkat Dasar:
   a. Sekolah Dasar (SD): 23 sekolah
   b. Madrasah Ibtidaiyah (MI): 3 sekolah

2. Tingkat Menengah:
    c. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 5 sekolah
    d. Madrasah Tsanawiyah (MTs): 4 sekolah
    e. Sekolah Menengah Atas (SMA): 1 sekolah
    f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): 9 sekolah
    g. Madrasah Aliyah (MA): 1 sekolah
3. Tingkat Anak Usia Dini:
    h. Taman Kanak-kanak (TK): 16 sekolah
    i. Raudhatul Athfal (RA): 14 sekolah

Fasilitas pendidikan tersebar di seluruh kelurahan. Kelurahan Sukamanah memiliki jumlah fasilitas paling banyak, menunjukkan fokus pada pengembangan pendidikan di wilayah tersebut.

c. Data Persebaran Jenis Hambatan Belajar

Pendidikan inklusi di Kecamatan Cipedes difasilitasi oleh beberapa sekolah yang mendukung kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa sekolah telah melaksanakan program inklusi dengan dukungan guru khusus.

Kelurahan Cipedes: Sekolah di kelurahan ini memiliki kapasitas untuk menerima siswa inklusi terbatas karena ketersediaan tenaga pendidik khusus yang masih perlu ditingkatkan.
Kelurahan Sukamanah: Memiliki fasilitas terbaik untuk pendidikan inklusi, dengan program pelatihan guru khusus.
Kelurahan Nagarasari dan Panglayungan: Program inklusi masih dalam tahap pengembangan, dengan fokus pada penyediaan fasilitas pendukung.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke berbagai sekolah dasar di Kecamatan Cipedes, kami berhasil mengumpulkan data terkait peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar. Kuisioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, maupun akademik. Data yang terkumpul dapat digambarkan sebagai berikut:

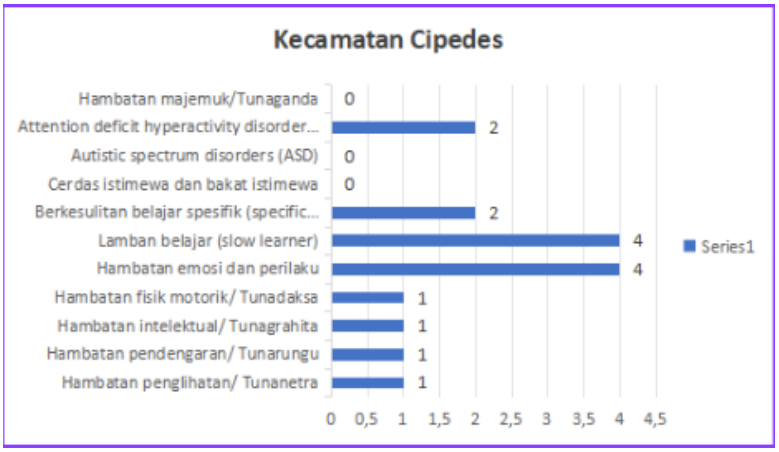

Gambar 4.22 Sebaran Hambatan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Cipedes

Catatan: SD yang mengisi kuisioner sebanyak 3 SD dari 23 SD.

Data ini memberikan gambaran awal tentang urgensi penanganan pendidikan inklusif di kecamatan ini. Informasi yang telah dihimpun akan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi, pengembangan pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan yang beragam.

d. Rekomendasi

Pendidikan inklusif di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan ke sekolah dasar di Kecamatan Bungursari, data yang terkumpul menunjukkan adanya sejumlah siswa dengan kebutuhan khusus dan kesulitan belajar yang perlu segera ditangani. Namun, kuisioner ini hanya diisi oleh 3 dari 23 sekolah dasar di kecamatan tersebut, yang berarti analisis terhadap kondisi siswa berkesulitan belajar belum sepenuhnya komprehensif. Oleh karena itu, kebijakan pengumpulan data yang lebih menyeluruh dan sistematis perlu diterapkan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi pendidikan inklusif di seluruh Kecamatan Cipedes.

Sebagai langkah pertama, sangat penting bagi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk mengeluarkan kebijakan yang mendorong seluruh sekolah dasar di Kecamatan Cipedes untuk melakukan pendataan lebih lanjut mengenai peserta didik yang terindikasi berkebutuhan khusus atau memiliki kesulitan belajar. Data yang lebih lengkap akan menjadi landasan yang kuat untuk merancang program pendidikan inklusif yang tepat sasaran. Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memfasilitasi pelatihan kepada guru dan pihak terkait lainnya untuk melakukan

asesmen secara menyeluruh terhadap kondisi siswa di setiap sekolah, termasuk mengidentifikasi hambatan fisik, emosional, maupun akademik yang dihadapi oleh peserta didik.

Kedua, dengan data yang sudah ada, langkah selanjutnya adalah merancang strategi intervensi yang lebih konkret, termasuk pengembangan kurikulum yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, perlu ada peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan khusus mengenai pendidikan inklusif, yang mencakup teknik mengajar yang adaptif, penggunaan alat bantu, serta pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman kebutuhan belajar siswa. Guru perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani berbagai jenis hambatan yang mungkin dihadapi oleh siswa, mulai dari yang lamban belajar *(slow learner),* berkesulitan belajar spesifik, hingga mereka yang memiliki disabilitas seperti tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunanetra, dan ADHD.

Selain itu, peningkatan fasilitas di sekolah-sekolah di Kecamatan Cipedes juga sangat diperlukan untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang ramah disabilitas, alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta teknologi pendidikan yang dapat membantu siswa berkebutuhan khusus. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat dibutuhkan dalam menyediakan fasilitas ini.

Terakhir, kebijakan ini juga harus memperhatikan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Orang tua perlu diberikan pemahaman tentang pendidikan inklusif dan dilibatkan dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Masyarakat juga harus diberdayakan untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan sosial dan pembelajaran sehari-hari. Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan pendidikan inklusif di Kecamatan Cipedes dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka.

B. **Rekapitulasi Temuan Persebaran ABK & ABB se-kota Tasikmalaya tingkat SD.**

Bab ini membahas temuan utama terkait sebaran siswa dengan hambatan belajar di tingkat Sekolah Dasar di Kota Tasikmalaya berdasarkan data dari 10 kecamatan. Data yang dianalisis mencakup berbagai jenis hambatan belajar, termasuk hambatan fisik, intelektual, emosi/perilaku, serta hambatan khusus seperti *Autistic Spectrum Disorder* (ASD) dan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD). Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konsentrasi, variasi jenis hambatan, dan prioritas intervensi yang diperlukan.

Gambar 4.23.
Sebaran Peserta Didik Berkesulitan Belajar
Berdasarkan Kecamatan se-Kota Tasikmalaya

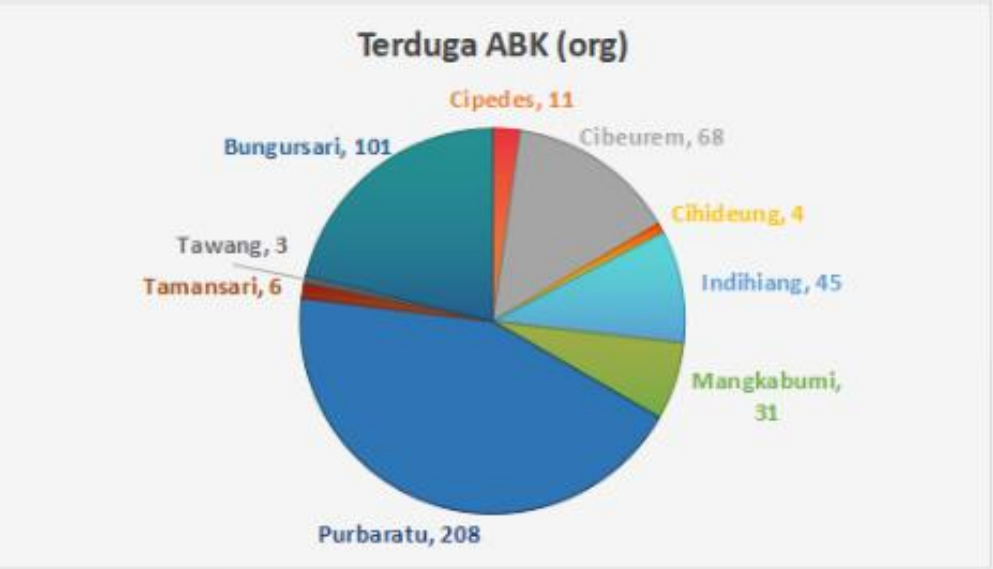

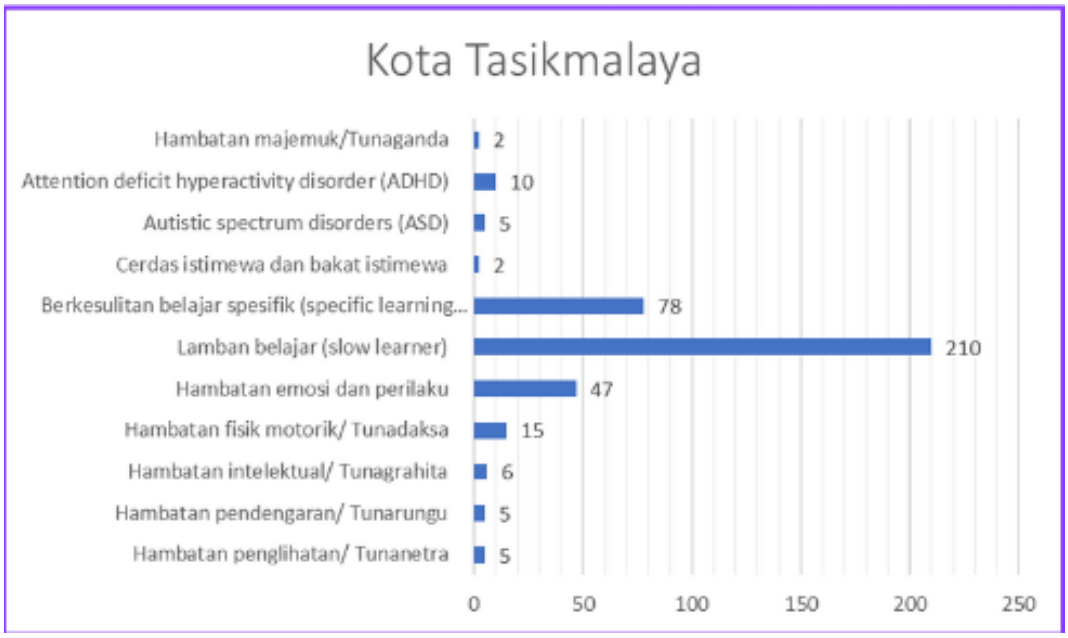

Gambar 4.24.
Sebaran Peserta Didik Berkesulitan Belajar
Berdasarkan Jenis Hambatan Belajar Se Kota Tasikmalaya.

1. Temuan Berdasarkan Jenis Hambatan Belajar

a. Distribusi Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus di Setiap Kecamatan

Data menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki distribusi siswa berkebutuhan khusus yang berbeda, baik dalam jumlah total maupun jenis hambatan belajar. Berikut adalah rangkuman distribusi tersebut:

1) **Kecamatan dengan Jumlah Tertinggi**:

a) *Cibeureum* memiliki total 68 siswa dengan hambatan belajar, tertinggi di antara kecamatan lain.

b) *Indihiang* dan *Mangkubumi* juga menunjukkan jumlah siswa dengan hambatan yang signifikan, masing-masing dengan 45 dan 31 siswa.

2) **Kecamatan dengan Jumlah Rendah**:

c) Cihideung memiliki jumlah siswa berkebutuhan khusus paling rendah, hanya 4 siswa, diikuti oleh Cipedes dengan 11 siswa.

3) **Jenis Hambatan Belajar di Setiap Kecamatan**

Analisis lebih lanjut dilakukan pada setiap jenis hambatan untuk melihat pola konsentrasi di masing-masing kecamatan. Berikut adalah beberapa temuan utama:

a) **Slow Learner**:

Kecamatan *Cibeureum* dan *Indihiang* memiliki jumlah siswa tertinggi dalam kategori ini, dengan masing-masing 24 dan 28 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa di kedua kecamatan ini membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih lambat dan kurikulum yang disesuaikan.

b) **Kesulitan Belajar Spesifik**:

Kecamatan *Indihiang* mencatat jumlah siswa dengan kesulitan belajar spesifik paling tinggi, yaitu 14 siswa, diikuti oleh *Cibeureum* dengan 13 siswa. Jenis kesulitan ini mencakup hambatan seperti disleksia, diskalkulia, dan disgrafia, yang memerlukan penanganan khusus dari tenaga pengajar yang terlatih.

c) **Hambatan Emosi dan Perilaku**:

Kecamatan *Cibeureum* juga memiliki konsentrasi tinggi pada siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, sebanyak 7 siswa. Hambatan ini sering dikaitkan dengan masalah sosio-emosional yang memerlukan perhatian khusus dalam bentuk dukungan psikologis dan sosial.

d) **ASD dan ADHD**:

Siswa dengan ASD dan ADHD paling banyak ditemukan di Kecamatan *Cibeureum*, dengan masing-masing 4 siswa. Kebutuhan khusus ini menuntut program inklusi yang menyediakan dukungan intervensi perilaku dan modifikasi lingkungan belajar yang sesuai.

e) **Hambatan Majemuk (Tunaganda)**:

Hambatan majemuk, yang mencakup dua atau lebih hambatan, tercatat di beberapa kecamatan seperti *Cibeureum* dan *Indihiang*, meskipun dengan jumlah kecil. Hambatan ini memerlukan strategi penanganan multidisipliner.

2. **Analisis Perbandingan Jenis Hambatan di Setiap Kecamatan**

Temuan menunjukkan bahwa jenis hambatan seperti *Slow Learner* dan *Kesulitan Belajar Spesifik* mendominasi di sebagian besar kecamatan. Namun, terdapat perbedaan konsentrasi hambatan antar kecamatan. Kecamatan dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus tertinggi, yaitu

Cibeureum, memiliki jumlah signifikan dalam berbagai kategori hambatan, yang mengindikasikan perlunya intervensi pendidikan yang lebih intensif dan menyeluruh di wilayah ini. Di sisi lain, kecamatan seperti *Cihideung* dan *Cipedes* memiliki jumlah yang lebih rendah dan cenderung terkonsentrasi pada jenis hambatan tertentu.

a. **Pemetaan Konsentrasi dan Kebutuhan Intervensi**

Distribusi siswa berkebutuhan khusus di berbagai kecamatan juga mengindikasikan kebutuhan yang berbeda terkait fasilitas pendidikan:

1) **Kecamatan Cibeureum**: Memiliki kebutuhan mendesak untuk layanan psikologis dan pedagogis yang mendukung siswa dengan *ASD*, *ADHD*, dan hambatan emosi/perilaku. Kecamatan ini membutuhkan program intervensi yang holistik.

2) **Kecamatan Indihiang**: Fokus utama pada program yang dapat mendukung siswa dengan kesulitan belajar spesifik dan *Slow Learner*, mengingat tingginya konsentrasi siswa dengan hambatan ini.

Pola distribusi hambatan belajar ini mengindikasikan perlunya penyesuaian sumber daya pendidikan di tingkat kecamatan. Beberapa rekomendasi berdasarkan temuan adalah:

3) Pengadaan Program Remedial dan Pengajaran Khusus: Terutama di kecamatan seperti Indihiang dan Cibeureum, yang memiliki jumlah siswa dengan hambatan intelektual dan lamban belajar yang tinggi.

4) Penguatan Tenaga Pengajar dan Pelatihan Khusus: Pelatihan guru untuk menangani siswa dengan kesulitan belajar spesifik dan kebutuhan lain yang lebih intensif sangat dibutuhkan, terutama di kecamatan dengan konsentrasi hambatan tertentu.

5) Penyediaan Layanan Psikologis dan Pendampingan: Khususnya di kecamatan dengan tingkat hambatan emosional/perilaku dan ADHD yang tinggi, agar siswa mendapatkan dukungan sosio-emosional yang memadai.

Analisis ini mengidentifikasi variasi kebutuhan pendidikan di berbagai kecamatan di Kota Tasikmalaya. Kecamatan *Cibeureum* dan *Indihiang* muncul sebagai wilayah dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang paling tinggi dan sebaran jenis hambatan yang luas. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, setiap kecamatan membutuhkan pendekatan dan sumber daya yang disesuaikan dengan profil hambatan siswa.

3. Analisis SWOT Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Hambatan Belajar

a. *Strengths* (Kekuatan):

1) Keanekaragaman Jenis Hambatan yang Dikenali**:** Data yang telah dikumpulkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang berbagai jenis hambatan yang dialami oleh siswa, seperti slow learner, kesulitan belajar spesifik (disleksia, diskalkulia, disgrafia), gangguan emosi/perilaku, ADHD, dan hambatan fisik seperti tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan tunanetra. Pengetahuan tentang berbagai jenis hambatan ini memungkinkan perencanaan pendidikan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan siswa. Dengan memahami berbagai hambatan, intervensi dapat dirancang dengan lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis kebutuhan.
2) Fokus pada Kecamatan dengan Konsentrasi Siswa Berkebutuhan Khusus**:** Beberapa kecamatan, terutama Cibeureum dan Indihiang, memiliki jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tinggi dan distribusi jenis hambatan yang bervariasi. Fokus pada kecamatan-kecamatan ini untuk mengembangkan program pendidikan inklusif yang lebih mendalam menjadi kekuatan besar, karena dapat membantu memprioritaskan sumber daya dan intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Cibeureum, misalnya, memerlukan layanan psikologis yang lebih intensif dan program yang mendukung ASD, ADHD, serta hambatan emosi/perilaku, sementara Indihiang lebih membutuhkan program remedial dan pengajaran untuk siswa dengan slow learner dan kesulitan belajar spesifik.
3) Pemetaan Kebutuhan yang Mendalam**:** Pemetaan hambatan belajar yang lebih mendalam di tingkat kecamatan membantu dalam merancang kebijakan pendidikan inklusif yang lebih relevan. Data ini memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan efisien, sehingga program pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap kecamatan. Ini memberikan arah yang lebih jelas bagi pengambil keputusan di tingkat pemerintah kota dan kecamatan untuk merencanakan program-program pendidikan yang tepat sasaran.

b. *Weaknesses* (Kelemahan):

1) Distribusi Data yang Tidak Merata**:** Meskipun data yang terkumpul cukup berharga, hanya 3 dari 23 sekolah dasar yang

mengisi kuisioner, sehingga informasi yang ada belum sepenuhnya representatif untuk kondisi seluruh siswa berkebutuhan khusus di Kota Tasikmalaya. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya celah dalam pengumpulan data dan ketergantungan pada partisipasi sekolah. Tanpa data yang komprehensif dari semua kecamatan, penentuan kebijakan yang berbasis data yang lengkap bisa menjadi tidak akurat dan kurang optimal.

2) Keterbatasan Sumber Daya untuk Penanganan Hambatan Spesifik**:** Meskipun ada pemahaman yang baik tentang jenis hambatan belajar yang ada, banyak kecamatan yang menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga pengajar yang terlatih dan fasilitas yang memadai untuk menangani hambatan belajar spesifik seperti disleksia, diskalkulia, dan gangguan emosi/perilaku. Di kecamatan dengan konsentrasi tinggi seperti Cibeureum, kebutuhan akan program khusus untuk ADHD, ASD, dan hambatan emosi/perilaku sangat mendesak, namun kekurangan sumber daya dalam pelatihan guru dan layanan psikologis membatasi kemampuan untuk memberikan dukungan yang memadai.
3) Ketergantungan pada Intervensi Lokal**:** Kecamatan yang memiliki konsentrasi hambatan tertentu, seperti Cibeureum yang memiliki banyak siswa dengan ASD dan ADHD, mungkin akan mengalami ketergantungan pada intervensi lokal yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kualitas program inklusi. Ketergantungan ini berisiko menimbulkan disparitas antara kecamatan dalam hal kualitas pendidikan inklusif, karena sumber daya dan pendekatan yang tersedia tidak selalu setara antara kecamatan yang lebih besar dan lebih kecil.
4) Terbatasnya Pemahaman Masyarakat dan Orang Tua**:** Pendidikan inklusif memerlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang pentingnya pendidikan inklusif bisa menjadi kendala besar dalam penerimaan dan dukungan terhadap program inklusi. Tanpa dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat, intervensi yang diberikan di sekolah mungkin tidak akan maksimal.

c. ***Opportunities*** **(Peluang):**

1) Peningkatan Program Pelatihan Guru**:** Berdasarkan temuan yang menunjukkan keberagaman hambatan belajar di tiap kecamatan, ada peluang besar untuk mengembangkan dan meningkatkan program pelatihan untuk guru yang berfokus

pada pendidikan inklusif. Pelatihan ini harus mencakup strategi mengajar yang dapat diadaptasi untuk siswa dengan slow learner, disleksia, ADHD, dan gangguan emosi/perilaku. Hal ini akan membantu para pendidik lebih siap dalam menangani keberagaman di kelas dan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

2) Kerjasama dengan Profesional Psikologi dan Pendidikan Khusus**:** Untuk mengatasi kebutuhan yang semakin mendesak di kecamatan dengan konsentrasi siswa dengan hambatan emosional dan perilaku, peluang untuk menjalin kerjasama dengan profesional psikologi dan pendidikan khusus sangat penting. Layanan psikologis, konseling, serta pendampingan khusus bagi siswa yang menghadapi masalah perilaku dan emosi dapat disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologis mereka, yang pada gilirannya akan mendukung proses pembelajaran.

3) Pengembangan Program Remedial dan Pengajaran Khusus**:** Mengingat tingginya jumlah siswa slow learner dan siswa dengan kesulitan belajar spesifik di kecamatan tertentu, ada peluang untuk mengembangkan program remedial yang lebih komprehensif. Program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, memberikan lebih banyak waktu untuk memahami materi pembelajaran dan menggunakan metode yang lebih fleksibel dalam pengajaran.

4) Penerapan Teknologi dalam Pendidikan Inklusif**:** Teknologi pendidikan menawarkan peluang besar dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Penggunaan perangkat lunak khusus, aplikasi pembelajaran adaptif, dan alat bantu visual dapat mendukung siswa dengan hambatan tertentu, seperti disleksia, tunanetra, atau tunarungu. Teknologi juga dapat digunakan untuk melatih guru dalam keterampilan yang diperlukan untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus.

d. *Threats* (Ancaman):

1) Keterbatasan Anggaran untuk Pendidikan Inklusif**:** Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan program pendidikan inklusif adalah keterbatasan anggaran. Program yang mencakup pelatihan guru, pengadaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, dan pengembangan layanan psikologis membutuhkan biaya yang cukup besar. Ketidaksesuaian antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan yang ada dapat menghambat implementasi program inklusif secara optimal.
2) Kurangnya Dukungan Sosial dan Keluarga**:** Pendidikan inklusif memerlukan dukungan dari orang tua dan masyarakat, namun

banyak orang tua yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ketidaktahuan atau ketidaksetujuan terhadap penerapan pendidikan inklusif dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yang efektif.

3) Kesulitan dalam Mengakses Fasilitas yang Memadai**:** Tidak semua kecamatan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif. Beberapa sekolah di kecamatan dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tinggi, seperti Cibeureum, mungkin kesulitan dalam menyediakan ruang kelas yang dapat mengakomodasi kebutuhan fisik siswa, seperti ruang kelas dengan akses bagi siswa dengan disabilitas fisik atau penyediaan alat bantu belajar yang khusus.
4) Stigma dan Diskriminasi**:** Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif adalah stigma sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus. Stigma ini dapat menghambat proses integrasi siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, serta menambah beban emosional bagi siswa tersebut. Diskriminasi yang terjadi di sekolah atau masyarakat juga dapat menurunkan efektivitas program pendidikan inklusif.

Kesimpulan*:* Pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya memiliki kekuatan besar dalam hal pengenalan jenis hambatan yang beragam dan pemetaan kebutuhan siswa yang lebih terperinci. Namun, tantangan yang ada, seperti keterbatasan data yang merata, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan sosial dan anggaran, perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan program ini. Peluang untuk meningkatkan pelatihan guru, memperkuat kerjasama dengan profesional, serta menerapkan teknologi dalam pendidikan inklusif sangat besar, namun ancaman seperti keterbatasan anggaran dan stigma sosial tetap perlu diwaspadai. Dengan perencanaan yang tepat, kolaborasi yang efektif, dan dukungan penuh dari masyarakat dan orang tua, pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa berkebutuhan khusus.

4. Strategi Penanganan dan Layanan Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama dalam menyediakan layanan yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak

dengan kesulitan belajar. Berdasarkan analisis dari data yang ada, berikut adalah strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penanganan dan layanan pendidikan bagi kelompok ini.

a. **Peningkatan Ketersediaan dan Kompetensi Guru Pendidik Khusus (GPK)**

   1) **Rekrutmen GPK**: Meningkatkan jumlah GPK di sekolah-sekolah, terutama di daerah dengan populasi ABK yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui program insentif untuk menarik tenaga pengajar yang bersertifikat.

   2) **Pelatihan Berkelanjutan**: Mengadakan pelatihan rutin bagi guru reguler dan GPK untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan khusus siswa. Pelatihan ini harus mencakup metode pengajaran yang inklusif, strategi adaptasi kurikulum, serta penggunaan alat bantu pembelajaran.

b. **Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya Pendukung**

   1) Pengembangan Infrastruktur: Memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas yang ramah terhadap ABK, seperti ruang kelas yang aksesibel, alat bantu belajar, dan materi ajar yang disesuaikan.

   2) Alat Bantu Pembelajaran: Menyediakan alat bantu khusus seperti perangkat lunak untuk disleksia atau alat bantu visual bagi siswa dengan hambatan penglihatan. Ini penting untuk mendukung proses belajar mereka secara efektif.

c. **Penyesuaian Kurikulum dan Metode Pembelajaran**

   1) Kurikulum Adaptif: Mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ini termasuk modifikasi materi ajar dan penilaian yang lebih beragam.

   2) Metode Pembelajaran Inovatif: Menerapkan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif yang mendorong interaksi antar siswa, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

d. **Penjaringan dan Pendataan Siswa Berkebutuhan Khusus**

   1) **Sistem Data Terintegrasi**: Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendata ABK dan anak dengan kesulitan belajar secara akurat. Data ini akan membantu dalam merancang intervensi yang tepat sasaran.

2) **Analisis Kebutuhan**: Melakukan analisis berkala terhadap kebutuhan pendidikan ABK di setiap sekolah untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka.

e. **Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat**

1) Program Sosialisasi: Mengadakan program sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif dan dukungan terhadap ABK. Ini dapat mengurangi stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus.

2) Kemitraan dengan Organisasi Lokal: Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau komunitas lokal untuk mendukung program pendidikan inklusif melalui penyediaan sumber daya tambahan atau pelatihan.

f. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

1) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah untuk mengidentifikasi kendala dan keberhasilan.

2) Koordinasi Antara Instansi: Memperkuat koordinasi antara Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif berjalan efektif.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak dengan kesulitan belajar di Kota Tasikmalaya dapat meningkat, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil bagi semua siswa.

5. Alur Penangan Dalam Penerapan Pendidikan Inklusif

Semua peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif adalah konsep yang dikembangkan dari hak fundamental ini, tetapi dalam praktiknya pendidikan inklusif dilakukan dengan alur penanganan seperti gambar di bawah ini:

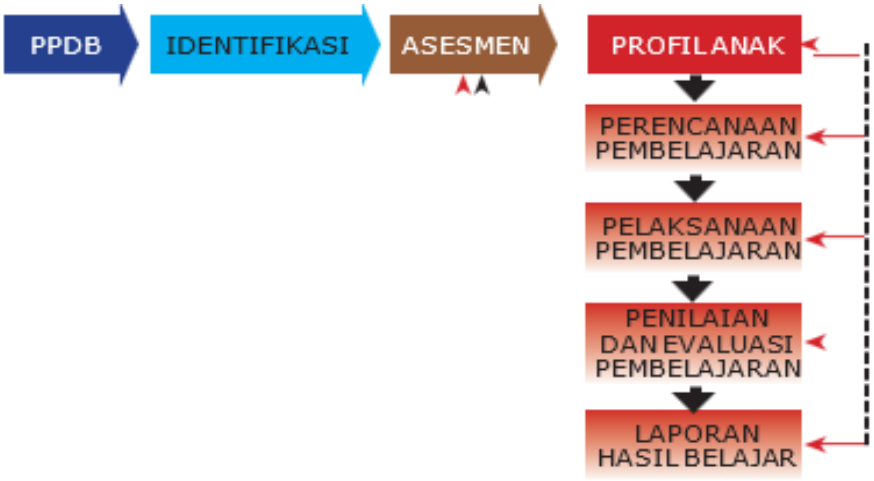

Gambar 5.1. Alur Penanganan dalam Penerapan Pendidikan Inklusif

a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Implementasi layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diawali dengan kegiatan PPDB. Kebijakan PPDB bagi peserta didik berkebutuhan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 11 (b) berupa pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan. Afirmasi diberikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/ atau dokter spesialis. Pasal 12 (f) dalam kebijakan tersebut juga menyebutkan penyesuaian rasio jumlah guru denganjumlah peserta didik penyandang disabilitas di kelas. Sebagai contoh, maksimal hanya ada 2 (dua) peserta didik berkebutuhan khusus untuk masing-masing rombongan belajar. Jika ditemukan peserta didik dengan kategori berat, hanya boleh ada satu peserta didik berkebutuhan khusus dalam rombongan belajar tersebut.

b. Identifikasi dan Asesmen

Identifikasi merupakan suatu proses untuk

menemukenali keberagaman peserta didik. Prinsip identifikasi dibatasi untuk menentukan individu yang diduga mengalami hambatan sehingga belum dapat ditentukan potensi apa yang dimiliki peserta didik. Proses identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti; observasi, wawancara, tes, dan pemeriksaan dokumen sebagai alat untuk menggali data.

Asesmen adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan secara mendalam untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan dan kebutuhan individu. Hasil asesmen akan menentukan jenis dan bentuk layanan pendidikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, hasil asesmen akan dituangkan dalam program pembelajaran berdasarkan modalitas (potensi) yang dimiliki setiap individu. Hasil asesmen ini juga digunakan untuk menentukan jenis dan bentuk intervensi secara tepat bagi peserta didik. Asesmen yang dilakukan meliputi fungsi area belajar (learning), sosial emosi (socio-emotional), komunikasi (communication), dan neuromotor. Asesmen dilakukan secara formal oleh para ahli (psikolog, dokter THT, dokter mata, terapis, dll.). Asesmen juga dilakukan secara informal oleh guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, atau GPK. Simpulan hasil asesmen menjadi dasar bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam menyusun program intervensi maupun penyusunan program pembelajaran oleh guru.

c. Penyusunan Profil Peserta Didik

Untuk menyusun program intervensi maupun penyusunan program pembelajaran, diperlukan matriks perencanaan (*planning matrix*) atau profil peserta didik sebelum menyusun program layanan (Quentin, 2012). Matriks perencanaan merupakan suatu kerangka kerja sederhana berbentuk tabel yang mengutamakan pendekatan *positive partnership*. Matriks perencanaan adalah deskripsi pemetaan tentang kondisi peserta

didik berkebutuhan khusus (PDBK) secara individu. Deskripsi yang diberikan berupa informasi kondisi aktual hambatan/kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan dan media yang diperlukan dalam intervensi.

Membuat matriks perencanaan untuk PDBK penting dilakukan untuk memotret perkembangan anak mulai dari karakteristiknya, serta dampak pada lingkungan keluarga dan sekolah. Dengan matriks perencanaan, guru mampu merancang strategi untuk membantu anak. Tujuan pembuatan matriks perencanaan adalah untuk mempermudah proses identifikasi karakteristik, menentukan metode pembelajaran, dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus. Matriks perencanaan dapat digunakan guru untuk menentukan intervensi dengan merujuk pada program layanan khusus yang sengaja dirancang untuk PDBK, sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan peserta didik. Hal ini dapat mencegah atau memperkecil potensi terjadinya keterlambatan dan mengoptimalkan perkembangannya. Dalam praktiknya, program intervensi dini perlu dirancang agar dapat menentukan metode dan model penanganan yang tepat.

d. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah untuk menghasilkan program dan proses pembelajaran bagi PDBK. Program pembelajaran disusun berdasarkan hasil assessment dan matriks perencanaan. Setelah deskripsi pemetaan karakteristik kebutuhan khusus, disusun skala prioritas yang menggambarkan urutan urgensi masalah yang harus segera ditangani. Berdasarkan matriks perencanaan, karakteristik kemampuan anak yang mempunyai dampak paling besar menjadi prioritas utama untuk ditangani dan menjadi target utama dalam program pembelajaran yang disusun guru.

d. Pelaksanaan Pembelajaran

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pada tahap ini dilakukan penerapan perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Strategi pembelajaran

terdiri atas block strategy dan task analysis. Task analysis digunakan hanya sebagai langkah untuk melakukan suatu aktivitas tetapi bukan sebagai strategi pembelajaran.

e. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

Langkah penilaian dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran perlu dilakukan untuk pengukuran dan pengambilan keputusan sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh anak, apakah anak telah mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan, serta menentukan apakah program proses belajar yang telah dirumuskan perlu diperbaiki.

f. Laporan Hasil Belajar

Laporan hasil belajar peserta didik perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh guru, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada orang tua.

6. Penyediaan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa salah satu hak pendidikan penyandang disabilitas adalah mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Akomodasi yang Layak dijabarkan secara lengkap dalam PP Nomor 13 Tahun 2020. Pada pasal 1 Ayat 9, akomodasi yang layak didefinisikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas (Pasal 2 PP Nomor 13 Tahun 2020). Penyediaan akomodasi yang layak dilakukan dengan pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang sesuai dengan kebutuhan

peserta didik (Pasal 4 PP Nomor 13 Tahun 2020). Selanjutnya, Pasal 11 kebijakan ini juga menyatakan bahwa bentuk akomodasi yang layak berdasarkan ragam penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk:

a. fleksibilitas proses pembelajaran;
b. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
c. fleksibilitas dalam perumusan kompeten**si** lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
d. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
e. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
f. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
g. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan.

C. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan beberapa inisiatif untuk mendukung pendidikan inklusif, beberapa telah dilakukan meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah diambil:

1. Penetapan Peraturan Wali Kota:

   Program Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang, yang mengharuskan semua sekolah menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Meskipun program ini ada dan telah berjalan, implementasinya masih dianggap belum optimal di lapangan. Tantangan dalam penerapan dan kesiapan sekolah dalam melayani ABK menjadi perhatian utama. Program Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya telah berjalan selama lebih dari 10 tahun atau sejak tahun 2014, tepatnya setelah diterbitkannya Peraturan Walikota No 46 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya. Peraturan Walikota tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 32 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang tata caranya diatur dengan Peraturan Walikota. Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Hal ini menunjukkan adanya komitmen jangka panjang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi seluruh peserta didik, khususnya ABK.

2. Program dan Kegiatan

Lingkup Program Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya meliputi beberapa upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi ABK. Upaya-upaya tersebut antara lain:

a. Dilakukan untuk mempelajari dan menerapkan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
b. Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk sekolahsekolah yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai sekolah inklusif.
c. Pelatihan Guru Inklusi: Dilakukan pelatihan khusus bagi Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani dan membimbing ABK di sekolah.
d. Membentuk Pokja (Pokja) Pendidikan Inklusif Kota Tasikmalaya. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah dan masyarakat.

3. **Target dan Indikator Keberhasilan**

Target spesifik dalam program pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, yaitu memastikan seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah. Target ini dikenal sebagai Angka Partisipasi Sekolah (APS), dengan tujuan mencapai tingkat partisipasi sekolah hingga 100%. Pencapaian APS 100% akan menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), memiliki akses ke pendidikan. Dalam pelaksanaannya terget tersebut belum tercapai 100%.

Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menetapkan beberapa indikator teknis untuk mendukung keberhasilan implementasi program pendidikan inklusif, yaitu:

a. Pemenuhan Tenaga Ahli (Guru Pendamping Khusus): Tenaga pendamping dengan keahlian khusus untuk mendukung pendidikan inklusif diharapkan tersedia di sekolah-sekolah.
b. Akomodasi yang Layak: Penyediaan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ABK agar dapat belajar dengan nyaman dan optimal.
c. Sarana dan Prasarana yang Menunjang: Fasilitas fisik dan material yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK menjadi fokus untuk menunjang proses belajar-mengajar di sekolah inklusif.

4. **Partisipasi dan Pencapaian Akademis Siswa Berkebutuhan Khusus.**

Hingga saat ini, pencapaian dan partisipasi akademis siswa ABK masih bergantung pada sekolah masing-masing. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum meratanya keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) di seluruh sekolah. Saat ini, idealnya setiap sekolah minimal memiliki satu GPK untuk mendampingi siswa ABK. Namun, kekurangan tenaga pendamping masih menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang melakukan pendataan untuk memastikan kebutuhan tenaga pendamping khusus dapat dipenuhi. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan inklusif bagi siswa ABK di Kota Tasikmalaya, sehingga lebih banyak sekolah dapat menyediakan layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

5. **Pengawasan dan Evaluasi**

Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan kebijakan pendidikan inklusif berjalan sesuai dengan rencana melalui pengawas binaan untuk melakukan monitoring dan memberikan pendampingan kepada guru dalam melayani siswa berkebutuhan khusus (ABK). Pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif dilakukan secara berkala dan terjadwal oleh pengawas binaan yang bertanggung jawab untuk setiap sekolah. Pengawas ini memastikan agar guru yang menangani ABK mendapatkan dukungan dan supervisi yang diperlukan, serta agar kebijakan inklusif diterapkan secara efektif di sekolah.

Evaluasi ini dilakukan bersama tim Pokja Inklusif, dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Salah satu temuan utama dari evaluasi ini adalah bahwa banyak siswa berkebutuhan khusus (ABK) yang belum terlayani secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya tenaga guru yang memiliki keahlian khusus dalam menangani ABK, keterbasan fasilitas yang memadai, serta anggaran yang tidak memadai. Keterbatasan ini menjadi tantangan signifikan dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif, sehingga tidak semua kebutuhan siswa dapat terpenuhi dengan baik.

Temuan dari evaluasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya mencari solusi guna meningkatkan kualitas tenaga pendidik, seperti memberikan pelatihan atau mendatangkan Guru Pendamping Khusus (GPK), menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan

menyediakan anggaran yang cukup, sehingga pelayanan bagi ABK dapat ditingkatkan dan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif.

6. **Kerja Sama / Kolaborasi**

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Beberapa mitra penting dalam kolaborasi ini meliputi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, serta Dinas Sosial. Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan dukungan komprehensif bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK) dalam lingkungan sekolah yang inklusif. Masing-masing organisasi tersebut memiliki peran penting dalam menunjang kebijakan pendidikan inklusif. Kolaborasi ini dinilai sangat membantu, baik dalam penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh ABK maupun dalam upaya pemenuhan hak anak dalam pendidikan yang setara. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut memperkuat kapasitas Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memberikan dukungan yang lebih efektif dan terkoordinasi, seperti pengembangan fasilitas, pelatihan, serta bantuan sosial bagi siswa dan keluarga mereka.

7. **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Beberapa faktor pendukung yang berperan penting dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya meliputi tingginya kepedulian guru terhadap anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) serta kerja sama yang baik antara satuan pendidikan dan para guru dalam memberikan informasi mengenai kebutuhan siswa ABK. Guru yang peduli ini merupakan elemen penting yang perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk mendukung penerapan pendidikan inklusif secara efektif.

Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menghadapi sejumlah hambatan dalam menerapkan kebijakan pendidikan inklusif. Beberapa di antaranya adalah:

a. Kurangnya keahlian khusus pada sebagian guru dalam menangani siswa ABK, yang menyebabkan kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara optimal di sekolah.

b. Prioritas anggaran yang minim bagi ABK, mengingat siswa ABK sering kali dianggap sebagai komunitas kecil dan kurang terlihat di antara kebutuhan pendidikan lainnya.

c. Keterbatasan anggaran untuk tenaga ahli, karena Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki kodering khusus untuk penganggaran honor tenaga pendamping atau tenaga ahli yang dibutuhkan dalam menangani ABK.

Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada pelaksanaan kebijakan inklusif di lapangan, yang menyebabkan layanan pendidikan untuk ABK belum maksimal. Meskipun Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berupaya dengan kemampuan yang ada, keterbatasan tenaga ahli dan alokasi anggaran yang minim menghambat optimalisasi layanan.

Kondisi tersebut menunjukan perlu adanya perbaikan dan dukungan lebih lanjut, terutama dalam aspek pelatihan guru dan alokasi anggaran khusus yang memadai, agar kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

8. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya:

- Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan komitmen yang lebih kuat dalam mendukung pendidikan inklusif, termasuk melalui penganggaran yang memadai dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Juga revisi Perwalkot tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya mendesak untuk direvisi.
- Perlu dilakukannya revisi terhadap Peraturan Walikota nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya untuk menyeleraskan dengan tuntutan regulasi di atasnya, dan mengakomodir keperluan implementasi di lapangan.
- Perlu disusunnya Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai acuan bagi Sekolah dan guru-guru.
- Pemerintah Kota mesti mengalokasi anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mengembangkan program pelatihan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk guru agar mereka lebih siap dalam menghadapi beragam kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
- Penguatan dan optimalisasi peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Pokja Inklusif melalui peningkatan SDM, biaya operasional dan honorarium.
- Memperkuat kerjasama pentaheliks antara pemerintah daerah dengan lembaga lain: LSM, dunia industrusi, universitas, media dan keluarga untuk sembangun support system dalam pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan inklusif.
- Diperlukan kajian lanjut dalam menyiapkan dan merumuskan poin-poin penting dalam revisi Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya.
- Pemetaan ini baru dilakukan di SD Negeri. Untuk lebih mendapatkan data dan gambaran yang komprehensif tentang PDBK

pelu diperluas ke sekolah swasta termasuk Madrasah Ibtidaiyah. Pemetaan juga mesti termasuk dengan ketersediaan sapras, guru pendamping, dan lain-lain.

- Perlu dibangun sistem pendataan/pusat data terpadu berbasis digital tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya.
- Mendorong Perguruan Tinggi di Kota Tasikmalaya untuk melakukan riset-riset yang berkaitan dengan Pendidikan Inklusif yang hasilnya dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Implementasi program pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya melibatkan beberapa langkah strategis, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan untuk guru, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mendukung tenaga pendidik dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Meskipun langkah-langkah ini merupakan langkah positif, tantangan tetap ada. Misalnya, tidak semua sekolah memiliki guru pendamping yang terlatih, dan tenaga ahli untuk menangani siswa ABK masih terbatas.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi siswa ABK, masih banyak yang tidak terlayani dengan baik. Kendala seperti kurangnya anggaran dan pelatihan yang memadai bagi guru berkontribusi terhadap pelaksanaan yang kurang optimal. Temuan dari evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan inklusif bergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga satuan pendidikan. Belum adanya pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan adalah:

1. Revisi Peraturan Wali Kota

Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya tahun 2014 perlu diperbaharui dengan kondisi sekarang sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam mendukung pendidikan inklusif di semua jenjang dan jenis pendidikan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Terdapat kekurangan jumlah dan kompetensi Guru Pendidik Khusus (GPK) yang berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Banyak guru reguler yang tidak memiliki pelatihan khusus untuk menangani kebutuhan siswa tersebut.

3. Distribusi Siswa yang Tidak Merata

Persebaran siswa berkebutuhan khusus di Kota Tasikmalaya tidak merata, dengan sekolah-sekolah di pusat kota lebih siap menyediakan layanan inklusif dibandingkan dengan sekolah di wilayah pinggiran. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan.

4. Fasilitas Pendukung yang Terbatas

Fasilitas seperti ruang kelas yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus dan alat bantu pembelajaran masih sangat terbatas. Minimnya fasilitas ini menghambat proses pembelajaran yang optimal.

5. Pemahaman dan Kesiapan Guru

Banyak guru reguler yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai mengenai pendidikan inklusif, sehingga mereka kesulitan dalam menyusun strategi pembelajaran yang adaptif.

6. Efektivitas Kebijakan yang Belum Optimal

Meskipun ada kebijakan pendidikan inklusif, pelaksanaannya masih kurang efektif karena keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta minimnya monitoring dan evaluasi.

B. **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya:

1. **Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Guru Pendidik Khusus (GPK)**:

    a. **Rekrutmen GPK**: Melakukan rekrutmen GPK secara aktif untuk memenuhi kebutuhan di setiap sekolah, terutama di daerah yang kurang terlayani.

    b. **Pelatihan Berkelanjutan**: Menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala bagi GPK dan guru reguler untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus.

2. **Pengembangan Infrastruktur Pendidikan**:

    a. Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas: Meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan dengan menyediakan ruang kelas yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus, serta alat bantu pembelajaran yang diperlukan.

b. Adaptasi Kurikulum: Mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, termasuk penyediaan materi ajar yang adaptif.

3. **Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat**:

   a. Kampanye Edukasi: Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusif dan dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus.

   b. Kemitraan dengan LSM: Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menyediakan sumber daya tambahan dan dukungan bagi sekolah-sekolah dalam melayani siswa berkebutuhan khusus.

4. **Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif**:

   a. Sistem Monitoring Terintegrasi: Mengembangkan sistem monitoring yang terintegrasi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan inklusif, termasuk pengumpulan data tentang jumlah siswa berkebutuhan khusus dan ketersediaan GPK.

   b. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif untuk mengidentifikasi kendala dan keberhasilan, serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

5. **Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Pendidikan**:

   a. Distribusi Sumber Daya Merata: Menjamin distribusi sumber daya pendidikan secara merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah pinggiran, agar semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan dukungan untuk pendidikan inklusif.

   b. Program Intervensi Khusus: Mengembangkan program intervensi yang dirancang khusus untuk siswa dengan kesulitan belajar spesifik, guna memberikan dukungan tambahan dalam proses pembelajaran.

6. **Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah**:

   a. Koordinasi Antara Dinas Pendidikan dan Instansi Terkait: Memperkuat koordinasi antara Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif berjalan efektif.

b. Pengalokasian Anggaran Khusus: Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program-program pendidikan inklusif dan pengembangan fasilitas yang diperlukan.

Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Kota Tasikmalaya dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif, sehingga semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat memperoleh akses ke pendidikan yang setara dan bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Arifin, Z. (2020). *Pendidikan Inklusif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
2. Supriyadi, A. (2021). *Strategi Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
3. Sari, D. (2019). *Inklusi Pendidikan: Konsep dan Implementasi di Sekolah Dasar*. Bandung: Alfabeta.
4. Rahmawati, L. (2022). *Pengembangan Kurikulum Inklusif di Indonesia*. Malang: UMM Press.
5. Hidayati, N. (2023). *Metode Pembelajaran Inklusif untuk Siswa dengan Kebutuhan Khusus*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Artikel Jurnal

11. Iskandar, M., & Rini, S. (2022). "Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 5(1), 45-60.
12. Prabowo, H., & Wulandari, E. (2021). "Pengaruh Pelatihan Guru terhadap Kualitas Pendidikan Inklusif". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 123-130.

13. Setiawan, Y., & Anisa, R. (2023). "Persepsi Guru terhadap Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, 10(1), 78-85.

14. Lestari, P., & Fitria, S. (2020). "Kendala Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar". *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 15(3), 201-210.

15. Nuraini, D., & Rahman, A. (2019). "Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Tinjauan Kebijakan dan Praktik". *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(4), 215-230.

Laporan Penelitian

16. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (2023). *Laporan Kinerja Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya*.

17. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya (2022). *Statistik Pendidikan Kota Tasikmalaya*.

18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2021). *Laporan Tahunan tentang Pendidikan Inklusif*.

Artikel Berita

19. Kompas.com (2023). "Pendidikan Inklusif di Indonesia Masih Banyak Tantangan".

20. Tempo.co (2022). "Kota Tasikmalaya Berkomitmen pada Pendidikan Inklusif".

21. Republika.co.id (2021). "Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus Masih Terabaikan".

Disertasi dan Tesis

22. Fatimah, I. (2021). "Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Tasikmalaya". Tesis Universitas Negeri Jakarta.

23. Junaidi, M. (2020). "Persepsi Guru terhadap Kesiapan Sekolah dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif". Disertasi Universitas Pendidikan Indonesia.

Buku Referensi Lainnya

24. Sari, A., & Haryanto, R. (2019). *Pendidikan untuk Semua: Panduan Praktis untuk Guru*.

25. Adi, S., & Setiawan, Y. (2020). *Pedagogi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*.

Jurnal Internasional

26. Smith, J., & Brown, T. (2022). "Inclusive Education Practices in Southeast Asia". *International Journal of Inclusive Education*, 26(5), 487-502.

27. Johnson, L., & Lee, M. (2021). "Challenges in Implementing Inclusive Education in Developing Countries". *Journal of Educational Policy*, 36(4), 543-558.

Artikel Online

28. UNICEF Indonesia (2023). "Pendidikan Inklusif: Hak Setiap Anak".

29. UNESCO (2021). "Inclusive Education: A Global Perspective".

Buku Pedoman

30. Kementerian Sosial Republik Indonesia (2022). *Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif*.

Riset dan Kajian

31. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2023). *Kajian Tentang Kebijakan Pendidikan Inklusif*.

Buku Teks

32. Nugroho, H., & Widiastuti, I. (2019). *Dasar-Dasar Pendidikan Khusus*.

Laporan Tahunan

33. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (2022). *Laporan Tahunan tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*.


KOTA TASIKMALAYA
KOTA RESIK